

Sausapor : Saksi Sejarah Perang Dunia II di Kabupaten Tambrau Provinsi Papua Barat

Ana M. F. Parera, S.pd
Desy P. Usmany, SS
Saberia, S.Pd
Dr. Rosmaida Sinaga



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA PAPUA



Sausapor : Saksi Sejarah Perang Dunia II di Kabupaten Tambrauw

Provinsi Papua Barat

© Penulis

Ana M. F. Parera, S.Pd

Desy P. Usmany, SS

Saberia, S.Pd

Dr. Rosmaida Sinaga

Disain cover : Cahya Putra I dan I Made Sudayga

Disain isi : Tim Kreatif Kepel Press

Cetakan pertama, Desember 2013

Diterbitkan oleh Penerbit Kepel Press

Puri Arsita A-6,

Jl. Kalimantan, Purwosari, Ringroad Utara, Yogyakarta

Telp/faks : 0274-884500

Hp : 081 227 10912

Email : amara_books@yahoo.com

Anggota IKAPI Yogyakarta

ISBN : 978-602-1228-12-8

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.

Percetakan Amara Books

Isi diluar tanggung jawab percetakan

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat, rahmat dan hidayah-Nya, sehingga laporan penelitian yang dilaksanakan di Sausapor Kabupaten Tambrauw dapat terlaksana dengan baik dan lancar.

Sejarah masa lampau memperjelas pemahaman kita tentang masa kini, seperti halnya perang dunia ke-2 yang terjadi, dalam hal ini di Sausapor, yang sekarang termasuk dalam wilayah Kabupaten Tambrauw. Daerah itu merupakan salah satu tempat yang dijadikan basis pertahanan Sekutu untuk melawan Jepang, yang pada waktu itu juga berada dalam wilayah Sorong. Dimana Sausapor dahulunya termasuk dalam wilayah Sorong (disebut sebagai tanah besar, karena wilayah kekuasaan Sorong yang cukup luas), sehingga Jepang melakukan penjajahan terhadap masyarakat setempat hingga ke Sausapor. Sausapor juga dipandang sebagai daerah strategis oleh Sekutu untuk membangun pangkalan udara di daerah tersebut agar dengan mudah melihat gerak-gerik melawan Jepang.

Sausapor sebagai salah satu tempat terjadinya PD II, menjadikan Sausapor sekarang ini, lebih dikenal dan tidak menutup kemungkinan menjadi tempat wisata, karena masih terdapat peninggalan-peninggalan PD II. Bekas-bekas peninggalan tersebut mendapat perhatian dari pemerintah, sehingga ke depannya peninggalan-peninggalan itu dapat mendatangkan keuntungan bagi pemerintah dan masyarakat setempat.

Tim Peneliti menyadari bahwa penyusunan laporan ini masih jauh dari apa yang diharapkan, baik dari segi tata bahasa, susunan kata serta isinya. Hal ini tak lepas dari keterbatasan penulis sebagai manusia biasa. Untuk itu, sangat diharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dalam penyempurnaan laporan ini.

Tentunya dalam penyusunan laporan ini tidak semata-mata usaha sendiri, tetapi telah melibatkan beberapa pihak atas bantuan dan motifasinya, dengan ini disampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

- Kepala BPSNT Jayapura yang telah memberikan izin dalam pelaksanaan penelitian ini sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan lancar.
- Kepada Ibu Dr. Rosmaida Sinaga sebagai pembimbing yang turut membantu penelitian ini.
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tambrauw, yang telah memberikan ijin untuk melakukan penelitian.
- Kepala Bappeda Kabupaten Tambrauw yang telah membantu dalam memberikan data-data pendukung yang relevan dalam penelitian ini.
- Kepala BPS Kabuapten Sorong yang membantu mengumpulkan referensi dan buku yang sesuai.
- Kepala Distrik Sausapor yang telah memberi informasi dan referensi yang mendukung dalam penulisan ini.
- Kepala Kampung Sausapor, Kepala Kampung Werur, dan Kampung Werbes yang bersedia memberikan data dan informasi dalam penulisan ini.
- Masyarakat setempat yang dengan ramah telah membantu dalam kelancaran penulisan ini.

- Semua pihak yang telah membantu memberi masukan bersifat membangun dalam penyusunan penulisan ini. Semoga segala jasa baik yang diberikan mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa.

Tim berharap semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan yang membutuhkan.

Jayapura, Juli 2013

TIM

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
D. Ruang Lingkup	5
E. Metode Penelitian	5
F. Sistematika Penulisan	6
BAB II PROFIL SAUSAPOR	9
A. Sejarah Pemekaran Kabupaten Tambrauw	9
B. Letak Geografis dan Lokasi	11
C. Topografi	15

D. Iklim dan Curah Hujan	16
E. Penduduk	17
F. Sistem Mata Pencaharian	18
G. Sarana dan Prasarana	20
a. Sarana Pendidikan	21
b. Sarana Kesehatan	23
c. Sarana Peribadatan	23
d. Sarana Perdagangan dan Jasa	24
e. Sarana Perkantoran	24
f. Sarana Air Bersih, Prasarana Listrik	27
g. Sarana Jalan/Jembatan, Perhubungan Udara dan darat	27
H. Sistem Religi	35
 BAB III HUBUNGAN WILAYAH VOGELKOP (KEPALA BURUNG) DENGAN DUNIA LUAR	 37
A. Kontak Penduduk Vogelkop dengan Nusantara	37
B. Struktur Pemerintahan Kesultanan Tidore di Nieuw Guineabagian Barat	40
C. Kontak dengan Orang-orang Eropa	42
D. Penegakan Kekuasaan Pemerintahan Kolonial Belandadi Sausapor	49
E. Kehadiran Jepang di Vogelkop	64
 BAB IV SAUSAPOR DALAM PERANG DUNIA II	 67
A. Kehadiran Tentara Jepang di Papua	67
B. Reaksi Masyarakat Papua Terhadap Kehadiran Tentara Jepang	74
C. Pendaratan Sekutudi Papua	79
D. Kehadiran Tentara Sekutudi Sausapor	83
E. Dampak Pendaratan Tentara Sekutu	91

F. Peninggalan Sejarah Tentara Jepang dan Sekutu di Sausapor	93
BAB V PENUTUP	99
A. Kesimpulan	99
B. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	101
DAFTAR INFORMAN	105
LAMPIRAN-LAMPIRAN	107

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah dan Sebaran Sarana Pendidikan Wilayah Distrik Sausapor Kabupaten Tambrauw Tahun 2013	20
Tabel 2. Jumlah Sarana Peribadatan Kabupaten Tambrauw Distrik Sausapor Tahun 2013	23

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Administrasi Kabupaten Tambrauw	11
Gambar 2. Peta Kabupaten Tambrauw terbaru dengan jumlah distrik sebanyak 12 buah	12
Gambar 3. Taman Kanak-kanak Maranata	20
Gambar 4. Sekolah Dasar yang terdapat di Sausapor	21
Gambar 5. Sekolah SMP Negeri I dan SMA Negeri I Sausapor	21
Gambar 6. Puskesmas di Kampung Sausapor	22
Gambar 7. Kantor Bupati Kabupaten Tambrauw	24
Gambar 8. Pusat perkantoran Dinas-Dinas Pemerintahan Kabupaten Tambrauw	24
Gambar 9. Kantor Distrik Sausapor dan Kantor Perhubungan di Sausapor	25
Gambar 10. KODIM Sausapor	25
Gambar 11. Kondisi Jalan dari Sorong menuju Sausapor	27
Gambar 12. Jembatan Kayu yang menghubungkan Sausapor –Werur	28
Gambar 13. Rakit sebagai Pengganti Jembatan untuk menyeberangkan Motor dan orang	28
Gambar 14. Landasan Pesawat terbang yang berada di Werur	29
Gambar 15. Pelabuhan Sausapor	30
Gambar 16. Longbot, salah satu angkutan laut yang digunakan masyarakat sebagai sarana transportasi	31

Gambar 18. Transportasi ojek, satu-satunya transportasi yang digunakan oleh masyarakat sebagai pengganti angkutan umum yang tidak ada di Sausapor	33
Gambar 19. Struktur Pemerintahan Kesultanan Tidore di Nieuw Guinea Bagian Barat	41
Gambar 20. Struktur Pemerintahan Kolonial Belanda Di Nederlands Nieuw Guinea Pada 1898	62
Gambar 21. Amphibi antri di pulau salomon untuk diberangkatkan ke Sausapor	84
Gambar 22. Pasukan sekutu menuju Sausapor	86
Gambar 23. Peta Daerah Sausapor masa Perang Dunia II	87
Gambar 24. Lapangan terbang Opmarai-Mar di Sausapor masa Perang Dunia II	88
Gambar 25. Alat perang milik sekutu yang ditanam didalam tanah.	88
Gambar 26. B-25 Mitchell bombers of 42nd Bomber Group, US 69th Bomber squadron at Cape sansapor New Guinea, sep 1944-feb 1945	89
Gambar 27. Pesawat P-38 di Midelburg	89
Gambar 28. Bekas lapangan terbang Sekutu	95
Gambar 29. bekas kapal sekutu yang sudah dipotong-potong untuk dijual	96
Gambar 30. Mesin kapal yang sudah dipotong	97
Gambar 31. Mobil tank sekutu yang berada di Kampung Werbes ..	98

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran mengenai Sausapor sebagai saksi sejarah perang dunia II. Metode yang digunakan adalah metode sejarah. Dikatakan sebagai saksi sejarah, karena dimasa perang dunia II, wilayah Sausapor digunakan oleh sekutu sebagai basis pertahanan militer. Dampak kehadiran sekutu dirasakan langsung oleh masyarakat setempat. Mereka diungsikan ke tempat pengungsian di kali Wenai(Wewe) dan selanjutnya ke Numfor. Masyarakat juga mendapat jaminan hidup dan pengetahuan menggunakan senjata. Dimasa sekarang, sejarah perang dunia II di Sausapor dapat dibuktikan dengan banyaknya tinggalan sekutu di daerah ini yang masih dapat dilihat dan dijadikan aset wisata sejarah perang dunia II.

Kata Kunci : Sausapor, Saksi Sejarah, Perang Dunia II.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perang Dunia II di kawasan Asia Pasifik dimulai dengan serangan Jepang terhadap Pearl Harbor pada 7 Desember 1941. Pearl Harbor merupakan pangkalan terbesar Angkatan Laut Amerika di Pasifik. Sesudah Pearl Harbor dibom oleh Jepang, Filipina, Malaysia, Australia, New Zealand dan Indonesia (yang pada waktu itu Hindia Belanda) terbuka bagi serangan Jepang (Ojong, 2006:2). Dalam gerakannya ke selatan, Jepang menyerbu Indonesia (Hindia Belanda) antara lain di Tarakan Kalimantan Timur, Balikpapan, Pontianak, Samarinda, Banjarmasin dan Palembang serta Jepang juga menyerang sebagian Pulau Jawa (Notosusanto,1984:1). Serangan tersebut dilakukan Jepang untuk mewujudkan ambisinya menguasai seluruh wilayah Asia. Salah satu wilayah yang diinginkan Jepang adalah wilayah Hindia Belanda (Indonesia). Ketidakmampuan pemerintah Belanda dalam menghadapi militer Jepang menyebabkan pemerintah Belanda menyerah kepada pasukan Jepang pada 8 Maret 1942.

Sebelum armada perang Jepang menyerang Indonesia, perairan di sekitar Papua telah sering dikunjungi oleh perahu-perahu penangkap ikan milik Jepang. Angkatan Laut Jepang menggunakan para nelayan tersebut untuk mengumpulkan informasi tentang kedalaman laut, arus air, keadaan pantai, teluk-teluk berlindung, dan informasi lainnya yang digunakan dalam merencanakan dan melaksanakan penyerangan atas

Indonesia umumnya dan Papua khususnya (Koentjaraningrat dan Bachtiar, 1963: 72). Siasat perang yang demikian, mendukung keberhasilan armada perang Jepang, sehingga tanggal 19 April 1942, Jepang berhasil menduduki Papua (Mampior, 1972: 12).

Dalam perang Dunia Ke II, Irian (Papua) tidak dianggap begitu penting bagi Jepang. Namun, ketika sekutu mendarat di Biak, yang berarti batu loncatan ke Filipina, barulah pihak Jepang mencoba mengirim armadanya ke Papua (Ojong, 2001: 113). Meskipun kekuatan armada perang Jepang di Biak tidak cukup kuat karena tidak didukung sepenuhnya oleh armada kapal perangnya, tetapi pasukan Jepang dibawah pimpinan Kolonel Kuzume mampu mempertahankan Biak dari Sekutu hampir satu bulan lamanya. Keberhasilan tentara Sekutu merebut Biak pada 22 Juni 1944 menyebabkan pihak Jepang mulai meningkatkan perlawanannya di Papua. Namun, strategi tentara Jepang tidak mampu mengalahkan tentara Sekutu di Papua. Tentara Sekutu menyusun berbagai strategi perang untuk mengalahkan tentara Jepang di Papua pada Perang Dunia II. Salah satu strategi perang yang dilaksanakan tentara Sekutu adalah "*From island to island*" ataupun "*Island hopping*". Dalam bahasa Indonesia strategi ini biasa disebut strategi "loncat katak". Sekali meloncat pasukan Sekutu mampu mencapai ratusan mil jauhnya dan melumpuhkan kekuatan armada perang Jepang di Papua. Dengan strategi "loncat katak" tentara Sekutu berhasil mengisolasi tentara Jepang yang bertahan di antara tempat-tempat yang direbutnya (Siagian, 1978: 179).

Dengan strategi lompat katak (*Island hopping*), Jenderal Mac Arthur mengisolasi armada perang Jepang yang bertahan di wilayah yang direbutnya, tanpa perbekalan, tanpa hubungan dengan induk pasukan yang sudah dimusnahkan, dan harus berjuang sendiri-sendiri untuk bertahan. Namun, pasukan Jepang tidak akan berjuang sendiri-sendiri, karena pasukan Jepang hanya bergerak sebagai mesin apabila digerakkan pengemudinya. Selain itu, dengan strategi "loncat katak", Mac Arthur menghemat waktu, menghemat peralatan, menghemat

prajurit-prajuritnya sebagai korban, menghemat anggaran negaranya (Siagian, 1978: 179).

Dalam rangka melaksanakan strategi “loncat katak”, MacArthur berpendapat bahwa, Papua merupakan jalan pintas menuju Filipina dan Tokyo. Namun, pendapat MacArthur itu ditentang oleh para laksamana Amerika dibawah pimpinan Laksamana Nimitz. Laksamana Nimitz beranggapan bahwa Papua boleh direbut oleh MacArthur, tetapi jalan pintas menuju Tokyo bukanlah melewati Filipina, tetapi jalan laut di Pasifik Tengah. Pertentangan ini menyebabkan President Amerika Rosevelt turun tangan dan memanggil kedua perwira yang bertentangan tersebut ke Hawaii. Dalam pertemuan itu Rosevelt menyetujui strategi perang kedua petinggi militernya itu dan memutuskan bahwa Jendral MacArthur dari Papua, harus mendarat di Filipina, dan Laksamana Nimitz boleh memilih jalan laut (Ojong, 2001: 113).

Menindaklanjuti strategi “loncat katak” itu, tentara Sekutu berperang melawan tentara Jepang di Papua mulai dari Teluk Tanah Merah, Wakde Sarmi, Biak hingga berakhir di Sausapor pada 30 Juli 1944. Pada Perang Dunia II, tentara Sekutu membangun beberapa pangkalan tempat persinggahannya di Papua yaitu di Teluk Tanah Merah, Hollandia (Jayapura), Wakde Sarmi, Biak dan Sausapor. Dengan demikian, pendaratan pasukan Sekutu di Papua dimulai dari Holandia, Sarmi, Biak, Numfor dan terakhir Sausapor (Sansapor atau Vogelkop). Lakzamana Morison dalam bukunya “New Guinea and the Marianas”, 1953, mengatakan bahwa Jendral MacArthur setelah tiba di Vogelkop (Sausapor) ujung paling barat Irian, boleh peluk tangan, selanjutnya menonton dari jauh bagaimana pesaingnya Lakzamana Nimitz membawa bendera Amerika dan sekutu ke Tokyo (Ojong, 2001: 104). Pendapat Lakzamana Morison dengan jelas memperlihatkan bahwa Sausapor (Sansapor) merupakan lokasi penting dan strategis bagi MacArthur untuk merebut Tokyo lebih awal dari Lakzamana Nimitz.

Sausapor merupakan salah satu wilayah yang pernah diduduki oleh tentara Jepang dan Sekutu pada Perang Dunia II (Perang Pasifik).

Pendudukan tentara Jepang dan tentara Sekutu di Sausapor tentunya berdampak terhadap kehidupan masyarakatnya. Pendudukan tentara Jepang dan Sekutu di Sausapor juga mempengaruhi sejarah dan budaya masyarakat di wilayah itu. Oleh karena itu, para penulis termotivasi untuk melakukan penelitian tentang Sausapor Saksi Sejarah Perang Dunia II.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah mengapa Sausapor dijadikan pangkalan tentara Sekutu pada Perang Dunia II dan bagaimana dampak dari kehadiran tentara Jepang dan tentara Sekutu terhadap masyarakat di Sausapor? Permasalahan tersebut diformulasikan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

- a. Bagaimana gambaran umum Sausapor sebelum kehadiran tentara Jepang dan tentara Sekutu?
- b. Bagaimana proses kehadiran tentara Jepang dan tentara Sekutu di Papua umumnya dan di Sausapor khususnya?
- c. Bagaimana peninggalan Perang Dunia II di Sausapor?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang:

- a. Gambaran umum Sausapor sebelum kehadiran tentara Jepang dan tentara Sekutu.
- b. Proses kehadiran tentara Jepang dan tentara Sekutu di Papua umumnya dan di Sausapor khususnya.
- c. Peninggalan Perang Dunia II di Sausapor.

2. *Manfaat*

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

- a. Memberikan sumbangan pada ilmu pengetahuan khususnya, sejarah lokal dan dunia.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah daerah Kabupaten Tambrau, khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai bahan pelestarian sejarah serta materi muatan lokal sejarah.
- c. Memberikan sumbangan pemikiran kepada Dinas Pariwisata Kabupaten Tambrau untuk menjadikan Sausapor sebagai destinasi wisata dunia
- d. Memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat Sausapor umumnya dan khususnya kepada generasi muda untuk menjaga dan melestarikan benda-benda bersejarah peninggalan Perang Dunia II di wilayahnya.

D. **Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian terdiri dari ruang lingkup materi dan ruang lingkup operasional. Ruang lingkup materi mencakup sejarah Sausapor sebelum dan sesudah kehadiran pemerintahan kolonial Belanda, Jepang dan Sekutu, dan setelah Papua berintegrasi dengan Indonesia. Ruang lingkup operasional adalah, Distrik Sausapor, Kabupaten Tamrau, Provinsi Papua Barat.

E. **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang mengacu kepada tahapan-tahapan yaitu: pengumpulan sumber (heuristik), kritik sumber, interpretasi dan penulisan (Notosutanto, 1978: 11-12). Pada tahap heuristik, penulis mencari dan menemukan sumber sejarah yang

berkenaan dengan masalah Sausapor sebagai saksi sejarah Perang Dunia II. Sumber sejarah tentang masalah tersebut diperoleh dari pelacakan berbagai perpustakaan di antaranya: Perpustakaan Universitas Cenderawasih dan Perpustakaan STFT Fajar Timur Jayapura. Sumber sejarah lainnya diperoleh dari wawancara dengan saksi sejarah atau nara sumber yang pernah mendengar cerita tentang peristiwa sejarah, dalam hal ini Sausapor sebagai saksi Perang Dunia II. Sumber kedua ini merupakan sumber sejarah lisan atau sumber primer (Informan terlampir).

Tahapan kedua penulis melakukan kritik sumber, yaitu meliputi kritik ekstern yang menyangkut otensitas (keaslian) dokumen yang ditemukan dan kritik intern yang menyangkut kredibilitas isi dokumen. Kritik ekstern dilakukan dengan melihat tanggal pembuatan dokumen, tempat pembuatan, pejabat pembuat, dan bahan pembuatan. Kritik intern dilakukan dengan membaca isi dokumen, terutama yang berhubungan dengan formalitas, tulisan tangan, gaya bahasa, dan isi. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui kebenaran isi dokumen sesuai dengan bentuk aslinya.

Pada tahap interpretasi, penulis melakukan penafsiran terhadap fakta-fakta sejarah untuk menetapkan saling berhubungan antar fakta sejarah, yang kemudian dianalisis dan dirangkaikan menjadi satu kesatuan fakta yang logis dan harmonis. Pada tahap ini penulis mencari dan menyusun suatu hubungan kausalitas sesuai urutan terjadinya peristiwa dari setiap fakta yang telah diperoleh.

Tahapan terakhir adalah penulisan sejarah (historiografi), yaitu penyusunan fakta-fakta dalam suatu sintesis yang utuh sebagai satu kesatuan, sehingga menjadi suatu cerita sejarah yang menceritakan fakta-fakta sejarah.

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Ruang Lingkup, Metode Penulisan, dan Sistematika Penulisan.

Bab II Profil Sausapor: keadaan geografis, lokasi, penduduk, sistem mata pencaharian, sistem kepemimpinan modern, sarana dan prasarana, kampung-kampung didistrik sausapor, sistem religi, sistem kekerabatan.

Bab III Hubungan wilayah Vogelkop (Kepala Burung) dengan dunia luar: akan membahas tentang kontak Papua dengan Nusantara (Kesultanan Tidore) umumnya dan khususnya di Sausapor, dan Penegakan Kekuasaan Pemerintah Kolonial Belanda di Sausapor.

Bab IV Sausapor dalam perang dunia II: akan dibahas tentang kehadiran tentara Jepang di Papua, kehadiran tentara Sekutu di Sausapor, peninggalan sejarah tentara Jepang dan Sekutu di Sausapor.

Bab V Penutup, yang terdiri atas kesimpulan dan saran.

BAB II

PROFIL SAUSAPOR

A. Sejarah Pemekaran Kabupaten Tambrauw

Awal munculnya ide pemekaran Kabupaten Tambrauw adalah pada tahun 1998 yang digagas oleh seorang Akademisi dari Universitas Cendrawasih Jayapura yang juga merupakan salah satu putra Tambrauw yaitu Drs. Andreas Sedik, M. Si yang mengajak sejumlah mahasiswa dan beberapa tokoh muda untuk memulai membuka wacana pemekaran. Ide itu muncul secara spontan sebagai respon dari adanya persiapan pemekaran Kota Sorong dengan meningkatkan status kota administratif menjadi Kotamadya.

Kemudian melalui hasil kerja tim pemekaran Kabupaten Tambrauw adalah dikeluarkannya Surat Usulan Pemekaran yang dibuat oleh LEMAKA Nomor 03/TK-PKT/SRG/XI/2003 pada tanggal 2 Desember 2003. Surat aspirasi dari masyarakat diatas mendapat dukungan luas dari masyarakat Tambrauw. Surat LEMAKA tersebut mendapat dukungan dari Bupati Sorong sehingga pada tanggal 11 April 2008 Gubernur Papua Barat mengeluarkan Surat Rekomendasi No. 125/294/GPB/2008 yang menyatakan bahwa Pemekaran Kabupaten Tambrauw hanya terdiri dari 6 Distrik di Kabupaten Sorong dengan Ibukota di Fef. Dengan Dasar Keputusan Gubernur ini, DPR-RI dan DPRD berkunjung ke Kabupaten Tambrauw Sorong dan Fef pada Tanggal 12 Juli dan 17 Oktober 2008.

Keputusan-keputusan yang dihasilkan dengan Provinsi Papua adalah Surat Keputusan DPRD Propinsi Papua Nomor 4/PIM-DPRD/05 tanggal 1 Februari 2005 tentang Persetujuan Pemekaran /pembentukan Kabupaten Pegunungan Tamberauw dan Surat Usulan Gubernur Papua Nomor 135/708/ set tanggal 7 April 2005 tentang usulan Pembentukan Kabupaten Baru. Surat lain yang mendukung pemekaran adalah Keputusan Gubernur Papua Barat No. 900/1189/set tanggal 31 Mei 2005 tentang Dukungan Pembiayaan bagi Kabupaten Baru di Propinsi Papua dan Surat Rekomendasi Umum Majelis Rakyat Papua (MRP) No. 130/203/MRP-06 tentang Dukungan dan Persetujuan Pemekaran/ Pembentukan Kab/kota di Propinsi Papua.

Pada tanggal 1 Februari 2008 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Amanat Presiden bernomor R. 04/Pres/02/2008 tentang 14 RUU tentang Pembentukan Kabupaten /kota yang didalamnya termuat RUU mengenai Pemekaran Tamberauw. Amanat Presiden tersebut segera disambut baik oleh Komisi II DPR-RI untuk membentuk Tim Panitia Kerja (Panja) Pemekaran yang diketuai oleh Drs. Eka Santosa. (*Profil Kabupaten Tamberauw 2011:3*)

Akhirnya melalui perjuangan panjang oleh masyarakat maupun Pemerintah Kabupaten Sorong yang dimulai dari tahun 2003 atau bahkan sebelumnya tahun 1998 dengan energi dan biaya sosial yang tidak sedikit, maka dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa tanggal 29 Oktober 2008 pukul 09-12. 00 WIB diadakan Sidang Paripurna dengan mendengarkan pendapat akhir dari 10 fraksi di DPR-RI dan Menteri Dalam Negeri mewakili pemerintah menyatakan menyetujui menetapkan dan mengesahkan 12 Rancangan Undang-undang tentang pembentukan Daerah Otonom Baru di seluruh Indonesia termasuk Kabupaten Tamberauw di Propinsi Papua Barat pada Nomor urut 11 menjadi Undang-undang. Dengan ketentuan bahwa peresmian dan pelantikan Pejabat Bupati paling lambat enam bulan setelah pengesahan undang-undang ini.

B. Letak Geografis dan Lokasi

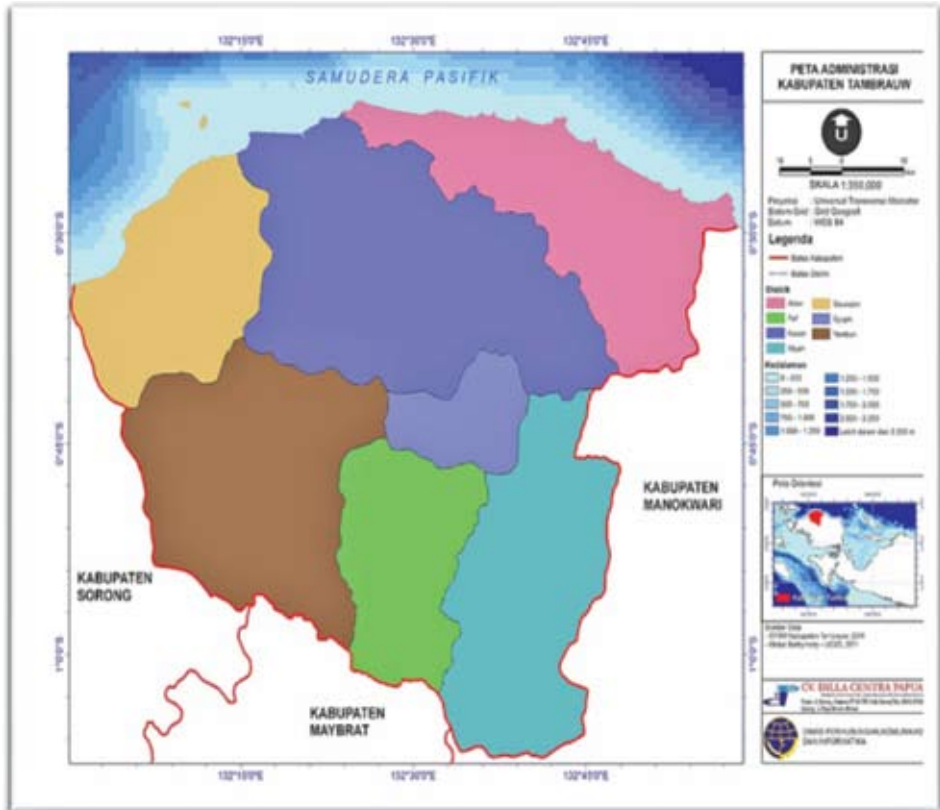
Sausapor terletak di Semenanjung Vogelkop di pantai utara Kepala Burung, Semenanjung Barat Laut Papua. Sausapor terletak 15 mil (24 km) di sebelah barat dari Cape of Good Hope, paling utara titik Nugini. Muara Sungai Wewe bermuara ke laut dekat Sausapor. Sausapor berada di sebelah selatan khatulistiwa. Sausapor adalah salah satu distrik dari wilayah administrasi Kabupaten Tambrauw. Kabupaten Tambrauw terletak di Kepala Burung bagian atas Pulau Papua. Dalam Undang-Undang No. 56 Tahun 2008, posisi geografis Kabupaten Tambrauw terletak pada $0^{\circ}15' \text{ LS} - 1^{\circ}00' \text{ LS}$ dan $132^{\circ}00' \text{ BT} - 133^{\circ}00' \text{ BT}$. (<http://kabupatentambrauw.com/daftar-nama-kecamatan-kelurahan-desa-kodepos/>)

Kabupaten Tambrauw merupakan bagian dari wilayah Propinsi Papua Barat yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2008 Tanggal 26 Oktober 2008 dan diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia pada 15 April 2009. Saat peresmian Kabupaten Tambrauw, Menteri Dalam Negeri melantik penjabat bupati Kabupaten Tambrauw. Dalam perkembangannya Wilayah Kabupaten Tambrauw bertambah luas sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor PUU/127-8/2010 dengan penambahan 4 Distrik dari Kabupaten Manokwari dan 1 Distrik Dari Kabupaten Sorong (Profil Kabupaten Tambrauw, 2011; 4).

Luas wilayah Kabupaten Tambrauw adalah 7.302,39 Km², yang terdiri atas daratan seluas 5.190,67 Km² dan lautan seluas 2.111,72 Km² (Tambrauw dalam angka 2012;3). Sebagian besar daerah Kabupaten Tambrauw berada di ketinggian 100-500 meter dari permukaan laut yakni sebesar 48,65 persen dan 9,09 persen di atas ketinggian 1000 meter dari permukaan laut. (<http://www.tribunnews.com/2013/04/12/tidak-terjadi-kelaparan-di-kabupaten-tambrauw>)

Adapun batas administratif Kabupaten Tambrauw adalah sebagai berikut:

- Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Sorong.
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Manokwari.
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Sorong Selatan.
- Sebelah Utara : berbatasan dengan Samudera Pasifik.



Gambar 1. Peta Administrasi Kabupaten Tambrauw.

Sumber: <http://www.flickr.com/photos/kabupatentambrauw/8262389831/>

Letak geografis Kabupaten Tambrauw berdasarkan Undang-undang Nomor 56 Tahun 2008 yaitu pemisahan sebagian wilayah yang berasal dari wilayah Kabupaten Sorong (Kabupaten Induk). Wilayah Kabupaten Tambrauw mencakup 7 Distrik yaitu:

1. Distrik Yembun
2. Distrik Sausapor
3. Distrik Kwoor
4. Distrik Abun
5. Distrik Fef (Ibu Kota Kabupaten)
6. Distrik Miyah
7. Distrik Syujak



Gambar 2. Peta Kabupaten Tambrauw terbaru dengan jumlah distrik sebanyak 12 buah.
(Sumber: Presentasi Bupati Tambrauw Gabriel Asem, SE, pada acara Musrembang
UP4B, Pebruari 2012)

Letak geografis Kabupaten Tambrauw didasarkan atas Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 127/PUU-VII/2009. Berdasarkan keputusan tersebut, wilayah Kabupaten Tambrauw semakin luas, terutama setelah pemisahan sebagian wilayah yang berasal dari wilayah Kabupaten Sorong dan Kabupaten Manokwari, yang menjadi wilayah Kabupaten Tambrauw. Wilayah Kabupaten Tambrauw mencakup 12 Distrik sebagai berikut:

1. Distrik Yembun
2. Distrik Sausapor
3. Distrik Kwoor
4. Distrik Abun
5. Distrik Fef (Ibu Kota Kabupaten)
6. Distrik Miyah
7. Distrik Syujak
8. Distrik Moraid (Kab. Sorong)
9. Distrik Senopi (Kab. Manokwari)
10. Distrik Mumbrani (Kab. Manokwari)
11. Distrik Ambarbaken (Kab. Manokwari)
12. Distrik Kebar (Kab. Manokwari)

Distrik sausapor memiliki luas 1. 189,66 Km², yang terdiri atas 9 kampung yaitu:

1. Kampung Sausapor
2. Kampung Bikar
3. Kampung Werur
4. Kampung Werur Besar (Werbes)
5. Kampung Jokte
6. Kampung Emaus
7. Kampung Uigwem
8. Kampung Werwaf
9. Kampung Wertam

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tambrauw Nomor 20 Tahun 2009, Distrik Sausapor terutama Kompleks SD Inti ditetapkan sebagai Pusat Pemerintahan Sementara Kabupaten Tambrauw (*Profil Kabupaten Tambrauw 2011*). Penunjukan Distrik Sausapor sebagai Pusat Pemerintahan Sementara Kabupaten Tambrauw karena sarana dan prasarana Distrik Fef sebagai pusat ibukota Kabupaten Tambrauw belum memadai untuk mendukung pelaksanaan roda pemerintahan. Oleh karena itu, pem-

bangunan Distrik Fef sedang digiatkan baik melalui penerobosan isolasi daerah melalui pembangunan jalan maupun pembangunan perkantoran dan perumahan pegawai serta pembangunan sarana dan prasarana lainnya.

Pemerintah Kabupaten Tambrauw merencanakan pengembangan Distrik Sausapor sebagai pusat kegiatan niaga dalam arti pusat perdagangan di Kabupaten Tambrauw. Distrik Fef dikembangkan pemerintah Kabupaten Tambrauw sebagai pusat penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Tambrauw. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan dukungan distrik yang berada dipantai dan distrik berada digunung sebagai daerah penyangga bagi Kabupaten Tambrauw.

C. Topografi

Jika ditinjau secara makro, pada dasarnya kondisi topografi dan morfologi Kabupaten Tambrauw merupakan wilayah yang rata-rata memiliki ketinggian mulai dari 0-2. 500 meter di atas permukaan laut (dpl), dengan kemiringan antara 0 – 60 %. Secara mikro, untuk kawasan pesisir, rata-rata memiliki dataran rendah dan berawa dengan ketinggian 0 – 100 m dpl. Dataran rendah terdapat di wilayah bagian barat dan selatan (sekitar 25 % dari luas wilayah Kabupaten Tambrauw) dan morfologi bergelombang hingga pegunungan dengan ketinggian 100 – 2. 500 m dpl. yang terdapat di bagian utara dan timur (sekitar 60 % dari luas wilayah Kabupaten Tambrauw), sehingga bentuk permukaan di wilayah itu bergelombang hingga pegunungan.

Lahan di dua pulau kecil terluar, yaitu Pulau Dua dan Pulau Miossu sebagian besar adalah hutan pesisir. Kedua pulau itu tidak berpenghuni. Kedua pulau ini berpotensi untuk dijadikan destinasi wisata bahari. Wisata bahari dapat dikembangkan dengan mengandalkan panorama lautnya yang sangat indah, sehingga dapat dikembangkan sebagai lokasi *diving* dan *snorkling*. Di lautan kedua pulau itu terdapat terumbu karang. Selain pengembangan wisata bahari, kedua pulau itu juga

berpotensi sebagai lokasi wisata sejarah. Hal ini terkait dengan keberadaan peninggalan peralatan militer tentara Sekutu pada Perang Dunia II. Pulau Miossu telah ditetapkan sebagai salah satu pulau terdepan di Indonesia dan Kawasan Strategis Nasional Tertentu. Pulau ini berpotensi untuk dikembangkan sebagai salah satu destinasi wisata spiritual, yaitu dengan keberadaan Tugu Injil, yang menandakan telah diutusnya seorang penganjil ke wilayah itu pada 1913.

D. Iklim dan Curah Hujan

Sausapor memiliki beberapa zona yang meliputi hutan hujan, area taman, pantai, dan marjin hutan. Tiga belas mil ke timur laut dari permukiman adalah Pulau Mar dan pulau-pulau di lepas pantai yaitu: Pulau Miossoe, Pulau Middleburg dan Pulau Amsterdam. Daerah di sekitar desa itu berhutan lebat, dengan daerah perbukitan ke arah tenggara. Peregangan luas pantai di daerah ini dikenal sebagai "Green Beach". Masuk ke dermaga Sausapor adalah melalui lubang sempit di terumbu karang. Dasar laut, 40 kaki (12 m) dengan 50 kaki (15 m) di bawah permukaan air, terlihat dari atas. Curah hujan tahunan adalah sekitar 300 inci (7.600 mm) per tahun.

Iklim tropis lembab dan panas merupakan kondisi iklim yang ada di Kabupaten Tambrau pada umumnya. Berdasarkan data dari stasiun Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) Sorong, suhu udara maksimal Kabupaten Tambrau adalah 30,9°C dan suhu minimal 24,7°C. Kelembaban udara bervariasi antara 81 – 85 %.

Berdasarkan catatan tahun 2006, curah hujan rata-rata per bulan sebesar 195,4 mm dan banyaknya hari hujan rata-rata sebesar 13 hari. Hujan terbanyak terjadi pada bulan Januari, dengan jumlah hari hujan 27 hari. Intensitas penyinaran matahari rata-rata adalah 59,0 % dan tekanan udara antara 1.009,6 MB.

Dengan demikian, tekanan udara rata-rata Kabupaten Tambrau cenderung berada pada 1.009,6° dan penyinaran matahari dapat men-

capai 64,8%. Selain itu, kondisi curah hujan yang ada di Kabupaten Tambrauw rata-rata 211,4 mm per tahun (Bappeda Kabupaten Tambrauw, 2011: II2).

Arus yang ada di pesisir Kabupaten Tambrauw sangat dipengaruhi pergerakan massa air laut dari Samudera Pasifik yang tepat berada di sebelah utara pesisir Kabupaten Tambrauw. Pola arus permukaan pada bulan Februari (angin musim barat) bergerak dari arah Pasifik berbelok ke kanan sejajar dengan pesisir disepanjang daerah kepala burung Papua umumnya dan pesisir Kabupaten Tambrauw pada khususnya, yang bergerak terus sampai ke Pulau Biak terus sampai ke arah pesisir Jayapura. Hal ini berbeda dengan pola arus pada musim pancaroba (bulan April) sampai angin musim timur (bulan Agustus). Pada musim pancaroba, pola arus mulai berubah ke arah sebaliknya. Pola arus di utara Papua termasuk pesisir Kabupaten Tambrauw bergerak dari arah pesisir Jayapura terus menuju Pulau Biak kemudian menuju pesisir Kabupaten Tambrauw dan selanjutnya menuju utara ke arah Samudera Pasifik.

E. Penduduk

Penduduk Kabupaten Tambrauw berjumlah 2. 689 orang, yang terdiri atas laki-laki 1. 267 orang dan perempuan 1. 422 orang (tahun 2012). Sausapor adalah distrik yang terbanyak penduduknya, yaitu 4. 962 orang dari total penduduk Kabupaten Tambrauw. Wilayah yang paling sedikit jumlah penduduknya adalah Distrik Syujak dengan jumlah penduduk 207 orang (BPS Kabupaten Tambrauw 2012: 31-41).

Masyarakat Kabupaten Tambrauw merupakan masyarakat heterogen yang terdiri atas penduduk Papua ditambah dengan suku pendatang. Pada umumnya penduduk Sausapor terdiri atas penduduk asli Papua dan pendatang dari luar Papua. Penduduk asli Papua yang bermukim di Distrik Sausapor terdiri atas orang Biak dan penduduk setempat Distrik Sausapor. Pendatang dari luar Papua pada umumnya berasal dari Kepulauan Maluku, Sulawesi, Jawa, dan Sumatera.

F. Sistem Mata Pencaharian

Pada umumnya mata pencaharian masyarakat Kabupaten Tambrauw dan khususnya Distrik Sausapor adalah sebagai petani dan nelayan. Pekerjaan ini disesuaikan dengan kondisi geografis tempat masyarakat itu bermukim. Pada umumnya mata pencaharian utama dari masyarakat Kabupaten Tambrauw yang bermukim di daerah pegunungan adalah pertanian. Mata pencaharian dari masyarakat yang bermukim di pesisir pantai adalah nelayan dan petani.

Perkembangan pemekaran berbagai kabupaten di Papua dan Papua Barat, termasuk pemekaran Kabupaten Tambrauw melahirkan pekerja-pekerja baru yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil (PNS), pedagang, ojek, dan swasta lainnya. Dengan demikian, mata pencaharian penduduk Kabupaten Tambrauw menjadi beraneka ragam. Keaneragaman profesi masyarakat sangat jelas terlihat di Distrik Sausapor yang sementara ini masih menjadi ibu kota Kabupaten Tambrauw.

Mata pencaharian orang Karon (sekarang disebut suku Abun), menurut Djekky R. Djoht, (*jurnal antropologi*, vol. 1, No. 2, 2002) mengenal beberapa jenis pekerjaan yaitu *Sifting Cultivation*, menangkap ikan dan berburu-meramu. Kegiatan menangkap ikan merupakan mata pencarian sampingan karena tidak setiap saat penduduk mencari ikan di laut. Pekerjaan ini hanya dilakukan paruh waktu saja. Tehnik menangkap ikan yang sering dipergunakan adalah memancing di pinggiran pantai atau melaut dengan menggunakan perahu. Pada malam hari orang Karon juga melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan lampu petromaks untuk menarik ikan karena cahaya yang dipancarkan dari lampu tersebut. Hasil penangkapan ikan digunakan untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari dan sisanya dijual.

Kegiatan berburu juga merupakan mata pencarian sampingan karena dilakukan waktu senggang saja, ketika kegiatan perladangan pada tahap perawatan tanaman. Kegiatan berburu biasanya dilakukan bersamaan dengan meramu atau mengambil buah-buahan dan sayuran

yang dijumpai dalam perjalanan perburuan. Berburu dilakukan oleh dua sampai empat orang laki-laki yang terdiri atas anggota kerabat sendiri, tetapi lebih banyak dilakukan sendirian. Metode yang dipakai untuk menangkap binatang buruan adalah menggunakan anjing penggiring binatang buruan. Anjing-anjing ini akan mengejar binatang buruan sampai binatang tersebut lelah dan pemburu selalu mengikuti kemana anjing mengejar binatang tersebut dan membunuhnya. Metode lain menangkap binatang buruan adalah dengan metode perangkap. Orang Karon mengenal beberapa jenis perangkap binatang yaitu jerat tali, perangkap burung dan perangkap lubang. Jenis binatang yang diburu antara lain: babi hutan, kangguru pohon, laulau, kasuari dan berbagai macam burung.

Kegiatan perladangan dilakukan secara berpindah-pindah setelah dua sampai tiga kali panen, ladang ditinggalkan kemudian membuka ladang baru. Waktu yang diperlukan untuk mengerjakan ladang sampai panen, sebelum ditinggalkan tergantung pada keadaan tanah dan umur jenis tanaman. Jika tanah yang diolah sudah kurang subur untuk ditanami dan tanaman sudah panen, maka ladang akan ditinggalkan dan akan dibuka ladang baru. Pada umumnya, ladang diolah satu sampai dua tahun kemudian ditinggalkan. Sebelum suatu ladang ditinggalkan, biasanya ditanam tanaman sukun dan mangga sebagai tanda kepemilikan. Tanda kepemilikan itu sangat perlu karena setelah beberapa tahun kemudian mereka akan kembali untuk membuka ladang di tempattersebut. Proses pembukaan ladang dilakukan dengan membersihkan semak-semak dan menebang pohon-pohon besar. Setelah beberapa minggu, dibakar pohon-pohon yang telah ditebang. Hasil pembakaran dibiarkan selama beberapa hari sebagai penyubur tanah, kemudian ladang dibersihkan. Pekerjaan tersebut dilakukan oleh kaum laki-laki. Para wanita bertugas mencari bibit tanaman, menanam bibit, membersihkan, dan merawat tanaman. Memanen hasil ladang biasanya dilakukan bersama. Jenis Tanaman yang ditanam diladang adalah pisang, singkong, tebu, sayur lili, gedi, ubu jalar, keladi, pepaya, tembakau dan labu.

Mata pencaharian orang Abun, sama dengan orang Moi. Perbedaan keduanya terdapat pada konsep mata pencaharian sebagai petani. Dalam konsep berpikir, soal nafkah hidup lebih mengandalkan dusun sagu milik keluarga, sehingga tanaman seperti ubi dan sebagainya hanyalah tanaman untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Bagi orang Bikar (*Biak Karon*), profesi nelayan merupakan pekerjaan utama, sedangkan pertanian hanya pekerjaan sampingan untuk kebutuhan keluarga saja. Profesi lain yang sekarang sudah menjadi profesi utama yang banyak dilakukan oleh orang Abun, Moi, Miyah Iরের, dan Bikar adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil.

G. Sarana dan Prasarana

Sebagai daerah pemekaran baru, pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur merupakan program pembangunan utama, selain pembangunan SDM dan ekonomi. Beberapa sarana dan prasarana infrastruktur yang telah dibangun oleh pemerintah Kabupaten Tambrauw masih terfokus di Distrik Sausapor. Hal ini karena Distrik Sausapor untuk sementara digunakan sebagai Ibukota Kabupaten Tambrauw. Ibukota defenitif Kabupaten Tambrauw yang sebenarnya berlokasi di Distrik Fef. Saat ini pemerintah Kabupaten Tambrauw sedang mempersiapkan berbagai fasilitas pendukung pemerintahan seperti pembangunan perkantoran, perumahan, jalan, jembatan, air bersih, listrik dan sebagainya.

Status Sausapor adalah satu distrik, akan tetapi untuk sementara waktu digunakan sebagai pusat ibukota Kabupaten Tambrauw, sehingga banyak sekali dibangun sarana dan prasarana infrastruktur seperti: Kantor Bupati, Mes Pendidikan dan Parawisata, Mes Pemda, puskesmas dan rumah kesehatan, Kantor Distrik dan perumahannya, Kantor Perhubungan, Perumahan Polisi, Perumahan TNI, sekolah, jalan, jembatan, dan landasan pesawat terbang di Werur.

a. Sarana Pendidikan

Sarana pendidikan di Distrik Sausapor terdiri atas TK, SD, SMP dan SMA seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Jumlah dan Sebaran Sarana Pendidikan Wilayah Distrik Sausapor Kabupaten Tambrauw Tahun 2013

No	Distrik	Jumlah Sarana (Unit)			
		TK	SD	SMP	SMA/SMK
1	Sausapor	2	5	2	1

Sumber : BPS Kab. Tambrauw, 2012.

Sarana pendidikan Taman kanak-kanak terdiri atas dua sekolah yang keduanya terdapat di Kampung Sausapor. Jumlah sarana pendidikan di Distrik Sausapor sebanyak 10 sekolah terdiri atas 2 TK, 5 SD, 2 SMP dan 1 SMA/SMK. Untuk bangunan Sekolah Dasar terdapat di beberapa kampung yang ada di distrik Sausapor antara lain di kampung Sausapor dan Kampung Werur, sedangkan untuk bangunan sekolah TK, SMP dan SMA/SMK, hanya terdapat di Kampung Sausapor.



Gambar 3: Taman Kanak-kanak Maranata
Sumber : Tim Sausapor BPNB Jayapura



Gambar 4. Sekolah Dasar yang terdapat di Sausapor
Sumber : Tim Sausapor BPNB Jayapura



Gambar 5. Sekolah SMP Negeri I dan SMA Negeri I Sausapor
Sumber : Tim Sausapor BPNB Jayapura

b. Sarana Kesehatan

Pembangunan sarana kesehatan merupakan salah satu faktor penting yang menentukan kualitas derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Tambrau. Ketersediaan sarana kesehatan yang ada di Sausapor saat ini masih sangat minim, sehingga tingkat pelayanan kesehatan juga cenderung masih kurang. Pelayanan kesehatan dilakukan mulai dari puskesmas. Puskesmas terdapat di Kampung Sausapor, sedangkan Pustu (Puskesmas Pembantu) terdapat di Kampung Werur.



Gambar 6: Puskesmas di Kampung Sausapor
Sumber : Tim Sausapor BPNB Jayapura

c. Sarana Peribadatan

Masyarakat Tambrau mayoritas menganut agama Kristen. Oleh karena itu, jumlah sarana peribadatan di Kabupaten Tambrau saat ini didominasi oleh gereja dengan jumlah 28 buah, yang tersebar merata di setiap distrik. Selain umat Kristen, di wilayah itu terdapat juga umat Muslim. Penduduk Sausapor yang menganut Agama Islam membangun 1 buah mesjid di Distrik Sausapor. Penduduk yang menganut Agama

Kristen di Distrik Sausapor membangun 7 buah gereja. Dengan demikian, jumlah sarana peribadatan yang terdapat di Distrik Sausapor sebagai berikut:

Tabel 2. Jumlah Sarana Peribadatan Kabupaten Tambrauw Distrik Sausapor Tahun 2013

No	Distrik	Sarana Peribadatan			
		Mesjid	Gereja	Vihara	Pura
1	Sausapor	1	7	0	0
2	Kwoor	-	9	0	0
3	Abun	-	1	0	0
Total		1	17	0	0

Sumber : Hasil Quisioner Tahun 2009

Sarana peribadatan di distrik Sausapor berjumlah 8 buah, terdiri atas 1 buah bangunan masjid dan 7 buah bangunan gedung gereja. Masjid hanya terdapat di kampung sausapor, sedangkan gedung gereja terdapat di setiap kampung yang ada di distrik Sausapor.

d. Sarana Perdagangan dan Jasa

Sarana perdagangan di Kabupaten Tambrauw terdiri atas pasar tradisional serta warung dan pertokoan yang tersebar di setiap distrik yang terdapat di Kabupaten Tambrauw. Saat ini, Distrik Sausapor dijadikan ibukota sementara Kabupaten Tambrauw, sehingga aktifitas perdagangan dan jasa lebih banyak terdapat di Sausapor, seperti pasar tradisional. Pasar tradisional di Sausapor merupakan satu-satunya pasar di Kabupaten Tambrauw yang melayani kebutuhan penduduk seluruh distrik yang ada di Kabupaten Tambrauw.

e. Sarana Perkantoran

Fasilitas sarana perkantoran khususnya untuk pelayanan umum yang ada di Sausapor Kabupaten Tambrauw meliputi: Perkantoran

Pemerintah (Dinas-dinas), Kantor Bupati Sementara, Kantor Distrik Sausapor, Kantor Perhubungan, Kantor Kepala kampung, Kantor Polsek, kantor Polres dan Kantor Koramil.



Gambar 7 : Kantor Bupati Kabupaten Tamrau
Sumber : Tim Sausapor BPNB Jayapura



Gambar 8. Pusat perkantoran Dinas-Dinas Pemerintahan Kabupaten Tamrau
Sumber : Tim Sausapor BPNB Jayapura



Gambar 9. Kantor Distrik Sausapor dan Kantor Perhubungan di Sausapor
Sumber : Tim Sausapor BPNB Jayapura



Gambar 10. KODIM Sausapor
Sumber : Tim Sausapo BPNB Jayapura

f. Sarana Air Bersih, Prasarana Listrik

1. Air Bersih

Sumber air bersih bagi penduduk Kabupaten Tambrauw khususnya wilayah pesisir antara lain di Distrik Sausapor masih bersumber dari air bersih non-perpipaan yaitu dengan memanfaatkan air sumur (air tanah), sungai, dan air hujan.

2. Listrik

Listrik di Kabupaten Tambrauw, termasuk juga di Distrik Sausapor, masih belum memadai karena belum sepenuhnya mampu melayani kebutuhan masyarakat. Listrik hanya beroperasi di Distrik Sausapor, tetapi tidak maksimal karena hanya menyala mulai pukul 19.00 malam hingga pukul 23.00 malam setiap harinya. Oleh karena itu, aparat Pemerintah Daerah dan pihak swasta lainnya menggunakan genset untuk mendukung kinerja.

g. Sarana Jalan/Jembatan, Perhubungan Udara dan darat

1. Pembangunan Jalan dan Jembatan

Pembangunan prasarana jalan dan jembatan sedang dilaksanakan sekarang ini. Untuk tahun anggaran 2010, Dinas Pekerjaan Umum telah membangun ruas jalan sepanjang 73,80 km tersebar di pantai utara dan pedalaman yang menembus hampir semua distrik yang ada di Kabupaten Tambrauw. Untuk tahun 2011, direncanakan akan di bangun ruas jalan sepanjang 81 km dan sekarang masuk dalam tahap perencanaan dalam RKA tahun 2011 (Profil Kab. Tambrauw 2011). Adapun ruas jalan yang sudah dikerjakan antara lain Dinas Pekerjaan Umum di Kabupaten Tambrauw sebagai berikut:

1. Pembangunan jalan Fef-Mega
2. Pembangunan Jalan Hopmare-Kwoor
3. Pembangunan Jalan Fef-Miyah

4. Pembangunan Jalan Kwoor-Saubeba
5. Normalisasi aliran sungai Warabiai
6. Pembangunan Jalan Werur-Sausapor



Gambar 11. Kondisi Jalan dari Sorong menuju Sausapor
Sumber : Tim Sausapo BPNB Jayapura

Beberapa jembatan pada jalur jalan trans propinsi dari Sorong menuju Sausapor hampir rampung dan dapat digunakan. Namun, beberapa jembatan di Distrik Sausapor belum dapat digunakan karena pembangunannya barulah pembuatan fondasi jembatan. Belum dibangun tulang penghubung antara fondasi pada sisi yang satu dengan fondasi pada sisi yang lain. Masyarakat masih menggunakan jembatan darurat yang dibangun dengan menggunakan batang pohon yang di atasnya dilapisi sirtu (pasir batu). Ada juga alat transportasi lain berupa rakit yang dapat digunakan untuk menyeberangkan motor dan orang sekaligus dari Sausapor menuju Werur dan kampung-kampung di sekitarnya.



Gambar 12. Jembatan Kayu yang menghubungkan Sausapor –Werur
Sumber : Tim Sausapo BPNB Jayapura



Gambar 13. Rakit sebagai Pengganti Jembatan untuk menyeberangkan Motor dan orang
Sumber : Tim Sausapo BPNB Jayapura

2. *Sarana Angkutan Udara*

Kabupaten Tambrau memiliki 4 buah landasan pesawat terbang antara lain di Fef dan di Distrik Sausapor. Landasan pesawat terbang di Fef merupakan milik Yayasan Associated Mission Aviation (AMA), yang melayani route penerbangan Sorong – Fef pulang pergi (PP). Jenis pesawat yang digunakan adalah jenis pesawat Twin Otter, yang berkapasitas penumpang sebanyak 9 orang. Base Camp pesawat AMA berada di Manokwari. Jadwal penerbangan pesawat tersebut tidak menentu, karena disesuaikan dengan kebutuhan yayasan. Tiga bandara lainnya berada di Distrik Sausapor, yang terdapat di Werur. Bandara udara Werur merupakan peninggalan Perang Dunia II. Bandara udara itu memiliki 3 landasan pacu, yang masing-masing landasan mempunyai panjang 3,1 km. Dahulu lapangan ini digunakan untuk kegiatan militer Sekutu. Pada saat ini pemerintah Kabupaten Tambrau berupaya untuk mengembangkan bandara tersebut yang nantinya sesuai dengan program kegiatan pariwisata dapat mendatangkan turis dalam rangka napak tilas Perang Dunia II di Kabupaten Tambrau.



Gambar 14. Landasan Pesawat terbang yang berada di Werur
Sumber : Tim Sausapo BPNB Jayapura

3. *Sarana Angkutan Laut*

Kabupaten Tambrau mempunyai satu pelabuhan laut yang terletak di Sausapor. Pelabuhan itu dibangun pada 1996 dengan konstruksi beton. Hingga saat ini pelabuhan tersebut masih berfungsi dengan baik dan disinggahi kapal – kapal berbobot 500GT – 750GT. Jumlah kapal yang melayani route pelayaran Sorong – Sausapor sebanyak 3 (tiga) unit kapal, satu dari tiga kapal tersebut merupakan milik Pemerintah Propinsi Papua Barat, dua kapal lainnya merupakan milik swasta. Jadwal pelayaran kapal-kapal tersebut dari dan ke Sausapor satu kali dalam seminggu.



Gambar 15. Pelabuhan Sausapor
Sumber : Tim Sausapo BPNB Jayapura



Gambar 16. Longbot, salah satu angkutan laut yang digunakan masyarakat sebagai sarana transportasi.

Sumber : Tim Sausapo BPNB Jayapura

4. *Sarana Angkutan darat*

Sausapor sebagai ibukota sementara Kabupaten Tambrau, belum memiliki sarana angkutan umum seperti angkutan kota dan angkutan pedesaan, sehingga aktivitas masyarakat setiap hari pada umumnya masih berjalan kaki. Sementara kendaraan yang ada saat ini di Sausapor baik roda empat maupun roda dua adalah milik pemerintah (kendaraan dinas), milik pribadi maupun swasta yang tidak bisa digunakan sebagai sarana angkutan umum.

Mobil yang digunakan sebagai angkutan dari Sorong menuju Sausapor dan sebaliknya hanyalah jenis mobil Hilux dan Fort. Kedua jenis mobil tersebut saja yang mampu melintasi jalan dari Sorong menuju Sausapor dan sebaliknya karena kondisi jalan yang masih sangat rawan dan masih dilakukan pengerjaan jalan.



Gambar 17. Kendaraan roda empat jenis Hilux yang digunakan untuk transportasi darat dari Sorong ke Sausapor.

Sumber : Tim Sausapo BPNB Jayapura

Sarana angkutan darat yang digunakan untuk menghubungkan satu kampung dengan kampung lainnya di Kabupaten Tambrauw, dari distrik ke ibukota Kabupaten Tambrauw sementara (Sausapor) dan sebaliknyahanyalah ojek. Penduduk setempat menggunakan jasa ojek sebagai sarana angkutan darat. Penduduk setempat terpaksa membayar mahal ongkos ojek karena tidak tersedia angkutan darat lainnya. Mahalnya ongkos ojek ini dapat diketahui dari harga yang harus dibayar untuk jarak yang tidak terlalu jauh, misalnya ongkos ojek dari Sausapor ke Werur adalah Rp. 150. 000,-. Padahal jarak antara Sausapor dan Werur lebih kurang 30 Km. Mahalnya ongkos ojek di Sausapor dan sekitarnya juga dipengaruhi oleh mahalnya harga bahan bakar minyak (BBM) di wilayah itu. Misalnya, saat harga bensin di Jayapura Rp. 4. 500,- per liter, di Sausapor harga bensin sudah mencapai Rp. 10. 000,- per liter.



Gambar 18. Transportasi ojek, satu-satunya transportasi yang digunakan oleh masyarakat sebagai pengganti angkutan umum yang tidak ada di Sausapor.
Sumber : Tim Sausapo BPNB Jayapura

5. *Prasarana Telekomunikasi*

Pemerintah Daerah Kabupaten Tambrauw berupaya untuk membangun prasarana telekomunikasi di wilayahnya. Hal ini terbukti pada Tahun Anggaran 2010 Pemerintah Daerah Kabupaten Tambrauw telah membangun satu unit bangunan BTS CDMA di Sausapor. Namun, sekarang (tahun 2013) BTS tower CDMA tersebut belum dapat diope-
rasikan dengan baik karena kerusakan teknis. Saat ini, Pemda Kabupaten Tambrauw sudah melakukan MOU dengan PT. TELKOMSEL dan dalam waktu dekat Telkomsel akan memasang BTS di Distrik Sausapor. Kehadiran operator Telkomsel diharapkan dapat menunjang peningkatan berbagai sendi kehidupan masyarakat di Kabupaten Tambrauw.

H. Sistem Religi

Penduduk di Pegunungan Tambrauw pada umumnya sudah menganut agama monoteisme. Berdasarkan data penduduk dapat diketahui bahwa agama yang dianut oleh penduduk di wilayah itu adalah Kristen Protestan, Kristen Katolik, dan Islam. Penduduk di wilayah itu mayoritas menganut agama Kristen. Menurut Djekky R. Djoht (Jurnal Antropologi Uncen, 2000), Orang Karon pada saat ini umumnya sudah beragama Kristen. Akan tetapi, banyak juga dari mereka masih memakai unsur-unsur kepercayaan dari religi mereka yang asli. Kepercayaan mereka yang terpenting adalah kepercayaan kepada roh-roh yang menempati pohon besar, batu, goa dan gunung. Dengan kata lain, mereka percaya pada roh-roh yang ada disekitar tempat tinggalnya. Roh-roh ini disebut *gui* yaitu roh orang mati dan *dugui* roh makhluk halus yang bukan berasal dari roh manusia tetapi sebelumnya memang sudah ada. Lebih lanjut dikatakan bahwa orang Karon percaya ada sesuatu kekuatan yang membuat manusia bisa bergerak dan hidup. Kekuatan itu oleh orang Karon disebut *gen*. *Gen* menurut orang Karon bersifat abadi, artinya tidak dapat musnah atau mati. Jika manusia mati *gen* ini terlepas dari tubuh dan menjadi burung darat yang terbang kian kemari di hutan dan lambat laun menjadi *gui*. Itulah sebabnya orang Karon sangat menghormati dan menganggap burung ndarat sakral, sehingga tidak boleh membunuh atau mengucapkan kata-kata kotor pada burung tersebut. Sebab, mereka percaya akan fatal akibatnya apabila burung darat dibunuh. Misalnya, orang yang membunuh burung itu akan sakit dan penyakitnya tidak dapat disembuhkan atau akan terjadi suatu musibah pada dirinya.

Orang Karon percaya bahwa *gui* dapat berbuat baik dan berbuat jahat pada manusia. Itulah sebabnya, untuk menjaga hubungan baik dengan *gui* orang Karon selalu memperhatikan kebersihan dan memberi penerangan setiap malam pada kuburan orang mati. Menurut mereka kalau kuburan itu bersih dan tidak gelap maka *gui* akan senang, sehingga

tidak mengganggu manusia yang masih hidup, melainkan akan membantu mereka. Orang Karon mengenal bermacam-macam bentuk roh makhluk halus, yang masing-masing mempunyai namanya sendiri.

BAB III

HUBUNGAN WILAYAH VOGELKOP (KEPALA BURUNG) DENGAN DUNIA LUAR

A. Kontak Penduduk Vogelkop dengan Nusantara

Pada abad ke-16 sultan-sultan Maluku telah menanamkan pengaruhnya di wilayah barat Pulau Nieuw Guinea yaitu di Kepulauan Raja Ampat yang meliputi Pulau Waigeo, Salawati, Misool, dan Waigama. Raja Waigama dan Raja Misool dibawah kekuasaan sultan Bacan, sedangkan Pulau Waigeo dan Pulau Salawati menjadi rebutan sultan Tidore dan sultan Ternate. Persaingan di antara kedua kesultanan itu berdampak pada upaya perluasan daerah kekuasaan kedua kesultanan tersebut. Sultan Ternate melebarkan kekuasaannya ke Sulawesi dan pulau-pulau di sebelah barat Halmahera. Kesultanan Tidore melebarkan kekuasaannya hingga ke Seram Timur, Nieuw Guinea bagian barat dan semua pulau di antara Nieuw Guinea dan Halmahera (Muridan S. Widjojo, 2009: 95-113).

Kepulauan Raja Ampat merupakan mata rantai penting dalam pelayaran niaga antara Kesultanan Tidore dan Papua. Salah satu sumber daya alam wilayah Raja Ampat adalah sagu. Penduduk Tidore yang kekurangan sagu mendatangkannya dari kepulauan itu. Produk-produk lainnya yang membuat daerah ini dianggap penting secara ekonomi adalah hasil lautnya seperti teripang dan penyu. Tingginya permintaan atas teripang dan penyu menyebabkan Kepulauan Raja Ampat sering dikunjungi oleh para pedagang dari Seram Timur, Tidore, dan Ternate. Selain para pedagang tersebut, para pedagang dan nelayan dari Sulawesi

Selatan banyak yang datang untuk mencari teripang yang kemudian dijual kepada para pedagang Cina (Leirissa, 1996: 32).

Para pedagang yang mendatangi Kepulauan Raja Ampat melakukan barter dengan penduduk lokal di wilayah itu. Barang dagangan yang dipertukarkan adalah gelang besi putih, aneka piring dan guci dari porselin, dan kain timur yang ditukar dengan teripang, penyu, dan sugu. Para pedagang itu biasanya menetap untuk sementara waktu di lokasi dagang mereka dan menunggu sampai barang dagangannya habis terjual atau menunggu angin musim. Selama tinggal di wilayah Kepulauan Raja Ampat, kadang kala ada juga di antara para pedagang tersebut yang menikah dengan penduduk setempat. Perkawinan campur itu melahirkan anak-anak yang tidak memiliki tipe khusus seperti umumnya penduduk asli Papua, yang berambut keriting dan kulitnya hitam. Perkawinan campur tersebut melahirkan anak-anak yang kulitnya agak terang dan berambut ikal atau bahkan lurus. Perkawinan campur tersebut juga menyebabkan banyak dari penduduk setempat yang menganut agama Islam (Stibbe, 1919: 35).

Interaksi antara Tidore dengan Kepulauan Raja Ampat dan daerah Teluk Mac Cluer menyebabkan diadopsinya lembaga-lembaga politik dari Tidore seperti gelar *kalana* atau raja, *korano*, *jojau*, *kapitan*, *suruan*, *sangaji*, dan *jimala*. Di daerah Kepulauan Raja Ampat ditemukan empat pulau yang masing-masing dikepalai seorang raja yaitu Raja Waigeo, Raja Salawati, Raja Waigama, dan Raja Misool. Di Teluk Mac Cluer ditemukan daerah-raja-raja seperti Raja Rumbati, Raja Patipi, dan Raja Ati-Ati. Para raja tersebut menjadi perantra dalam menerima pajak dari penduduknya dan menyetor pajak tersebut kepada sultan Tidore serta mengawasi penyetoran upeti lainnya. (Clercq, 1893: 156-157).

Pengaruh Kesultanan Tidore di Pulau Biak dan Numfor berlangsung melalui hubungan Tidore dengan Raja Ampat. Dalam kontak tersebut, Kesultanan Tidore mewajibkan orang-orang Biak dan Numfor memberikan hasil-hasil bumi seperti getah damar, kulit masoi, burung cenderawasih, dan kulit penyu kepada Kesultanan Tidore. Sebagai balasan atas

pemberian para penguasa lokal orang-orang Biak dan Numfor, sultan Tidore menganugerahkan gelar-gelar yang menunjukkan kedudukannya di dalam masyarakat. Gelar-gelar yang diberikan Sultan Tidore sampai sekarang masih digunakan sebagai nama fam/keret seperti: kapitarau (kapitan laut), kapisa (kapitan), mayor, sanadi (sangaji), suruan (suruhan), dan urbasa (juru bahasa).

Terjadinya kontak antara daerah Sausapor dengan dunia luar, tidak terlepas dari pengaruh kesultanan Tidore yang sangat kuat di Papua. Sultan Tidore mengangkat kepala-kepala yang sebenarnya lebih tepat dikatakan perantara dari pada penguasa, dan ia mengharuskan untuk membayar upeti tahunan berupa kulit penyubur, burung cendrawasih dan budak belian (Kamma, 1981:61) Bila masyarakat tidak menghiraukannya, maka pasukan honggi Tidore akan bertindak dan tidak segan-segan membunuh penduduk. Kondisi ini menyebabkan banyak kelompok marga yang kemudian mengungsi ke daerah lain, seperti penduduk Biak Numfor yang berpindah dan menetap di Sausapor hingga sekarang.

Pada masa lampau, dataran sepanjang pesisir Sausapor dan pulau dua (Amsterdam dan Midelburg) masih kosong. Penduduk asli (Abun) berdiam di Saryof, sedangkan penduduk asli lainnya seperti orang Moi masih berada di pegunungan. Karena itu, untuk mendapatkan upeti dari penduduk asli, sultan Tidore menempatkan seorang Sangaji di pesisir pantai. Sangaji bertugas mengumpulkan hasil-hasil bumi penduduk seperti kulit kerang, burung kuning, *bia*, *lola*, damar dan sebagainya untuk kemudian diserahkan kepada utusan Sultan Tidore di Samate Raja Ampat.

Sekitar tahun 1600 M, kelompok orang Biak Numfor bermarga Mayor dan Marga Dimara tiba di Pulau Dua. Kemudian mereka menetap di pulau itu. Kelompok orang Biak Numfor selanjutnya yang datang ke Sausapor adalah kelompok masyarakat *Mar* yang tiba di Werabyai/Werabiay/Mar (lihat peta Vogelkop Operation). Kelompok masyarakat Mar terdiri atas marga *Warsa*, *Rumansara*, *Sarwa* dan *Aduk*. Sekitar tahun 1700, kembali Pulau Dua didatangi kelompok masyarakat yang

disebut masyarakat *Mamoribo*. Mereka terdiri atas marga *Mambrasar*, *Mayor*, *Mirino* dan *Yapen* (Wawancara dengan Bapak Agus Mofu, Sausapor 23 Mei 2013). Ketika mereka tiba di Pulau Dua, mereka belum beragama hingga awal abad 20.

Kehadiran para penguasa Belanda di perairan Maluku juga dirasakan oleh penduduk pribumi Irian dengan adanya armada-armada hongi yang dikerahkan oleh sultan Tidore untuk memungut pajak dari penduduk pribumi di beberapa daerah pantai Irian. Sebagian dari pajak berbentuk hasil hutan ini digunakan oleh Sultan Tidore sebagai bahan dagangan yang dijual kepada orang asing (Bachtiar dalam Koentjaraningrat dkk, Irian Jaya membangun masyarakat majemuk, hal. 47).

B. Struktur Pemerintahan Kesultanan Tidore di Nieuw Guineabagian Barat

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa sebelum penegakan pemerintahan kolonial Belanda di Nederland Nieuw Guinea, penduduk dan wilayah Nederland Nieuw Guinea ditempatkan di bawah kekuasaan Sultan Tidore. Sultan merupakan pemegang kekuasaan tertinggi. Di bawah sultan terdapat tiga pembesar negeri terpenting yaitu, pertama, *kapitan laut* yang menangani urusan luar negeri, urusan kelautan dan pertahanan; kedua, *jogugu* yang menangani urusan dalam negeri; ketiga, hukum. Menurut Coolhas¹ jabatan hukum tidak diketahui dengan pasti apakah dia itu pajabat bidang hukum (kalau benar demikian, maka istilah ini ada hubungannya dengan istilah Arab hakim dan hukum), ataukah dia itu penguasa beberapa distrik luar tertentu (kalau benar demikian, maka istilahnya seharusnya ukun) (Wal, 2001: 84-5).

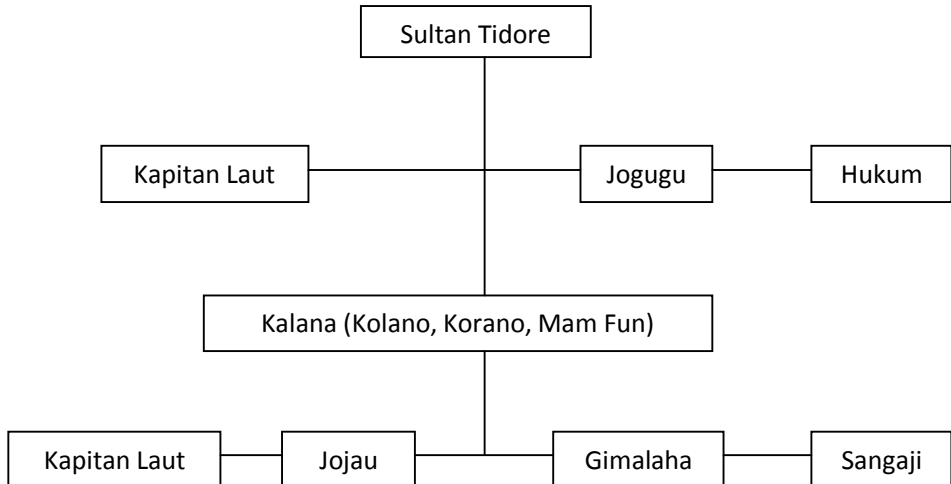
Di Kepulauan Raja Ampat (Waigeo, Salawati, Misool dan Waigama) dan empat kampung (Rumbarpon, Rumbarpur, Rumansarai dan

1 Pada 1921 W. Ph. Coolhaas diangkat menjadi calon kontrolir dan ditugaskan di Tidore sebagai pejabat sementara (Wal, 2001: 79).

Angkaradifu atau Anggradifu, Sultan Tidore mengangkat para tetua atau kepala adat penduduk itu sebagai perantara untuk mengumpulkan pajak dan upeti lainnya dari penduduknya dan menyetorkannya kepada Sultan Tidore. Sebagai balas jasanya para kepala adat itu diberi gelar raja (*kalana*). Istilah *kalana* merupakan pengaburan lokal dari istilah *kolano* yang digunakan di Maluku, yang berarti raja. Semakin ke timur ditemukan kata *kalano* berubah menjadi *korano*, karena banyak orang Papua tidak bisa mengucapkan huruf l (Clercq, 1893: 164-5). Penduduk sembilan negori (Omka atau Amka, Wakare, Wardo, Usba, Beser, Warfandu, Mansemer, Mar dan Warsai) ditempatkan di bawah seorang raja (*kalana*) yang diangkat oleh Sultan Tidore. Penduduk sembilan negeri menyebut rajanya dengan gelar *Mam Fun*. Penduduk yang bermukim di pantai Nieuw Guinea tunduk kepada para kepala adatnya dengan gelar Tidore yaitu Kapitan Laut, Jojau, Gimalaha dan Sangaji. Para kepala adat itu diangkat oleh raja. Kekuasaan para kepala adat itu sangat terbatas. Sementara orang Papua yang bermukim di pedalaman mengakui para tetua keluarga sebagai atasannya, namun tidak perlu selalu tunduk kepada keputusannya (Clercq, 1893: 174-5).

Secara skematis struktur pemerintahan Kesultanan Tidore di Nieuw Guinea bagian barat pada masa sebelum adanya pemerintahan kolonial sebagai berikut:

STRUKTUR PEMERINTAHAN KESULTANAN TIDORE DI NIEUW GUINEA BAGIAN BARAT



Gambar 19. Struktur Pemerintahan Kesultanan Tidore di Nieuw Guinea Bagian Barat (telah diolah kembali dari Wal, 2001: 84-5 ; Clercq, 1893: 164-5 dan 174-5)

Di Sausapor dan sekitarnya Sultan Tidore juga menempatkan wakilnya. Kesultanan Tidore menempatkan seorang sangaji di wilayah itu. Misalnya di Kampung Mega yang merupakan salah satu kampung di Distrik Sausapor masih ditemukan keturunan sangaji yang ditugaskan oleh Kesultanan Tidore yaitu keturunan keluarga Baharuddin Sangaji (wawancara dengan Agus Malak di Kampung Mega pada 22 Mei 2013).

C. Kontak dengan Orang-orang Eropa

Berdasarkan dokumen tertulis, orang Eropa pertama yang melihat Netherland Nieuw Guinea adalah orang Portugis yang bernama D'Abreu dan Serrano pada 1511, sedangkan orang pertama yang menginjakkan kakinya di atas bumi Pulau Nieuw Guinea adalah gubernur Portugis yang bernama De Menezes. De Menezes terdampar di Versiya (Warsa), suatu tempat di Kepala Burung ketika melakukan pelayaran dari Malaka

ke Maluku pada 1526. Meskipun para penjelajah berkebangsaan Portugis tersebut telah melihat dan menginjakkan kakinya di Pulau Nieuw Guinea, mereka tidak mengetahui nama pulau itu. Orang pertama yang menyebut nama penduduk dan daerah tersebut untuk pertama kalinya dalam laporan tertulis adalah seorang pelaut Portugis yang bernama Figafetta yang mengikuti Magelhaens dalam perjalanannya mengelilingi dunia, dan berada di sekitar Maluku pada 1521. Dalam laporannya disebutkan bahwa orang-orang kafir di Pulau Gilolo (sekarang Halmahera) berkuasa seorang raja Papua (Mansoben, 1995: 70).

Orang Eropa berikutnya yang mengunjungi Pulau Nieuw Guinea adalah seorang pelaut Spanyol yang bernama Ortiz de Retes yang tiba pada 20 Juni 1545 di tepi Sungai Ambermo (Sungai Mamberamo) yang terletak di pantai Utara Pulau Nieuw Guinea. Pada saat itu ia menamakan pulau itu Nueva Guinea dan menyatakan daerah itu milik raja Spanyol. Ketika Ortiz memberi nama pulau itu, dia teringat akan Guinea tua di Afrika karena penduduk Pulau Nieuw Guinea mempunyai kesamaan ciri-ciri fisik dengan penduduk Guinea di Afrika Barat yaitu warna kulitnya yang hitam dan rambutnya yang keriting (Mansoben, 1995: 70).

Hingga abad ke-17 pemerintah Belanda melalui VOC menjalankan politik non-intervensi atas wilayah Nieuw Guinea. VOC sangat memahami bahwa politik non-intervensi dilaksanakan sedapat mungkin. VOC menduga politik non-intervensi dapat dilaksanakan melalui perantaraan Tidore. Tidak dapat dipungkiri bahwa kebijakan VOC itu sepenuhnya sesuai dengan kondisi yang ada saat itu. Pada abad ke-18 VOC mengubah kebijakannya atas Nieuw Guinea. Perubahan kebijakan VOC itu berkaitan dengan adanya rencana dari 160 orang pedagang Inggris pada 1700 untuk mengirimkan kapal-kapalnya yang bertujuan untuk membeli rempah-rempah. VOC memandang perlu untuk memantau Nieuw Guinea apakah di daerah itu masih ditemukan pohon-pohon rempah-rempah. Meskipun pembabatan pohon-pohon rempah di berbagai tempat di Nieuw Guinea telah dilaksanakan oleh Tidore, pohon-pohon rempah itu masih terus tumbuh, bahkan penanaman gelap

ditemukan di Pulau Pisang dan Salawati. Oleh karena itu, pada 1705 VOC mengirim Jacob Weyland dengan membawa tiga buah kapal yaitu *Geelvink*, *de Kraanvogel* dan *Nova Guinea* untuk menjelajahi pantai pulau Nieuw Guinea. Dalam penjelajahannya itu, Weyland menemukan sebuah pulau yang dinamakannya Manansawari Branderseiland kepada sebuah pulau di Teluk Doreh yang kemudian dikenal dengan Pulau Mansinam. Weyland juga menamakan Geelvinkbaai (sekarang Teluk Cenderawasih) kepada sebuah teluk besar yang dahulu bernama Teluk Swandirbu. Dari hasil pelayaran itu diketahui bahwa tidak ada jenis rempah yang baik ditemukan di Nieuw Guinea Utara. Selain itu, berdasarkan hasil pelayaran itu diketahui bahwa Sultan Tidore tampaknya memiliki pengaruh atas wilayah itu (*Mededeelingen*, 1920: 134-5; Kamma, 1981: 85).

Meskipun pada 1716 Tidore menyatakan ketidakmampuannya untuk menghukum perompak Papua, VOC tetap berpegang pada kekuasaan Tidore atas Nieuw Guinea. Namun VOC melakukan kerja sama dengan Tidore dalam pelayaran honggi ke Nieuw Guinea. Oleh karena itu, pada Agustus 1730 seorang Koprал Belanda yang bernama Enoch Christian Wiggers dikirim bersama pelayaran honggi untuk menyusuri pantai utara Nieuw Guinea. Kunjungan itu dimaksudkan untuk mengawasi keamanan laut pantai utara Nieuw Guinea dari gangguan perompak asal Halmahera maupun Papua yang mencari budak untuk diperjualbelikan. Namun VOC tidak berhasil menguasai tanaman rempah-rempah di wilayah itu (*Mededeelingen*, 1920: 135).

Ketika Pangeran Nuku melakukan pemberontakan pada 1780, VOC membatalkan kebijakan politik non-intervensi yang diberlakukannya selama satu setengah abad atas Nieuw Guinea. Orang-orang Papua terlibat dalam pemberontakan yang dipimpin oleh Pangeran Nuku itu. Pada 1783 Pangeran Nuku bersama armadanya menyerang Tidore. Pada masa itu juga orang-orang Inggris hadir kembali di Nieuw Guinea (*Mededeelingen*, 1920: 135). Pada Februari 1775 orang Inggris yang bernama Forrest tiba di teluk Doreh, yang juga melihat "Ossy" (Wosi) dan "Malsingham" (Mansinam) (Galis, 1948: 107).

Pada Agustus 1793 kapal Inggris yang bernama *Duke of Clarence* di bawah pimpinan Kapten John Hayes berlabuh di Teluk Doreh. Hayes bersama pasukan India-Inggris membangun benteng kecil di dekat pantai Teluk Doreh yang dinamakan *Fort Coronation*. Pasukan Inggris yang menjaga benteng itu melakukan perdagangan barter dengan penduduk setempat. Namun beberapa hari kemudian hubungan mereka dengan penduduk setempat kurang menguntungkan karena adanya sikap permusuhan dari penduduk setempat. Pemicu permusuhan itu adalah sikap yang kurang sopan dari para prajurit-prajurit penghuni benteng itu. Mereka mandi bertelanjang bulat di laut tanpa menghiraukan kehadiran wanita Numfor yang ada di situ. Perilaku mereka itu dianggap sebagai suatu penghinaan terhadap masyarakat Numfor, sehingga terjadi permusuhan antara prajurit Inggris tersebut dengan penduduk setempat. Oleh karena itu, ketika orang Inggris Mac Cluer dengan kapal *Duchess of Clarence* tiba pada November 1794 di Teluk Doreh, ia mengangkut sebagian pasukan itu dan pada April 1795 seluruh pasukan Inggris meninggalkan benteng itu (Kamma, 1981: 86).

Pangeran Nuku mengirimkan juga seorang utusan bersama kapal-kapal yang mengangkut kembali pasukan pendudukan itu ke Bengala. Kekuatan Pangeran Nuku untuk melancarkan teror di Maluku semakin meningkat karena Inggris secara diam-diam memberikan bantuan kepada Pangeran Nuku. Pemberian bantuan itu dimaksudkan sebagai usaha untuk merebut kekuasaan atas kepulauan itu. Hal ini berarti Inggris secara tidak terbuka berperang melawan Republik Bataaf, Belanda. Pada 1796 di Hindia diketahui bahwa perang telah terjadi antara kedua kerajaan itu. Sementara itu, pada 1800 VOC dihapuskan dan Dewan XVII digantikan oleh Dewan Koloni Asia. Kepergian orang-orang Inggris menyebabkan Nuku kehilangan sumber bantuan. Oleh karena itu, Pangeran Nuku berupaya melakukan pendekatan kepada Belanda. Akan tetapi ketika orang-orang Inggris hadir di Maluku pada 1801, Pangeran Nuku kembali memihak kepada Inggris dan meraih sukses sehingga Nuku bersama 5000 orang pengikutnya dapat melancarkan

serangan di Ternate. Pada 1802 diadakan perdamaian antara Inggris dan Belanda yang mengakui pengembalian Maluku kepada Republik Bataaf, tetapi pada 1810 Maluku jatuh ke tangan Inggris.

Pada saat itu Gubernur Inggris Forbes membuat suatu perjanjian yang mengatur wilayah kekuasaan Tidore dan Ternate. Tidore menguasai daerah Manseray, Karandifur, Amberpur dan Amberpoon di Nieuw Guinea (Robide van Aa menyatakan yang dimaksud dengan daerah kekuasaan Sultan Tidore itu adalah daerah Suku-suku Mansarai atau Rumsarai, Karandifur atau Angradifur, Amberpur dan Amberpoon). Sultan Tidore memahami bahwa orang bertindak lebih bijak dalam kontrak itu untuk menyebutkan suku-suku dan bukan distrik. Pada saat itu penduduk Nieuw Guinea masih hidup berpindah-pindah dari tempat tinggal yang satu ke tempat yang lainnya. Dengan cara menyebut nama suku-suku, penduduk wilayah itu tetap patuh terhadap kekuasaan Sultan Tidore. Kontrak 1810 memiliki arti internasional yaitu menyangkut hak-hak yang dapat diterapkan Belanda atas wilayah itu.

Dalam Traktat London 1824 Inggris mengakui monopoli dagang Belanda di Maluku dan wilayah Nieuw Guinea yang termasuk wilayah Tidore, tetapi lingkup kekuasaan di Nieuw Guinea tidak diuraikan. Semua perjalanan penjelajahan Belanda di Nieuw Guinea berlangsung dengan penuh kecurigaan. Meskipun Belanda menerapkan politik non-intervensi atas daerah itu, Belanda tidak rela bila bangsa lain bermukim di sana. Oleh karena itu, ketika desas-desus beredar bahwa pada 1826 orang-orang Inggris telah bermukim di Pulau Nieuw Guinea, Belanda segera mengirim kapal layar *Dourga* di bawah komando Kolff untuk melakukan penelitian atas berita itu. Walaupun berita itu terbukti tidak benar, Gubernur Mercus berupaya untuk menguasai bagian pantai barat Nieuw Guinea dan membangun pangkalan. Oleh karena itu, pada 24 Agustus 1828 Belanda mendirikan pangkalan militer di wilayah itu yang diberi nama Fort du Bus (*Mededeelingen*, 1920: 135-6).

Pengumuman 24 Agustus 1828 merupakan awal sejarah Fort du Bus yang menyedihkan dan berakhir dengan resolusi 6 Desember 1835 yang

ditandai dengan pembongkaran pangkalan itu. Sejak pembongkaran pangkalan itu Belanda mengusulkan untuk mencari tempat yang lebih baik untuk pangkalan Belanda di wilayah itu. Perintah itu berlaku hingga 1861. Laporan komisi yang diterbitkan pada 1861 yang dikenal dengan laporan Etna menjadi alasan pemerintah Belanda untuk mencabut instruksi pencarian tempat yang lebih baik untuk pangkalan dan menolak pendirian pos pemerintahan atau militer.

Sejak 1861 hingga 1898 hubungan pemerintah Belanda dengan wilayah Nieuw Guinea dilakukan dengan pengiriman kapal perang atau kapal uap pemerintah yang mengangkut komisararis atau aparat pemerintah yang ditugaskan untuk memasang papan nama, mengangkat para kepala adat, ikut serta dalam penumpasan gerombolan perompak dan pengayau orang-orang Papua dan untuk menunjukkan pamer kekuatan terhadap penduduk wilayah itu. Berdasarkan akta pengangkatan itu, para kepala adat wajib mengibarkan bendera Belanda saat kapal-kapal asing atau aparat pemerintah mendekati atau berlabuh di wilayah para kepala adat itu (*Mededeelingen*, 1920: 136).

Sekitar 1850 kapal *Circe*, kapal pemerintah Hindia Belanda mengunjungi Teluk Doreh untuk menempatkan lambang negara (Kamma, 1981: 86), sebagai tanda bahwa wilayah tersebut merupakan milik Belanda. G. F. de Bruin Kops, salah satu yang ikut dalam pelayaran itu melaporkan bahwa para awak kapal telah disambut dengan baik, dan alam Teluk Doreh indah dan permai. Orang-orang Belanda itu tidak mengetahui pengalaman penghuni benteng Coronation kira-kira 50 tahun sebelumnya. Laporan de Bruin Kops mengenai Teluk Doreh yang bernada memuji inilah yang menyebabkan Heldring dan Gossner memilih Doreh sebagai pangkalan bagi para perintis zending Carl Wilhelm Ottow dan Johann Gottlob Geissler di Nieuw Guinea (Kamma, 1981: 86).

Pada awal 1850-an keinginan pemerintah Belanda untuk menegakkan kekuasaannya di Nieuw Guinea semakin meningkat. Keinginan pemerintah Belanda itu seiring dengan meningkatnya perhatian orang-orang Eropa lainnya atas wilayah itu. Kegagalan Fort du Bus telah

menyadarkan pemerintah Belanda akan pentingnya suatu penelitian ilmiah sebelum pembukaan suatu pangkalan. Selain itu, eksplorasi menjadi sarana untuk memperkuat hak Belanda atas bagian barat Nieuw Guinea. Ketika Ottow dan Geissler melakukan karya penginjilan di Manokwari, mereka dibantu pemerintah Belanda. Pemberian bantuan itu dimaksudkan untuk memberikan dasar yang kuat bagi penegakan hak milik Belanda di Nieuw Guinea. Para utusan zending itu juga terbukti mampu menunjukkan jasa-jasa pentingnya kepada pemerintah Belanda, misalnya pada 1857 mereka membantu tiga awak kapal Jerman yang kandas di wilayah itu (*Mededeelingen*, 1920: 137).

Orang-orang Eropa telah beberapa kali berkunjung ke Nieuw Guinea, namun penduduk setempat kurang merasakan manfaatnya. Berbeda halnya dengan kehadiran para utusan zending Carl Wilhelm Ottow dan Johann Gottlob Geissler pada 5 Februari 1855 di Pulau Manusinam (Manokwari) yang membawa pencerahan bagi orang-orang Papua. Kontak utusan zending itu dengan penduduk setempat tidak selalu menyenangkan, tetapi mereka tetap tinggal di daerah itu untuk melaksanakan tugas penginjilan (Abineno, 1978-1979: 95).

Dalam melaksanakan karya penginjilan, para zending itu melakukan pengajaran dengan mendirikan sekolah supaya anak-anak belajar “3 m” yaitu membaca, menulis dan menghitung. Para zendeling menebus anak-anak yang diperbudak dan mendidiknya dengan harapan kelak mereka tumbuh menjadi kelompok inti jemaat Kristen yang membantu pekabaran Injil di wilayah itu (End-Weitjens, 1998: 122-3).

Para zendeling itu mengalami kesulitan dalam menjalankan karya penginjilannya. Mereka kesulitan untuk memerangi praktek-praktek adat seperti perang suku, saling membalas dendam, memiliki dan menjual budak dan praktek ilmu-ilmu gaib. Oleh karena itu, para zendeling itu memohon agar pemerintah Belanda menegakkan kekuasaannya di wilayah itu (Campo, 1992: 190). Para zending itu meyakini bahwa penegakan hukum dan ketertiban hanya dapat dilaksanakan oleh suatu pemerintahan.

Pemerintah Belanda berkeinginan untuk melakukan hubungan yang intensif dengan wilayah Nieuw Guinea. Pada 1863 pemerintah Belanda mendirikan sebuah depot batu bara di Teluk Doreh dan pada 1864 suatu kesatuan serdadu Tidore ditempatkan di Teluk Doreh untuk memberikan perlindungan kepada para awak kapal. Namun, pasukan pendudukan itu lebih banyak menimbulkan dampak negatif daripada positif dan para utusan pemerintah Belanda merasa senang ketika para pasukan itu ditarik kembali ke Tidore (*Mededeelingen*, 1920: 137-8). Permohonan kepada pemerintah Belanda untuk melakukan kunjungan setiap tahun ke Teluk Doreh berulang kali tidak mendapat respons yang baik. Perhatian pemerintah Belanda terhadap Nieuw Guinea meningkat seiring dengan penguasaan Jerman atas pantai timur laut Nieuw Guinea dan penguasaan Inggris atas pantai tenggara Nieuw Guinea pada 1884. Pembukaan pangkalan Jerman dan Inggris di Nieuw Guinea meningkatkan keinginan Belanda untuk menegakkan kekuasaannya di wilayah itu. Berulang kali penduduk di Nieuw Guinea Belanda melakukan perompakan dan pengayauan ke wilayah koloni Inggris di wilayah itu. Oleh karena itu, pemerintah kolonial berencana untuk membuka dan menegakkan pemerintahannya di Nieuw Guinea Belanda pada 1898 (*Mededeelingen*, 1920: 138).

D. Penegakan Kekuasaan Pemerintahan Kolonial Belanda di Sausapor

Sejak abad ke-17 kapal-kapal Belanda sesekali singgah di Pulau Nieuw Guinea untuk menghalau kekuatan-kekuatan asing lainnya (Kamma, 1981: 63). Ketika para pedagang Inggris berencana mengirimkan kapal-kapalnya untuk membeli rempah-rempah pada 1700, VOC mengirim Jacob Weyland pada 1705 untuk menjelajahi pantai Pulau Nieuw Guinea. Penjelajahan itu dimaksudkan untuk memantau pantai barat Nieuw Guinea apakah di daerah itu masih ditemukan rempah-rempah. Berdasarkan hasil penjelajahan Weyland diketahui bahwa tidak ada jenis

rempah-rempah yang baik di Nieuw Guinea Utara (*Mededeelingen*, 1920: 134). Dengan demikian pengiriman Jacob Weyland dimaksudkan untuk mencegah intervensi asing atas wilayah kolonial Belanda.

Meskipun pejabat pemerintah Belanda telah mengirimkan kapalnya ke Nieuw Guinea, tetapi belum tertarik untuk mendirikan suatu benteng di wilayah itu. Tindakan para pejabat Belanda tersebut berbeda dengan tindakan seorang kapten Inggris yang bernama John Hayes. Setelah John Hayes melabuhkan kapal *Duke of Clarence* di Teluk Doreh pada Agustus 1793, dia mendirikan sebuah benteng di tempat itu yang dinamakan benteng *Coronation*. Pasukan Inggris itu mengadakan perdagangan kecil-kecilan dengan penduduk setempat. Hubungan mereka dengan penduduk setempat kurang menguntungkan karena sikap bermusuhan penduduk di sekitarnya. Oleh karena itu, ketika Mac Cluer tiba di Teluk Doreh pada November 1794, sebagian pasukan Inggris meninggalkan benteng itu. Pada April 1795 semua pasukan Inggris meninggalkan benteng itu (*Mededeelingen*, 1920: 135).

Pada Agustus 1827 petualang Perancis Dumont d'Urville mengunjungi Teluk Doreh dan sekitarnya (Galis, 1948: 108). Kunjungan orang-orang Eropa ke Nieuw Guinea dan pendirian benteng *Coronation* telah meningkatkan perhatian Belanda terhadap wilayah itu.

Pada abad ke-19 Belanda menunjukkan perhatiannya terhadap wilayah Nieuw Guinea. Perhatian tersebut semakin meningkat setelah pembukaan pos Inggris di Pulau Melville pada Oktober 1825. Belanda menganggap pendirian pos itu sebagai langkah awal Inggris untuk membuka hubungan dagang dengan pulau-pulau di sebelah utara Pulau Melville yaitu Kepulauan Tanimbar di Maluku Selatan, Kei di Maluku Tenggara, dan Aru.² Oleh karena itu, Merkus (Gubernur Maluku 1822-1828)

2 NA, Kol 474, Vb 6-12-1825 No. 86, Fre Huizinga, *Merkusoord: Sources on the First Dutch Establishment in New Guinea (1828-1836)* (Jakarta: Penerbitan Naskah Sumber Arsip Nasional Republik Indonesia, 2004), hal. xxvi

mengutus kapal layar Dourga di bawah komando D. H. Kolff untuk menyelidiki persoalan itu.³

Dalam pelayarannya, Kolff mengunjungi Kepulauan Aru. Di daerah itu Kolff mendengar desas-desus dari orang Seram bahwa Inggris membangun sebuah pos di pantai Nieuw Guinea.⁴ Merkus khawatir bahwa pendirian pos itu mengancam kepentingan dan hak-hak Belanda di Kepulauan Maluku. Merkus yakin Inggris tidak tertarik menguasai wilayah Nieuw Guinea karena Inggris memiliki cukup lahan untuk membuka koloninya di Australia. Merkus menganggap bahwa sasaran pembukaan pos Inggris di Nieuw Guinea adalah membuka hubungan dagang dengan orang-orang Maluku bukan dengan orang-orang Papua yang masih menganut ekonomi subsisten dan perdagangan barter. Orang-orang Maluku yang dapat memberi Inggris komoditi rempah-rempah yang diminati di pasar Cina.⁵ Wilayah Nieuw Guinea juga menghasilkan rempah-rempah, tetapi dengan adanya kontrak antara VOC dan Kesultanan Tidore, Tidore ditugaskan VOC untuk membatat pohon-pohon rempah-rempah di Nieuw Guinea (*Mededeelingen*, 1920: 133).

Pada 21 Maret 1826 Merkus mengutus D. H. Kolff ke Nieuw Guinea untuk menyelidiki apakah Inggris mendirikan posnya di wilayah itu.⁶ Dalam amanatnya Merkus memerintahkan Kolff untuk memperingatkan pimpinan pos Inggris di Nieuw Guinea agar tidak membangun pangkalan sebelum memperoleh ijin dari pemerintah Belanda. Pemberian ijin diperlukan karena pantai Nieuw Guinea merupakan wilayah Kesultanan Tidore. Hal ini sesuai dengan isi kontrak 27 Mei 1824 yang

3 ANRI, Ambon 445, GME aan RvT 17-1-1826 no. 4 secreet, Fre Huizinga, *Merkusoord: Sources*, hal. xxvii.

4 ANRI, Ambon 214, Besluit GME 21-3-1826 no. 3, Fre Huizinga, *Merkusoord: Sources*, hal. xxvii.

5 ANRI, Ambon 445, GME aan KG 12-5-1826 no. 4 secreet, Fre Huizinga, *Merkusoord: Sources*, hal. xxviii.

6 ANRI, Ambon 214, Besluit GME 21-3-1826 no. 3; and Besluit GME 24-3-1826 no. 1, Fre Huizinga, *Merkusoord: Sources*, hal. xxviii.

dibuat Belanda dengan Sultan Ternate dan Sultan Tidore. Dalam kontrak itu disebutkan bahwa tidak ada benteng yang bisa didirikan oleh sultan, warganya atau kelompok lain di wilayah Ternate dan Tidore tanpa ijin tertulis dari Pemerintah Hindia Belanda.⁷ Kolff juga tidak diijinkan untuk mengambil tindakan terhadap kapal-kapal Inggris yang mengunjungi Nieuw Guinea. Kebijakan itu sejalan dengan perintah Komisararis Jenderal Hindia Belanda L. P. J. du Bus de Gesignies (1826-1830) kepada Merkus. Merkus hanya diijinkan untuk mengajukan protes jika Inggris membangun posnya di Nieuw Guinea dan menyerahkan masalah itu kepada Pemerintah Belanda di Den Haag dan Pemerintah Inggris di London. Kebijakan yang demikian bertujuan untuk menghindari ketegangan internasional.⁸

Pada April-Mei 1826 Kolff mengunjungi pantai yang terbentang dari Pulau Kelepon sampai Teluk Etna di Nieuw Guinea. Kunjungan Kolff ini merupakan kunjungan pertama wakil pemerintah Belanda di Nieuw Guinea.⁹ Dalam penyusurannya itu, Kolff tidak menemukan bekas pangkalan Inggris di daerah itu. Akan tetapi dengan mempertimbangkan semakin meningkatnya aktivitas perdagangan dari orang-orang Makassar di Maluku Tenggara dan tuntutan Inggris atas barang-barang yang laris untuk pasar Cina, P. Merkus menduga cepat atau lambat pangkalan itu pasti muncul. Oleh karena itu, untuk mengusir Inggris dari Nieuw Guinea, P. Merkus, gubernur Maluku (1822-1828) mengusulkan agar pemerintah Belanda menguasai seluruh Nieuw Guinea dengan membuka pos pemerintahan di daerah itu. Merkus tidak secara tegas menyebutkan bentuk pos yang hendak dibukanya, tetapi dengan memperhitungkan pengamatan atas pangkalan di Nieuw Guinea, jelas Merkus memikirkan

7 NA, Kol 21, Traktaat met de Sultans van Ternate en Tidore 27-5-1824, Fre Huizinga, *Merkusoorde: Sources*, hal. xxx.

8 ANRI, Ambon 445, GME aan Luit der 1e klasse commanderende Z. M. Brik Dourga 24-3-1826 no. 4b secreet, Fre Huizinga, *Merkusoorde: Sources*, hal. xxviii-xxix.

9 ANRI, Ambon 445, GME aan KG 17-7-1826 no. 6 secreet, Fre Huizinga, *Merkusoorde: Sources*, hal. xxix.

pos militer.¹⁰ Komisariss Jenderal du Bus cenderung memilih untuk mendirikan pos perdagangan. Pilihan du Bus itu didasarkan pada penghematan biaya karena saat itu Pemerintah Belanda mengeluarkan biaya yang besar untuk Perang Jawa (1825-1830).¹¹

Usul du Bus tentang pembangunan pos perdagangan di Nieuw Guinea ditentang oleh C. T. Elout, menteri koloni (1824-1829) karena pendirian pos itu membutuhkan biaya yang besar sedangkan keuntungan dari pos itu tidak dapat diharapkan. Selain itu, Elout khawatir dengan pendirian pos itu menarik perhatian Inggris pada daerah itu. Para pedagang Inggris tidak dapat dilarang berdagang di Nieuw Guinea, karena daerah itu di luar daerah monopoli Belanda. Kehadiran pedagang Inggris di pos perdagangan itu mengancam kepentingan Belanda di Maluku, sebab para pedagang Inggris itu dapat menjual barang-barangnya di Maluku dan membeli rempah-rempah melalui pos Belanda di Nieuw Guinea. Berbeda dengan pendapat Elout, Raja Willem mengumumkan sebuah keputusan bahwa du Bus diizinkan untuk meresmikan sebuah pangkalan di Nieuw Guinea untuk pengembangan perikanan di Laut Selatan.¹² Pada bulan Mei 1827 Raja memerintahkan Elout untuk menyusun sebuah usulan pembukaan koloni di Nieuw Guinea. Raja memberitahukan kepada menteri koloni dan menteri luar negeri bahwa jika hal itu dilakukan, ketakutan terhadap dampak-dampak pangkalan Inggris di Nieuw Guinea tidak terjadi.¹³

Du Bus menginstruksikan Merkus untuk mendirikan sebuah pos militer di Nieuw Guinea. Pada 24 Agustus 1828 didirikan sebuah benteng

10 ANRI, Ambon 445, GME aan KG 17-7-1826 no. 6 secreet, Fre Huizinga, *Merkusoord: Sources*, hal. xxxiii-xxxiv.

11 NA, Kol 4530, Luitenant-GG in rade 29-9-1826 Z, Fre Huizinga, *Meskusoord :Sources*, hal. xxxiv.

12 NA, Staatssecretarie 5681A, Exh 6-10-1824 V⁹ geheim, Overzicht der artikelen van overeenkomst voor de Nederlansche Handel Maatschappij, Fre Huizinga, *Merkusoord: Sources*, hal. xxxvi-xxxvii.

13 NA, Kol 562, Vb 27-6-1827 no. 70, Secretaris van Staat aan MvK 28-5-1827 no. 92, Fre Huizinga, *Merkusoord: Sources*, hal. xxxvii.

di Nieuw Guinea yang dinamakan Fort du Bus di Teluk Triton. Merkus mengangkat Komisararis J. A. van Delden untuk menguasai Nieuw Guinea. Van Delden membacakan proklamasi tentang kepemilikan Sri Baginda Raja Nederland atas seluruh wilayah bagian barat Nieuw Guinea, kecuali wilayah yang menjadi hak sultan Tidore di Mansarij, Karandefur, Ambarpura dan Umbarpon. Kemudian bendera Belanda dikibarkan di pos itu. Pada akhir upacara itu, van Delden membuat kontrak dengan tiga pemimpin Papua yaitu Raja Namatote, Raja Lakahia dan orang kaya Lobo dan Mawara. Dalam kontrak tersebut, para kepala adat itu mengakui kekuasaan Belanda dan sebaliknya Belanda berjanji untuk melindungi para kepala adat itu. Para kepala adat itu menerima akta pengangkatan, sebuah tongkat perak, sehelai kain merah sebagai tanda jabatannya dari pemerintah Belanda. Dengan adanya kontrak tersebut, para kepala adat Papua itu menjadi pegawai pemerintah Belanda, dan kesepakatan yang dibuat dengan mereka merupakan kontrak administrasi.¹⁴

Untuk menegaskan kepemilikan Belanda atas Nieuw Guinea, pengumuman van Delden itu dicetak dalam sebuah artikel di Surat Kabar Negara Belanda. Pengumuman itu sesuai dengan yang disampaikan oleh Inggris tentang kepemilikannya atas Australia. Dalam artikel itu dijelaskan bahwa pembentukan pos di Nieuw Guinea bertujuan untuk menciptakan kondisi yang lebih teratur di Nieuw Guinea, sehingga perdagangan di Maluku berkembang pesat.¹⁵

Namun kenyataan yang dihadapi penjaga pos Belanda di Nieuw Guinea tidak sesuai dengan harapan pendirian pos itu. Kondisi lokasi yang dipilih sebagai tempat pos itu kurang menguntungkan. Lokasinya berada di daerah hutan yang lebat, sehingga mereka harus lebih dahulu

14 NA, Du Bus de Gesignies 416, Kommissaris voor Nieuw Guinea aan Luitenant-GG 13-12-1828; NA, Fre Huizinga: *Merkusoorde: Sources*, hal. xlii.

15 NA, Staatssecretarie 5723, Vb 14-9-1829 Z geheim, MvK aan Koning 27-8-1829 no. 82, Fre Huizinga, *Merkusoorde: Sources*, hal. xliii.

membabat hutan sebelum mendirikan pos tersebut. Kondisi lainnya yang kurang menguntungkan adalah tempat yang dipilih sebagai lokasi pos itu terletak di daerah *sosolot*¹⁶ Seram. Setelah pendirian pos itu, orang kaya Kilwaru dari Seram Laut menuntut pajak kepada pasukan Belanda yang menjaga pos itu. Adapun alasan penuntutan pajak dimaksud karena pos itu dibangun di wilayah *sosolot* Seram.¹⁷ Di satu pihak, orang-orang Seram itu berpendapat bahwa mereka berhak untuk menagih pajak kepada pasukan Belanda yang menempati *sosolot* Seram. Di lain pihak, pasukan penjaga benteng itu berpendapat bahwa mereka menempati wilayah kekuasaannya sehingga mereka tidak bersedia untuk membayar pajak kepada orang-orang Seram itu. Pemahaman yang berbeda itu menimbulkan konflik di antara pasukan penjaga benteng du Bus dengan orang Seram menganggap wilayah itu sebagai *sosolot*-nya.

Pada 1829 pos itu dua kali diserang orang-orang Papua. Orang-orang Papua menyerang pos itu karena diprovokasi oleh orang-orang Seram.¹⁸ Alasan orang-orang Seram memprovokasi orang-orang Papua karena pasukan Belanda yang menjaga pos itu tidak mengabdikan tuntutan pajak dari orang-orang Seram.

Permasalahan utama yang dihadapi serdadu Belanda itu adalah lokasinya yang tidak sehat. Hal ini terbukti dari banyaknya penjaga pos itu yang menderita sakit malaria, kudis dan tyfus.¹⁹ Dari 1828-1836 terdapat dalam daftar 110 orang pasukan yang meninggal di Merkusoord

16 *Sosolot* merupakan pangkalan khusus di pantai barat daya Nieuw Guinea, yang merupakan tempat untuk para pedagang Seram khususnya dari Seram Laut, Goram dan Watubela melakukan perdagangan barter.

17 ANRI, Ambon 438, Luitenant ter zee 1e klasse & kommandant J. Ligtoet aan Divisie Kommandant in de Moluccos, 2-1-1830 no 3, Proces-verbaal 31-2-1829, Fre Huizinga, *Merkusoord: Sources*, hal. xli.

18 ANRI, Ambon 458, GME aan RvT 29-4-1830 no 197; and RvT aan GME 2-7-1830 no 31, Fre Huizinga, *Merkusoord: Sources*, hal. xlvi.

19 J. Modera, Verhaal van eene Reize naar en Langs de Zuid-Westkust van Nieuw Guinea gedaan in 1828, door Z. M. Corvet Triton, en Z. M. Coloniale Schoener de Iris (Haarlem: Vincent Loosjes. 1830), hal. 133-4, 144, Fre Huizinga, *Merkusoord: Sources*, hal. xlvi.

(Schoorl, 2001: 2). Kondisi yang demikian menyebabkan Gubernur Maluku mengusulkan agar pos itu dipindahkan ke lokasi yang lebih sehat pada 1830. Namun Pemerintah Hindia Belanda tidak mendukung ide itu.²⁰

Van den Bosch mengusulkan untuk meninggalkan benteng itu karena pos itu tidak mendatangkan keuntungan dan tidak memberikan perlindungan terhadap serangan Inggris. Van den Bosch memilih untuk membuat kontrak dengan kepala adat Papua dengan menawarkan ganti rugi dalam usahanya mengibarkan bendera Belanda. Cara yang ditempuh ini jauh lebih murah untuk mempertahankan hak-hak Belanda di Nieuw Guinea.²¹ Dengan demikian, ide van den Bosch untuk meninggalkan pos itu diilhami oleh pertimbangan keuangan.

Merkus menentang ide itu sebab jika pos itu ditinggalkan, model penguasaan Belanda atas Nieuw Guinea tidak sesuai dengan model penguasaan Inggris atas Australia. Dengan demikian, Inggris tidak merasa terikat untuk menghormati hak-hak Belanda. Inggris menganggap dengan ditinggalkannya Merkusoord sebagai pengingkaran tuntutan Belanda di pantai barat Nieuw Guinea. Oleh karena itu, Merkus mengusulkan agar Nieuw Guinea tetap diduduki.²²

Pemerintah Hindia tidak menerima sepenuhnya pandangan Merkus atau ide van den Bosch. Dengan alasan untuk menghemat pengeluaran, pemerintah Hindia memutuskan untuk sementara meninggalkan pos itu. Pos itu ditinggalkan setelah selesai dihancurkan pada 20 Februari 1836. Pemerintah kolonial merasa tidak ada lagi ancaman pangkalan Inggris di Nieuw Guinea. Namun jika ada pangkalan Inggris di Nieuw Guinea yang memunculkan ancaman baru, Belanda harus mendirikan

20 ANRI, Ambon 438, GME aan GG 1-3-1830 no. 13; NA, Kol 2836, GG in rade 31-7-1830 no. 37, Fre Huizinga, *Merkusoord*: Sources, hal. xlvi-xlvii.

21 NA, Kol 984, Vb 13-7-1835 no. 8/330, Merkus aan KG 29-7-1833 no. 10, Fre Huizinga, *Merkusoord*: Sources, hal. xlvii.

22 NA, Kol 984, Vb 13-7-1835 no. 8/330, Merkus aan KG 29-7-1833 no. 10, and Merkus aan GG ad interim 26-1-1834 no. 4, *Merkusoord*: Sources, hal. xlvii.

sebuah pos baru di Merkusoord atau di lokasi yang lebih baik.²³ Dengan kebijakan itu Belanda tetap mempertahankan hak-haknya atas Nieuw Guinea dengan biaya yang murah.

Setelah benteng du Bus ditinggalkan, Belanda tidak berusaha untuk membangun benteng baru sebagai penggantinya. Bahkan pada dekade berikutnya pemerintah Belanda tidak melakukan kunjungan ke Nieuw Guinea. Baru pada 1850 ada kegiatan ekspedisi yang dilakukan ke wilayah itu. Oleh karena itu, Bone menyebut Nieuw Guinea jajahan Belanda sebagai anak tiri Hindia Belanda, daerah terlupa yang hanya berguna sebagai benteng terhadap gangguan asing (Bone, 1958: 22).

Walaupun Belanda belum tertarik mendirikan pos pemerintahannya di Nieuw Guinea, tetapi para zendeling berusaha mengabarkan Injil di wilayah itu. Pekabaran Injil dimulai pada 5 Februari 1855 yaitu dengan kehadiran Carl Wilhelm Ottow dan Johann Gottlob Geissler di Mansinam, Manokwari. Sebagai perintis pertama dalam pekabaran Injil di Nederlands Nieuw Guinea, mereka menghadapi lapangan kerja yang sangat berat yaitu untuk memerangi praktek-praktek adat seperti perang antar suku, perbudakan, pengayauan dan pembalasan dendam. Oleh karena itu, para zendeling itu memohon agar pemerintah Belanda menegakkan pemerintahannya di Nieuw Guinea. Para zendeling itu meyakini bahwa penegakan hukum dan ketertiban hanya dapat dilakukan oleh sebuah pemerintahan (Campo, 1992: 190).

Permohonan para zendeling itu mendapat perhatian dari pemerintah dan parlemen di Negeri Belanda. Upaya perealisasi penegakan kekuasaan Belanda di Nieuw Guinea menjadi perdebatan di Parlemen (Sartono Kartodirdjo, 1972: 15). H. van Kol anggota parlemen dari Partai Sosialis menentang perluasan wilayah kekuasaan Belanda di Nieuw Guinea (Randwijck, 1989: 40). Pandangan Kol ini dipengaruhi gema politik lepas tangan terhadap daerah-daerah seberang yang berlaku pada

23 NA, Kol, 984, Vb 13-7-1835 no. 8/330, GG ad interim aan MvK 30-12-1834 no. 455; NA, Kol 1049, Exh 14-9-1836 no. 5, Fre Huizinga, *Merkusoord: Sources*, hal xlvii-xlviii.

abad ke-19. Di antara anggota partai-partai kanan (Kristen) dan Liberal ada juga yang menentang penegakan kekuasaan Belanda di Nieuw Guinea. Pada umumnya anggota parlemen dari partai-partai kanan (Kristen) dan liberal menerima usulan tersebut. Pemimpin utama Partai Anti Revolusioner A. Kuyper mendukung pendapat Menteri Kolonial J. T. Cremer untuk menegakkan pemerintahan di Nieuw Guinea. Kuyper menyatakan bahwa Nieuw Guinea diduduki “demi kemanusiaan” dan “untuk melakukan pekerjaan pengadaban yang sederhana” (Kamma, 1994: 94). Pendapat itu sejalan dengan ideologi baru yang ditemukan negara-negara Barat menjelang akhir abad XIX untuk politik penjajahannya, yakni suatu *mission civilisatrice* atau misi untuk membawa peradaban (Lapian, 1987: 39). Dengan dasar pendudukan yang demikian kiranya tidak seorangpun yang menyangka bahwa Belanda menduduki suatu wilayah dengan maksud hanya untuk mencari keuntungan ekonomi (Kamma, 1994: 94). Argumentasi tersebut meyakinkan pemerintah Belanda menegakkan kekuasaannya di Nederlands Nieuw Guinea.

Pada 1898 pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan keputusan mengenai pembentukan pemerintahan di Nieuw Guinea. Keputusan itu ditetapkan setelah Parlemen Belanda menyetujui biaya pengeluaran untuk penegakan pemerintahan di Nieuw Guinea sebesar f 115. 000. Penegakan pemerintahan di Nederlands Nieuw Guinea diatur dalam keputusan Gubernur Jenderal 5 Februari 1898 Nomor 5.²⁴

Berdasarkan keputusan tersebut, wilayah Nederlands Nieuw Guinea dibagi menjadi dua *afdeeling*. Wilayah bagian utara Nederlands Nieuw Guinea disebut Afdeeling Noord Nieuw Guinea (Afdeeling Nieuw Guinea Utara), dan bagian barat serta selatan disebut Afdeeling West en Zuid Nieuw Guinea (Afdeeling Nieuw Guinea Barat dan Selatan).

24 ANRI, Besluit van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indie, No. 19, 5 Februari 1898; Lihat juga ANRI, Staatsblad van Nederlandsch-Indie, No. 142, 1898.

Kedua *afdeeling* tersebut dijadikan bagian dari Karesidenan Ternate.²⁵ Pemerintah menetapkan Tanjung Goede Hoop (Yamusba) sebagai batas dari kedua *afdeeling* tersebut.²⁶ Pembagian wilayah itu dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan dan kualitas kehadiran Negara kolonial di Nederlands Nieuw Guinea.

Berdasarkan keputusan Gubernur Jenderal 5 Februari 1898 Nomor 19, formasi kontrolir pemerintahan di kedua *afdeeling* itu ditetapkan dua orang kontrolir klas-1. Kedua kontrolir itu diberi gaji yang sesuai dengan pangkatnya, tunjangan dan biaya perjalanan dinas. Pemerintah kolonial menyediakan sebuah kapal uap untuk kepentingan perjalanan dinas masing-masing kontrolir itu. Pemerintah juga menyediakan biaya operasional kapal uap sebesar f 30. 000 untuk Afdeeling Nieuw Guinea Utara. Sementara untuk Afdeeling Nieuw Guinea Barat dan Selatan disediakan biaya operasional kapal uap sebesar f 50. 000. Biaya untuk gaji awak kapal uap dan perawatan kapal uap disediakan sebesar f 9. 000 per tahun untuk Afdeeling Nieuw Guinea Utara dan f 11. 000 per tahun untuk Afdeeling Nieuw Guinea Barat dan Selatan. Pemerintah juga menyediakan biaya sebesar f 400 per tahun untuk membeli barang-barang hadiah bagi penduduk Nieuw Guinea.²⁷ Pemberian biaya operasional kapal uap dan penggajian awak kapal uap serta biaya perawatan kapal uap itu disesuaikan dengan luas wilayah kekuasaan para kontrolir itu. Oleh karena itu, pemerintah kolonial memberikan biaya operasional dan perawatan kapal uap yang lebih besar kepada kontrolir Afdeeling Nieuw Guinea Barat dan Selatan.

Gubernur Jenderal menetapkan kedudukan kontrolir Afdeeling Nieuw Guinea Utara di Manokwari di daerah Teluk Doreh dan kontrolir

25 ANRI, Besluit van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indie, No. 19, 5 Februari 1898.

26 ANRI, Surat Sekretaris Pemerintah kepada Residen Ternate, No. 297a, 5 Februari 1898, *Bundel Algemeene Secretarie*.

27 ANRI, Besluit van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indie, No. 19, 5 Februari 1898; Lihat juga ANRI, Staatsblad van Nederlandsch-Indie, No. 142, 1898.

Afdeeling Nieuw Guinea Barat dan Selatan di Fak-Fak di daerah Kapaur.²⁸ Pemilihan Manokwari dan Fak-Fak sebagai tempat kedudukan para kontrolir itu didasarkan pada letak geografis dan nilai ekonomis serta ketersediaan sarana dan prasarana jalur transportasi.

Gubernur Jenderal Hindia Belanda mengeluarkan keputusan 28 Juli 1898 Nomor 7 yang menetapkan tunjangan yang diperoleh para kontrolir yang bertugas di Nederlands Nieuw Guinea. Dalam keputusan ini ditetapkan bahwa para kontrolir itu memperoleh tunjangan untuk biaya perjalanan dinas ke wilayah kekuasaannya dan biaya tunjangan perumahan.²⁹

Untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan di Nederlands Nieuw Guinea, Gubernur Jenderal mendirikan kantorpos pembantu di Manokwari (Afdeeling Nieuw Guinea Utara) dan Fak-Fak (Afdeeling Nieuw Guinea Barat dan Selatan).³⁰ Kantor pos itu didirikan untuk memudahkan komunikasi antarpejabat pemerintah daerah dan antara pejabat pemerintah daerah di Nederlands Nieuw Guinea dengan pejabat pemerintah pusat di Batavia.

Setelah pembenahan pemerintahan kolonial di Nederlands Nieuw Guinea selesai, Residen Ternate Dr. Horst melantik Kontrolir L. A. van Oosterzee pada 8 November 1898 sebagai kontrolir pertama untuk Afdeeling Nieuw Guinea Utara. Pada 1 Desember 1898 Residen Horst melantik Kontrolir J. A. Kroesen sebagai kontrolir pertama untuk Afdeeling Nieuw Guinea Barat dan Selatan.³¹ Dengan pelantikan kedua kontrolir tersebut berarti pemerintahan kolonial Belanda secara langsung telah ditegakkan di Nederlands Nieuw Guinea.

Untuk membantu para kepala wilayah pemerintahan *afdeeling* untuk menegakkan keamanan dan ketertiban masyarakat di Nederlands Nieuw

28 ANRI, Staatsblad van Nederlandsch-Indie, No. 142, 1898.

29 ANRI, Staatsblad van Nederlandsch-Indie, No. 224, 1898.

30 ANRI, Staatsblad van Nederlandsch-Indie, No. 319, 1898.

31 Perpustakaan Nasional, *Koloniaal Verslag*, 1899-1900, hal. 41-42.

Guinea, pemerintah kolonial membentuk korps polisi yang bertugas di wilayah itu. Para aparat polisi itu ditugaskan untuk mendampingi para kontrolir dalam setiap kegiatan turnenya ke wilayah kekuasaannya. Para aparat polisi itu juga ditugaskan untuk melakukan patroli ke wilayah di bawah pengaruh pemerintah kolonial di Nederlands Nieuw Guinea.

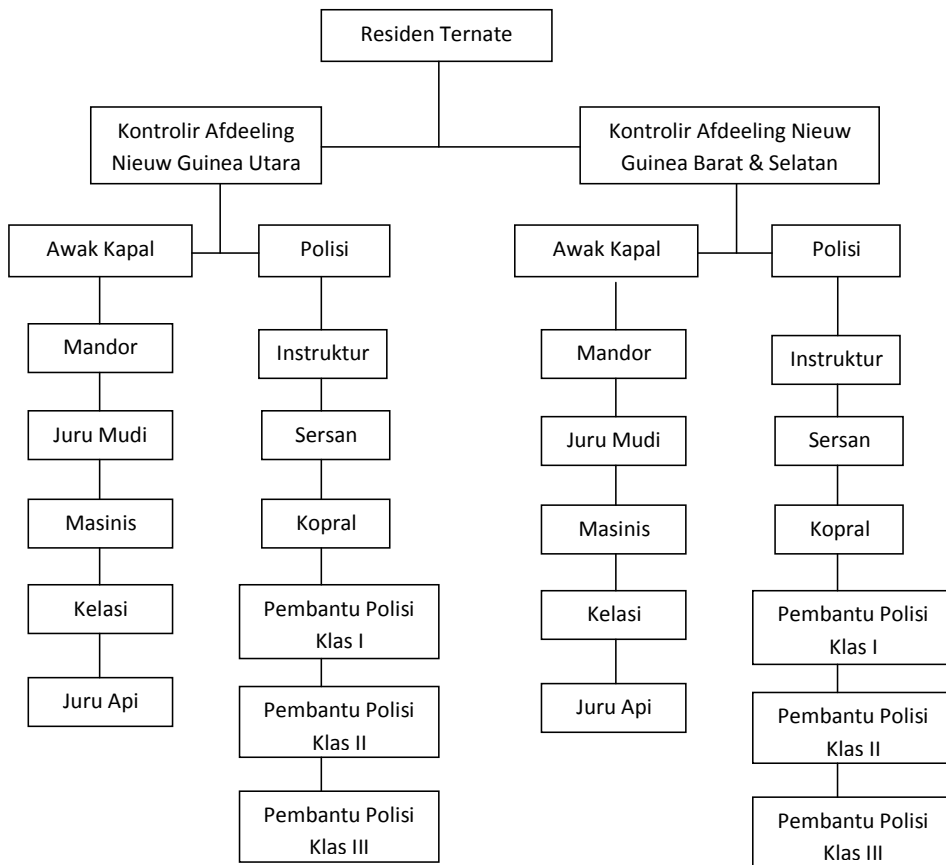
Para kontrolir yang ditugaskan di Nederlands Nieuw Guinea diberikan kapal uap sebagai kendaraan dinasnya untuk melakukan perjalanan dinas ke seluruh wilayah yang menjadi tanggung jawabnya. Untuk mengoperasikan kapal uap itu pemerintah merekrut awak kapal uap untuk ditugaskan di Nederlands Nieuw Guinea.

Secara skematis struktur pemerintahan kolonial Belanda pada awal penegekan kekuasaannya di Nederalnds Nieuw Guinea dapat digambarkan dalam bagan di bawah (Gambar 20)

Meskipun pemerintah Kolonial Belanda telah menegakkan kekuasaannya pada 1898, akan tetapi hingga awal abad ke-20 penduduk Papua termasuk penduduk Sausapor, masih memberikan sesembahan kepada Sultan Tidore. Perubahan mulai terjadi di Sausapor, ketika Mayor bin Mirino, pimpinan utusan pembawa sesembahan penduduk pulau dua kepada sultan Tidore di Samate, pada tanggal 12 Agustus 1912, kembali ke pulau dua dengan membawa seorang guru injil bernama Yonas Nendisa. Ibadah pertama dilakukan di tepi pantai. Selanjutnya dilakukan pembangunan sekolah untuk kebutuhan pendidikan agama dan pendidikan formal lainnya.

Masyarakat Sausapor di Pulau Dua semakin berkembang, namun lambat laun menimbulkan gesekan kepentingan dan lain sebagainya. Konflik selalu saja terjadi bahkan berakhir dengan kematian. Konflik yang acapkali terjadi dalam masyarakat Sausapor menyebabkan pihak Belanda di Manokwari dan Sorong mengirim dua buah kapal ke Pulau Dua pada tanggal 6 dan 7 Mei 1929, untuk memindahkan salah satu kelompok yang berkonflik ke pesisir pantai Sausapor yang disebut *Saporyabo* atau *Kandowai*. Turut dalam pemindahan ini adalah marga-marga Mirino, Yapen, Paraibabo dan satu keluarga Mambrasar.

STRUKTUR PEMERINTAHAN KOLONIAL BELANDA DI NEDERLANDS NIEUW GUINEA PADA 1898



Gambar 20. Struktur Pemerintahan Kolonial Belanda Di Nederlands Nieuw Guinea Pada 1898 (telah diolah kembali dari Besluit van Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indie, No. 19, 5 Februari 1898, Bundel Algemeene Secretarie; Staatsblad van Nederlandsch-Indie, No. 166 dan 310, 1898)

Warga pulau dua yang dipindahkan ke Saporyabo, selanjutnya membuat perkampungan baru. Tanggal 8 Juni 1929 mereka membangun rumah ibadah sederhana dibawa pimpinan guru Lauwrens Sarwa.

Selanjutnya Pendeta F. C. Kamma mengutus Nicolas Patipari asal Misol untuk bertugas di Sausapor dan membuka sekolah pada tahun 1932 (*menurut catatan bapak Agus Mofu*). Dengan berkembangnya penduduk wilayah pesisir Sausapor, di masa pelayanan Injil Nicolas Patipari, dalam tahun yang sama 1932, pemerintah Belanda menempatkan seorang petugas pemerintahnya di Sausapor bernama Tanor yang bertugas sebagai Juru Tulis (*Wawancara dengan Bapak Stevanus Mampioer (eks Juru tulis di Sausapor tahun 1959), Sausapor, 23 Mei 2013*).

Menuju kepada jemaat yang misionaris, dibentuklah Dewan Pos Pekabaran Injil Eltoto pada tanggal 5 Pebruari 1935 di Meosu (pulau dua). Tujuan dibentuknya Dewan Pos Pekabaran Injil Eltoto adalah mempersiapkan tenaga penginjil yang diambil dari sekolah rakyat kelas II dan kelas III, sebagai perintis bagi misi Pekabaran Injil di daratan tanah besar Karon (nama lain dari Sausapor). Hasil penginjilan yang dilakukan, menyebabkan banyak suku asli yang tinggal di pegunungan mulai turun ke pantai, untuk mendapatkan pendidikan. Hal ini berdampak pada peningkatan jumlah penduduk di Sausapor dan akses ke pedalaman. Itu sebabnya, pemerintah Belanda lalu membuka kantor Distrik di Sausapor pada tahun 1935, dan menugaskan Latumahina sebagai Bestuur pertama di Sausapor.

Memulai tugasnya sebagai Bestuur, Latumahina memerintahkan penduduk pulau dua, Werur dan sekitarnya untuk membangun beberapa infrastruktur pemerintah di kampung Sausapor. Bangunan yang dibangun adalah kantor Distrik, beberapa buah asrama dan bangunan sekolah yang juga dimanfaatkan untuk tempat ibadah. Setelah bangunan sekolah berdiri, sekolah yang ada di pulau dua ditutup dan dipindahkan ke Sausapor. Guru pengajar Yermia Pupelan, turut dipindahkan ke Sausapor, demikian pula dengan semua perabot sekolah. Kelas yang dibentuk di Sausapor adalah SR kelas I, II dan kelas III. Tahun 1938, Bestuur Latumahina dipindahkan dan digantikan oleh Bestuur Muaya asal Manado (*Wawancara dengan bapak Mozes Paribabo, Werwaf, 26 Mei 2013*).

E. Kehadiran Jepang di Vogelkop

Pada tahun 1940 Sebelum pendudukan pasukan Jepang di Papua, telah nampak adanya usaha mata-mata Jepang yang memanfaatkan bidang usaha swasta sebagai salah satu cara yang efektif untuk melihat pergerakan Belanda dan sekutu di Papua. Di Manokwari, ibu kota Noord Nieuw Guinea (Papua) terdapat sebuah kantor cabang dari suatu perusahaan Jepang yang bernama Nanyo Kohatsu Kabastiki Kaisha, perusahaan perkembangan daerah laut selatan yang bertindak sebagai perusahaan produksi, (*H. W. Bachtiar dalam Koentjaraningrat dkk, Irian Jaya Membangun Masyarakat Majemuk, Djambatan, hal. 67*). Tetapi kenyataannya wadah ini merupakan organisasi intelijen yang mempelajari situasi wilayah Papua untuk keperluan perang bagi Jepang. Pegawai perusahaan tersebut diberi perintah dari kantornya untuk mengadakan penyelidikan sumber-sumber pertambangan di bagian utara Nieuw Guinea, selain itu diberi tugas agar mencari daerah-daerah tanah yang subur dengan menggunakan penyelidikan botani sebagai alasan penelitiannya. Dengan demikian, terkumpul keterangan mengenai kemungkinan adanya ketersediaan bahan kebutuhan untuk kesatuan-kesatuan angkatan perang yang akan beraksi di wilayah Nieuw Guinea utara.

Pemerintah Hindia Belanda sebenarnya tidak berkehendak membiarkan perusahaan-perusahaan Jepang beroperasi di Papua, karena ada desas-desus yang berkembang di Jepang untuk menjadikan Papua sebagai tempat pemindahan penduduk yang berkelebihan di Jepang. Akan tetapi, Pemerintah Hindia Belanda harus menghadapi kenyataan bahwa perkembangan ekonomi di Papua tidak akan berjalan baik kalau tidak ada pengelolaan sumber daya alam oleh perusahaan-perusahaan yang membantu pemerintah. Akhirnya dengan terpaksa, pemerintah Hindia Belanda memberikan izin-izin operasi kepada orang-orang Jepang yang mendirikan tiga perusahaan perkebunan dan satu perusahaan pengolahan gopal di Nabire dan Waropen. Saat itu tercatat, Papua

menghasilkan 1/10 dari produksi gopal di seluruh dunia. Tercatat pada tahun 1938 perusahaan-perusahaan Jepang yang bergerak di Papua telah mempekerjakan kurang lebih 1. 100 pekerja orang asli Hindia Belanda (H. W. Bachtiar dalam *Koentjaraningrat dkk, Irian Jaya Membangun Masyarakat Majemuk, Djambatan, hal. 68*).

Jumlah tenaga kerja yang besar, menjadi kekuatan bagi Jepang untuk dengan mudah dan cepat mempersiapkan landasan pesawat terbang dalam perang dunia II. Terbukti, ketika tanggal 17 Desember 1941 pangkalan angkatan laut Amerika Serikat di Pearl Harbor Hawaii diserang oleh kesatuan-kesatuan angkatan laut Jepang, tiga daerah perkebunan Jepang di Papua dengan cepat langsung berubah fungsi menjadi lapangan terbang bagi pesawat tempur tentara Jepang.

Pada 1942 tentara Jepang memasuki Sorong dan mulai membangun basis pertahanan di daerah-daerah yang dianggap strategis seperti di Babo. Sausapor belum menjadi perhatian utama Jepang di Vogelkop, tentara Jepang datang ke Sausapor hanya untuk mengambil penduduk yang masih produktif untuk kerja paksa membangun lapangan terbang di Babo dan di Yefman Sorong. Itu sebabnya pos pertahanan Jepang di daerah Makbon dekat Sausapor, baru dibangun pada akhir 1943. Pada 1944 dari Makbon, tentara Jepang menyebar ke sepanjang pantai Kwor kampung Mga hingga Sausapor. Di Sausapor, Jepang membangun sebuah pos pertahanan di gunung Kwoka dan sebuah stasiun tongkang di Mar yang letaknya hanya 13mil (21 km) timur laut dari Sausapor. Stasiun tongkang di Mar, dijaga oleh sekitar 100 tentara Jepang (<http://en.wikipedia.org/wiki/Sausapor>). Diperkirakan jumlah tentara Jepang di Sausapor adalah 200-300 orang. Sikap tentara Jepang yang sering sewenang-wenang menyebabkan masyarakat lari dan tinggal di hutan. Mereka baru berani keluar ketika sekutu tiba di Sausapor dan menjamin keselamatan hidup mereka. (Wawancara dengan Cosmas Mambrasar, di Werur, 27 Mei 2013).

BAB IV

SAUSAPOR DALAM PERANG DUNIA II

A. Kehadiran Tentara Jepangdi Papua

Perang Dunia II di kawasan Asia Pasifik dimulai dengan serangan Jepang terhadap Pearl Harbor pada Minggu 8 Desember 1941. Serangan tersebut dilakukan Jepang untuk mewujudkan ambisinya menguasai seluruh Asia. Salah satu wilayah yang diidamkan Jepang adalah wilayah Hindia Belanda (Indonesia). Tujuan tentara Jepang menguasai Indonesia adalah untuk menguasai minyak dan karet.

Ketidakmampuan Belanda dalam menghadapi militer Jepang menyebabkan pemerintah Belanda di Jawa menyerah kepada pasukan Jepang pada 8 Maret 1942. Sebagai kelanjutan penyerahan kekuasaan kepada pemerintahan militer Jepang, diadakanlah Perundingan Kalijati pada 8 Maret 1942 antara pihak Belanda diwakili oleh Gubernur Jenderal Tjarda van Starkenborgh Stachouwer dan Panglima Tertinggi Angkatan Perang Belanda di Indonesia, Jenderal H. Terporten. Sementara dari pihak Jepang diwakili Jenderal Hitoshi Imamura. Naskah penyerahan kekuasaan dari pihak Belanda kepada pihak Jepang dikenal dengan Perjanjian Kalijati.

Dalam perundingan itu angkatan perang Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Oleh karena itu, sejak 8 Maret 1942 pihak yang berkuasa di Indonesia adalah pemerintah pendudukan Jepang. Sistem pemerintahan sipil yang diterapkan Belanda di Indonesia diganti dengan system pemerintahan militer Jepang. Pemerintahan militer

yaitu: (1) Pemerintahan Militer angkatan Darat (Tentara ke-25) untuk Sumatera dengan pusatnya di Bukit Tinggi; (2) Pemerintahan Militer Angkatan Darat (Tentara ke-16) untuk Jawa Madura dengan pusatnya di Jakarta; (3) Pemerintahan Militer Angkatan Laut (Armada Selatan Kedua) untuk daerah yang meliputi Sulawesi, Kalimantan dan Maluku dengan pusatnya di Makassar (Poesponegoro dan Notosutanto, 1990: 5). Pada waktu itu Papua merupakan salah satu karesidenan dari provinsi Maluku. Dengan demikian, Papua termasuk dalam wilayah kekuasaan Pemerintahan Militer Angkatan Laut.

Jauh sebelum Angkatan Perang Jepang menyerang Indonesia, perairan sekitar Papua telah sering dikunjungi oleh perahu-perahu penangkap ikan Jepang yang berada di perairan Indonesia tanpa izin pemerintah yang berwenang. Mereka mengabaikan hukum internasional, karena perahu-perahu tersebut sedang menjalankan misi yang harus dirahasiakan. Angkatan Laut Jepang menggunakan perahu-perahu penangkap ikan untuk mengumpulkan informasi tentang kedalaman laut, arus air, keadaan pantai, teluk-teluk berlindung, dan informasi lainnya yang berguna bagi aksi angkatan laut Jepang. Informasi yang dikumpulkan itu dicantumkan di atas peta sehingga dapat digunakan dalam merencanakan dan melaksanakan penyerangan atas Papua khususnya dan Indonesia umumnya. (Koentjaraningrat, dkk., 1963: 72).

Informasi yang diperoleh Jepang melalui para nelayannya dimanfaatkan untuk kepentingan pelaksanaan gagasan *nanshin-rod*, yaitu gerakan menuju ke daerah selatan. Daerah Selatan yang dimaksud Jepang adalah daerah tropis bagian tenggara dari Asia, yang meliputi Kepulauan Filipina, Hindia Timur Belanda yang meliputi Jawa, Borneo Barat, Sulawesi, Sumatera, Nusa Tenggara, Maluku, New Guinea, Borneo Inggris, Semenanjung Malaya, Siam, dan Indo Cina Perancis. Hal ini berarti konsep regional daerah Selatan sama dengan Asia Tenggara sekarang. Pemerintah Jepang menganggap wilayah itu paling penting untuk ekspansi ekonomi dan politik luar negeri Jepang sesudah Perang Dunia I.

Setelah Perang Dunia I, wilayah Asia Tenggara untuk pertama kalinya dianggap penting sebagai landasan untuk kebijakan mengenai sumber daya alam dan pasar seiring dengan perkembangan industri kimia berat Jepang. Menurut Jepang daerah Asia Tenggara mempunyai nilai penting dalam arti posisi geografisnya dan posisi ekonominya yang tidak boleh diremehkan sebagai sumber bahan mentah dan landasan untuk usaha Jepang di masa depan (Saya Shiraishi dan Takasi Shiraishi, 1998: 46-49). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa gagasan *nanshin-rod* merupakan suatu ide imperialisme yang akhirnya membuahkan kolonialisme Jepang di Asia Tenggara.

Dalam merealisasikan gagasan *nanshin-rod*-nya, Jepang harus berhadapan dengan bangsa Eropa dan Amerika yang telah lebih dahulu menguasai daerah yang menjadi incarannya itu. Daerah-daerah di sebelah selatan yang dikuasai oleh bangsa Eropa dan Amerika harus dibebaskan supaya kekayaan yang tersimpan di wilayah itu dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan Jepang yang makin lama makin meningkat (Koentjaraningrat dan Bachtiar, 1963: 72).

Ide pelaksanaan gagasan *nanshin-rod* di kalangan Angkatan Laut Jepang semakin meningkat terutama setelah Angkatan Darat Jepang memperoleh kemenangan di Manchuria dan Tiongkok. Militer Jepang melakukan persiapan agresi dengan baik dan rapi di daerah yang menjadi incarannya, termasuk Papua. Di Papua, Militer Jepang mengusahakan pembukaan cabang dari Nanyo Kohatsu Kabushiki Kaisha, perusahaan perkembangan daerah laut selatan yang bertindak sebagai perusahaan produksi, tetapi dalam kenyataannya merupakan organisasi mata-mata musuh. Para pegawai perusahaan itu diberi tugas tambahan untuk mengadakan penyelidikan sumber-sumber pertambangan di daerah bagian utara Papua. Pada 1940 kantor cabang di Manokwari diberi tugas untuk melakukan penyelidikan botani. Pemberian tugas itu dimaksudkan untuk mengumpulkan keterangan tentang kemungkinan-kemungkinan sumber bahan kebutuhan miter Jepang yang akan bertugas di Papua (Koentjaraningrat dan Harsja W. Bachtiar, 1963: 72).

Sebenarnya pemerintah kolonial Belanda tidak menyetujui akan kehadiran pengusaha Jepang di Papua, terutama karena adanya suara-suara di Jepang yang menganjurkan agar daerah Papua digunakan sebagai tempat penampungan kelebihan penduduk Jepang. Di lain pihak, pemerintah kolonial Belanda menghadapi kenyataan bahwa usaha pembangunan di Papua tidak mampu dilaksanakan sendiri karena kekurangan dana dan tenaga. Kondisi yang demikian, memaksa Belanda untuk memberikan izin kepada pengusaha-pengusaha Jepang untuk mendirikan tiga perusahaan perkebunan dan satu perusahaan gopal di Nabire dan Waropen. Pada 1938 perusahaan-perusahaan Jepang tersebut telah mempekerjakan 1100 orang Indonesia dan orang Papua dan telah menghasilkan sepersepuluh dari produksi gopal di seluruh dunia (Koentjaraningrat dan Harsja W. Bachtiar, 1963: 72). Selain para pengusaha Jepang yang bertugas sebagai mata-mata organisasi musuh, ada juga yang menyamar sebagai nelayan.

Pada 1933 orang-orang Jepang yang menyamar sebagai nelayan telah mengadakan penyelidikan di sekitar Teluk Yos Sudarso dan Teluk Yotefa. Seorang dari kolonis petani menulis sebagaimana dikutip oleh Siagian: “nampaknya Jepang mempunyai banyak rencana untuk New Guinea (Papua), kami telah melihat beberapa dari mereka juga di Depapre dan menurut orang Papua bahwa mereka telah melayari semua teluk-teluk dan sungai-sungai untuk melihat tanah” (Siagian, 1978: 166). Berdasarkan pernyataan dari kolonis petani tersebut, dapat diketahui bahwa jauh sebelum Perang Dunia II, Jepang telah melakukan penyelidikan terhadap daerah Papua.

Penyelidikan yang dilakukan Jepang di Papua merupakan bukti betapa hebatnya persiapan Jepang untuk Perang Dai To A mereka. Lebih kurang 10 tahun sebelum pecahnya Perang Pasifik, Jepang telah bersiap-siap menghadapi Perang Pasifik. Dengan persiapan perang yang begitu hebat tentunya Jepang merasa percaya diri untuk menyerang Pearl Harbour pada 7 Desember 1941 tanpa didahului pemakluman perang, tanpa mengindahkan hukum perang internasional.

Keberanian Jepang untuk menyerang Pearl Harbour tentu ada kaitannya dengan keberadaan Angkatan Perang Amerika di wilayah itu. Sebab, sebagian dari Angkatan Perang Amerika telah terikat di Eropa. Pertahanan terkuat Amerika di Timur Jauh letaknya di Hawaii, sehingga bila lokasi pertahanan itu dihancurkan berarti akan membutuhkan waktu yang lama untuk bangkit kembali. Sementara itu, Jepang telah selesai melakukan penyelidikan seluruh Timur Jauh dan akan menyusun pertahanan yang kuat, yang siap menantang serangan dari manapun berasal. Selain itu, taktik perang Jepang adalah dengan menyerang secara tiba-tiba. Serangan yang demikian terbukti dapat mengelabui Angkatan Laut Amerika. Ada dari antara Angkatan Laut Amerika yang berpendapat bahwa tembakan-tembakan dan bom-bom pertama dari Jepang merupakan kekeliruan yang dibuat Angkatan Udara Amerika dalam latihan-latihan (Siagian, 1978: 166=167). Bahkan di kalangan laksamana, kapten dan anak buah tentara Amerika timbul kekacauan pada malam gelap gulita di Pearl Harbour. Suatu waktu pihak Amerika tidak tahu apa mereka menembakkan meriam kearah musuh atau pada kapal sendiri (Ojong, 2001: 63).

Angkatan Perang Amerika baru menyadari adanya serangan dari Jepang setelah pesawat-pesawat tempur Jepang bergerak meninggalkan puing-puing reruntuhan Armada Asia Pasifik Amerika Serikat di Hawaii. Admiral E. Kimmel mengirim berita radio ke Washington dan ke semua kapal perang Amerika Serikat di lautan bahwa ada serangan udara di Pearl Harbour, dan bukan latihan perang (Manchester, 1989: 126).

Serangan Jepang ke Pearl Harbour telah menenggelamkan dan merusakkan delapan kapal tempur Angkatan Laut Amerika. Kapal tempur Amerika di Pearl Harbour dikaramkan oleh pesawat udara Jepang, ketika sedang berlabuh. Serangan Jepang di Pearl Harbour itu telah melenyapkan superioritas Armada Sekutu Inggris-Amerika di semua Samudera di dunia ini, kecuali Samudera Atlantik. Sesudah Pearl Harbour diserang Jepang, Filipina, Malaya, Australia, New Zealand,

Indonesia termasuk Papua terbuka bagi serangan Jepang (Ojong, 2001, hal. 1-2).

Siasat perang yang ditempuh Jepang tersebut membawa dampak baik bagi armada laut Jepang dalam upaya menduduki Papua. Jepang berhasil menduduki Papua pada 19 April 1942. Bulan April adalah waktu laut Jayapura lautnya tenang tanpa gelombang. Dalam kondisi yang demikian, armada laut Jepang masuk dan berlabuh di Teluk Imbi dengan tenang, tanpa mendapat perlawanan dari penduduk setempat (Mampiopir, 1972: 12).

Setelah armada laut Jepang memastikan bahwa Jayapura merupakan pangkalan laut yang cukup baik dan strategis, pada 6 Mei 1942 berlabuhlah dua buah kapal perang angkatan laut Jepang dan mendaratkan pasukan mariner untuk menetap di Jayapura. Tiga bulan kemudian yaitu bulan Agustus 1942 pasukan marinir itu diperkuat lagi dengan pasukan infantri Angkatan Darat (Mampiopir, 1972: 12). Dengan demikian, Jayapura dijadikan sebagai pangkalan pertahanan Jepang terbesar di Papua selama Perang Pasifik dan sebagai satu-satunya pusat perbekalan yang terbesar dan terkaya dari balatentara Jepang di seluruh wilayah pasifik (Galis dan Doornik, 1960: 27-28).

Langkah Jepang selanjutnya dalam menghadapi Perang Pasifik, Jepang membangun sarana dan prasarana guna kepentingan perang. Di Jayapura Jepang membangun lapangan terbang di Sentani dan Tami. Pembangunan lapangan terbang itu mengerahkan tenaga *romusya-heiho* dan penduduk setempat. Penduduk setempat dipaksa untuk bekerja tanpa diberi makanan yang cukup dan bagi orang yang melawan akan mendapat hukuman yang berat seperti: hukum cambuk bahkan ada yang sampai dibunuh. Penderitaan yang dialami penduduk setempat, kelak membuat orang Papua bersedia bekerja sama dengan tentara Sekutu untuk melawan Jepang. Dengan selesainya pembangunan lapangan-lapangan terbang Sentani-Tami-Wakde, Jayapura dijadikan markas besar dari Pangkalan Angkatan Udara IV dan Divisi Udara IV dan Pangkalan Utama Perlengkapan (Mampiopir, 1972: 169). Di Sarmi, basis

pertahanan Jepang dipusatkan di Pulau Wakde dengan membangun sebuah lapangan udara, jalan, jembatan dan benteng pertahanan.

Setelah Jepang berhasil menduduki Jayapura, Angkatan Perang Jepang mengadakan invasi ke daerah Papua lainnya antara lain: Biak Numfor, Yapen Waropen, dan Manokwari pada 11 Mei 1942. Pulau Biak dijadikan tempat pendudukan militer Jepang dan pusat pertahanan Jepang setelah Jayapura. Oleh karena itu, pemerintah militer Jepang membangun lapangan terbang di Biak yang akan dijadikan sebagai tempat pendaratan pesawat-pesawat Jepang. Taktik perang lainnya yang ditempuh Jepang adalah memasang meriam yang dipersiapkan untuk menghadang serangan pasukan Sekutu baik melalui laut maupun udara. Alasan Jepang memilih Biak sebagai sasaran pendaratan juga karena Biak merupakan Pulau Karang yang berbentuk batu-batuan keras dan memiliki gua-gua yang sangat cocok sebagai tempat persembunyian ketika berhadapan dengan musuh dan juga bisa dijadikan sebagai tempat menyimpan logistik. Ini berarti gua-gua tersebut sangat berperan sekali bagi tentara Jepang untuk mempertahankan kedudukannya di Biak Numfor. Selain itu, karena letak Biak yang berada di antara barat dan timur Pulau Papua sehingga Jepang dapat mengamati dan menghalau pasukan Sekutu yang menyerang baik dari arah barat maupun timur (Mampiopir, 1972: 169-170).

Dalam rangka meningkatkan pertahanannya menghadapi tentara Sekutu di Papua, Jepang juga membangun prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam perang di Sorong-Doom. Di Pulau Doom, Jepang membangun lorong-lorong di bawah tanah pada masa Perang Dunia II. Lorong-lorong tersebut menghubungkan beberapa titik bunker pertahanan udara tentara Jepang dan menghubungkan infrastruktur vital seperti pelabuhan laut. Sisa bunker pertahanan udara masih dapat ditemukan di rumah penduduk di Distrik Doom.

Menurut Agus Malak bahwa tentara Jepang yang menduduki Kota Sorong-Doom meluaskan invasinya ke wilayah Sausapor dan sekitarnya. Agus Malak menceritakan kembali penuturan orang tuanya tentang

kehadiran tentara Jepang di Sausapor yang menyebabkan penduduk di Sausapor dan sekitarnya melarikan diri ke hutan. Penduduk Sausapor dan sekitarnya terpaksa melarikan diri ke hutan karena tentara Jepang memaksa penduduk untuk melakukan pekerjaan yang tidak pernah dilakukan sebelumnya. Misalnya, penduduk dipaksa untuk membangun *base camp* untuk kepentingan tentara Jepang. Sebelum kehadiran tentara Jepang, penduduk Kampung Mega telah bermukim di perkampungan yang ditunjuk oleh pemerintah kolonial Belanda yaitu di Kampung Mega, yang letaknya dekat ke pantai dan dekat dengan sarana pendidikan dan kesehatan. Namun, ketika Jepang tiba di wilayah itu, anak-anak sekolah terpaksa meninggalkan bangku sekolah, karena mengikuti orang tuanya lari ke hutan-hutan yang tidak dapat dijangkau oleh tentara Jepang. (wawancara dengan Agus Malak di Kampung Mega, Distrik Sausapor pada 22 Mei 2013).

B. Reaksi Masyarakat Papua Terhadap Kehadiran Tentara Jepang

Kehadiran Jepang di Papua berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat Papua. Sebagaimana di daerah Indonesia lainnya masa pendudukan Jepang merupakan puncak penderitaan bagi penduduk Papua. Bersama-sama dengan tenaga *romusya*, penduduk Papua dipaksa bekerja untuk membangun lapangan terbang dan jalan-jalan untuk pertahanan Perang Dai To A atau Asia Timur Raya (Siagian, 1978: 171).

Tentara Jepang melakukan teror untuk menakut-nakuti penduduk setempat untuk tidak melakukan perlawanan kepada tentara Jepang (Siagian, 1978: 171). Penduduk Papua dipaksa bekerja dengan cara disiplin tentara. Tanah-tanah dan hak-hak adat harus diserahkan kepada tentara untuk dibuka jalan raya, dan kota tanpa ganti rugi. Masyarakat dipaksa mengumpulkan sagu dan hasil-hasil bumi lainnya untuk selanjutnya diserahkan kepada tentara Jepang untuk kepentingan perang. Masyarakat tidak bebas bergerak dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Akibatnya, penduduk setempat tidak mampu memenuhi

kebutuhan dasar keluarganya. Penduduk Papua dipaksa membangun jalan raya Jayapura-PIM-Sentani. Selain itu, dalam waktu singkat masyarakat dipaksa membangun lapangan terbang di Sentani agar bisa pesawat udara Jepang mendarat di lapangan terbang itu. Tidak lama kemudian pesawat Jepang mendarat dan Jepang menempatkan 350 buah pesawat terbang jenis sero di Sentani. Di sekitar lapangan terbang Sentani, Doyo, dan Jayapura, Jepang menempatkan meriam-meriam penangkis udara yang cukup mendahsyatkan (Mampiopir, 1972: 12-13).

Pekerjaan lainnya yang harus dikerjakan masyarakat Papua untuk kepentingan perang Jepang adalah membangun jembatan-jembatan di pantai Teluk Imbi, PIM, dan Kota Baru, pantai Hamadi, A. P. O. Di pantai PIM dan Kota Baru dibangun gudang-gudang perbekalan makanan, amunisi, dan perlengkapan lainnya untuk Angkatan Perang Jepang, khususnya Armada VIII dan IX dalam Perang Pasifik. Perbekalan Jepang tersebut masih dapat disaksikan oleh Sekutu Amerika ketika pendaratannya di Hollandia (Jayapura). Menurut tentara Sekutu, perbekalan Jepang di Jayapura merupakan satu-satunya pusat perbekalan yang terbesar dan terkaya dari tentara Jepang pada Perang Pasifik (Mampiopir, 1972: 13).

Tentunya dapat dibayangkan bagaimana penderitaan penduduk Papua melakukan semua pekerjaan kasar yang tidak biasa dilakoninya demi menopang gerak mesin perang Jepang. Tentara Jepang terkenal dengan kebengisannya, yang tanpa *tedeng aling-aling* memaksa penduduk setempat untuk mengerjakan semua pekerjaan yang membantu Jepang dalam memenangkan perang melawan tentara Sekutu. Jika masyarakat melakukan kesalahan maka tentara Jepang akan melakukan penyiksaan secara bengis di luar batas peri kemanusiaan. Hal ini dapat diketahui dari penuturan Nikolas Haudure yang menyatakan bahwa penduduk dipaksa bekerja mulai dari pagi hingga sore tanpa diberi makanan dan perawatan yang cukup dan kadang diberlakukan hukuman potong jari, jika masyarakat tidak bekerja dengan baik (Laporan KKL Mahasiswa Program Studi Sejarah, 2005: 38).

Kebengisan tentara Jepang juga dapat diketahui dari penuturan Yonian Awye bahwa dalam usahanya untuk memperkuat basis pertahanan Jepang di Sarmi, Jepang tidak hanya membangun lapangan udara, tetapi juga membangun jalan, jembatan dan benteng pertahanan. Untuk melakukan pekerjaan pembangunan itu, Jepang memaksa penduduk setempat (seperti dari Sawar, Bagaiserwar, Holmafen bahkan dari luar Sarmi seperti Bonggo, Mamberamo, dan Tanah Merah) bekerja tanpa upah, bahkan tidak diberi makan, sehingga mereka terpaksa harus mencari makan sendiri. Jika ada orang yang malas bekerja, maka akan dihukum cambuk atau dibunuh oleh tentara Jepang (Laporan KKL Mahasiswa Program Studi Sejarah, 2005: 38).

Perlakuan bengis dari tentara Jepang juga dialami penduduk Papua di Pulau Biak. Hal ini dapat diketahui dari penuturan Moses Yawan bahwa pada masa pendudukan Jepang di Biak, hampir semua sektor kehidupan mengalami kekacauan. Kesejahteraan rakyat tidak diperhatikan, sehingga masyarakat hidup menderita. Akibat kekejaman, kelaliman, keganasan tentara Jepang menimbulkan rasa benci di hati penduduk Pulau Biak. Luapan kebencian penduduk terhadap perlakuan tentara Jepang mengakibatkan munculnya kembali gerakan Manseren, yang pada masa pemerintahan kolonial Belanda telah ditindas. Pada dasarnya gerakan Manseren menolak hubungan yang datang dari luar yang dapat menggagalkan terciptanya suatu dunia bahagia. Di Biak gerakan ini disebut Koreri ataupun perintis jalan dari Manseren-Mangundi atau Tuhan pelepas yang akan datang ke dunia untuk kedua kalinya. Saat Manseren tiba ditandai oleh krisis dunia. Dalam dunia baru itu, tidak ada lagi kekurangan makanan, penyakit, kesusahan atau penderitaan. Untuk menyambut kedatangan Manseren Mangundi perlu dibuat suatu perahu raksasa yang akan membawa pengikutnya ke perahu surga (Laporan KKL Mahasiswa Program Studi Sejarah, 2002: 28).

Aksi-aksi pemberontakan penduduk Biak hanya merupakan serangan-serangan yang tidak teratur dan berupa perampasan ke toko-

toko Cina dan ke desa-desa orang Papua sendiri. Pemberontakan tersebut mengakibatkan tentara Jepang semakin bertindak keras terhadap para pemberontak di daerah Biak dan melakukan pembersihan terhadap orang yang terlibat dalam pemberontakan tersebut. Pemberontakan yang dilakukan penduduk Pulau Biak berhasil ditindas tentara Jepang dengan bantuan para pegawai yang berasal dari daerah Maluku dan daerah-daerah lainnya dari Indonesia. Keikutsertaan para pegawai dalam upaya pembersihan para pemberontak tidak terlepas dari kepentingannya untuk mempertahankan kedudukannya. Namun, keikutsertaan para pegawai tersebut telah meninggalkan kesan kurang baik di hati penduduk yang bermukim di Kepulauan Teluk Cenderawasih (Laporan KKL Mahasiswa Program Studi Sejarah, 2002: 28).

Kekejaman tentara Jepang dirasakan juga oleh penduduk Pulau Yapen. Kekejaman tentara Jepang melahirkan gerakan Manseren-Mangundi dibawah pimpinan Nimrod dari Kampung Randawaja di Pulau Yapen. Jepang menjatuhkan hukuman tembak mati kepada Nimrod di lapangan terbuka yaitu lapangan sepak bola Serui. Nimrod dijatuhi hukuman mati karena Jepang menganggap Nimrod telah menganggu keamanan dan ketertiban (Siagian, 1978: 170-172).

Jika gerakan Koreri muncul di Biak sebagai reaksi penduduk terhadap kekejaman Jepang, maka di Jayapura muncul pula gerakan kebatinan sebagai reaksi masyarakat untuk menentang kehadiran tentara Jepang di Jayapura. Keterbatasan ilmu pengetahuan masyarakat mengakibatkan reaksi yang ditampilkan masyarakat adalah kembali pada nilai-nilai asli budayanya, yang antara lain mengajarkan tentang akan datangnya seorang "Mesias" (Penolong). Fenomena seperti ini biasanya terjadi ketika kondisi disorientasi dialami masyarakat. Kondisi disorientasi dialami penduduk Papua dalam perjumpaannya dengan tentara Jepang yang memiliki peralatan perang yang berteknologi tinggi seperti senjata api, pesawat tempur, kapal perang. Sedangkan penduduk Papua hanya bersenjatakan panah. Dalam kondisi yang demikian, tentara Jepang

memperlakukan penduduk Papua secara tidak manusiawi (Siagian, 1978: 170-172).

Di sekitar Jayapura yaitu di Depapre, dikenal sebagai kampung yang suka membangkang tentara Jepang. Pusat perlawanan penduduk Depapre adalah di Tablanusu. Gerakan ini dipimpin oleh Simson yang mengatakan bahwa menganut Agama Kristen berarti menjadi kebal dan akan mendapat kebahagiaan sebab itu tidak usah bekerja lagi. Dalam dokumen tentara Jepang ada tertera bahwa *korano-korano* dari daerah Depapre mengeluarkan pernyataan bahwa Jepang tidak berhak memaksa penduduk Depapre untuk melakukan kerja paksa, bahkan bila tentara Jepang memasuki kampung-kampung mereka, tentara Jepang harus taat kepada *korano*. Akibatnya Simson ditangkap dan dibunuh (Siagian, 1978: 170-172).

Sementara di Paniai, kebencian penduduk Paniai terhadap tentara Jepang dapat diketahui dari seremoni "*kami*", ritus untuk mendatangkan hujan. Dalam seremoni itu, babi dipanah karena babi dianggap pemusnah ubi rambat. Namun panah yang meluncur dari busur tidak membuat babi mati. Waekebo pergi ke sisi babi itu sambil mengatakan kau adalah orang Jepang, ada seorang Jepang di dalam tubuhmu, kau adalah bangsat. Kemudian dia melepaskan panah untuk kedua kalinya yang mengakibatkan babi itu segera mati. Dalam seremoni itu, babi disimbolkan sebagai orang Jepang. Hal ini membuktikan betapa bencinya penduduk Papua terhadap tentara Jepang (Siagian, 1978: 173-174).

Kebencian penduduk Sausapor dan sekitarnya terhadap tentara Jepang dibuktikan dengan ketidaksudiannya bertemu dengan tentara Jepang. Pada awal kehadiran tentara Jepang di Sausapor dan sekitarnya, penduduk wilayah itu melarikan diri ke hutan. Tentara Jepang memaksa penduduk di wilayah itu terutama kaum laki-laki untuk melakukan kerja rodi. Tentara Jepang juga mengambil bahan makanan penduduk tanpa memberikan ganti rugi. Perlakuan Jepang tersebut menyebabkan mereka menghindari tentara Jepang dengan cara meninggalkan kampungnya dan masuk ke hutan. Mereka kembali ke kampung halamannya setelah

tentara Sekutu tiba di wilayah itu (wawancara dengan Agus Mofu di Sausapor, pada 22 Mei 2013).

C. Pendaratan Sekutudi Papua

Sebelum pendaratan tentara Amerika dan Sekutu-sekutunya di Jayapura, pada 30, 31 Maret, 3, 5, 12 dan 16 April 1944, terjadilah serangan bom yang cukup dahsyat dan mematahkan semangat serta pertahanan Jepang di Jayapura dan sekitarnya oleh Amerika. Sasaran serangan diprioritaskan terhadap lapangan udara Sentani, pesawat-pesawat tempur Jepang, pusat-pusat perbekalan dan pertahanan Jepang. Setelah pendaratan tentara Sekutu pada April 1944 ditemukan 340 buah rangka pesawat terbang Jepang yang rusak dan tinggal di tempat, sedangkan 50 buah lainnya diperkirakan mengadakan pertempuran di udara kemudian jatuh di hutan rimba (Mampiopir, 1972: 16).

Selain di Jayapura, tentara Sekutu juga melakukan pengeboman di Sarmi, Depapre pada akhir Maret dan awal April 1944. Serbuan tentara Sekutu atas Jayapura menandai berakhirnya pendudukan Jepang di Papua, yang mencapai puncaknya pada 22 April 1944. Kepastian tentara Sekutu mengadakan pendaratan di beberapa tempat di Jayapura telah ditetapkan dalam perundingan di Markas Besar Sekutu di Brisbane, Australia pada 3 Maret 1944 yang juga dihadiri oleh Komandan Pasukan South Pasifik Area dan Komandan Pasukan South West Pasifik Area. Sekutu akan merebut Jayapura dengan membiarkan semua pertahanan Jepang di sepanjang pantai Teluk Hansa Wewak. Strategi perang inilah yang terkenal dengan "*From island to island*" ataupun *island hopping* (loncat katak). Dengan strategi ini, Jenderal Mac Arthur mengisolasi tentara Jepang yang bertahan di antara tempat-tempat yang direbutnya, tanpa perbekalan, tanpa hubungan dengan induk pasukan yang sudah dimusnahkan, dan harus berjuang sendiri-sendiri untuk bertahan. Tentara Jepang tidak mampu bertahan, karena disiplin tentara Jepang sebagai *cadaper-disiplin* atau disiplin baja-disiplin membabi buta yang

hanya bergerak sebagai mesin bila digerakkan pengemudinya (Siagian, 1978: 179).

Strategi pendaratan tentara Sekutu di Jayapura dibagi menjadi dua daerah pendaratan. Adapun kedua daerah pendaratan dimaksud adalah pertama daerah Teluk tanah Merah (Depapre) dan kedua, daerah Teluk Humboldt (Hamadi) sebagai "*Nijptangbeweing*" atau gerakan tank yang akan menjepit pusat kekuatan udara Jepang terbesar di Asia Tenggara yaitu di Sentani (Siagian, 1978: 181).

Pendaratan tentara Sekutu di Teluk Tanah Merah dinamakan operasi "*Reckless*" atau nekad, karena kondisi geografis medan yang dihadapi tidak seperti yang diperkirakan. Oleh karena itu, tentara Sekutu harus mencari informasi secara langsung dan cepat. Komandan Angkatan Laut Amerika Letkol. B. D. Clagett beserta pasukan dari Australia yang dipimpin oleh Letnan G. C. Harris Ran mendarat di pantai dekat Teluk Tanah Merah untuk mencari informasi tentang daerah tersebut. Kehadiran mereka disambut baik oleh penduduk setempat, namun informasi yang mereka butuhkan ternyata sulit diperoleh. Kesulitan untuk memperoleh informasi dimaksud karena sebelumnya daerah itu telah dikuasai Jepang, sehingga mereka harus berhadapan dengan tentara Jepang. Mereka diserang oleh pasukan Jepang dan empat orang dari pasukan Sekutu itu terbunuh termasuk G. C. Harris Ran, sedangkan sebagian dari pasukan itu melarikan diri ke hutan (Morison, 1960: 75).

Untuk mencari informasi tentang daerah yang dikunjungi, tentara Sekutu memanfaatkan hasil foto udara. Berdasarkan foto udara itu, tentara Sekutu menemukan dua daerah pantai yang baik di Teluk Tanah Merah untuk digunakan pendaratan. Kedua daerah dimaksud diberi nama "*Red Beach I*" atau Pantai Merah I yang terletak di bagian kepala teluk yaitu teluk yang kecil dan sempit dengan koral dan tanah yang berbukit dan *Red Beach II* atau pantai Merah II yang terletak di sebelah timur Teluk Tanah Merah. Panjangnya kurang lebih 800 m terdiri dari daratan yang berpasir dengan luas sekitar 1500m sampai ke daerah pedalaman (Morison, 1960: 75-77).

Meskipun tentara Sekutu tidak memperoleh data yang sesuai dengan keinginannya, akan tetapi rencana operasi tetap berjalan yaitu pembangunan basis pertahanan dan pembuatan jalan menuju Sentani untuk melakukan penyerangan terhadap pasukan Jepang yang menguasai lapangan udara Sentani sebagai pangkalan udaranya. Pada 22 April 1944 pukul 05.00 WIT, Pasukan Sekutu mulai melakukan pendaratan. Pasukan Sekutu dipimpin oleh Laksamana Barbeys yang tiba di pesisir Red Beach I, disusul Laksamana Crutchley dengan peralatannya seperti senjata-senjata mesin Australia dan tujuh buah kapal penghancur AS melakukan pengeboman di sepanjang Teluk Depapre. Pasukan Sekutu yang diturunkan Red Beach II terdiri atas dua resimen yang meliputi 24 Divisi, yang dilakukan dalam tujuh gelombang pendaratan. Bersama dengan pendaratan itu diturunkan pula berbagai peralatan perang seperti kendaraan lapis baja, tank-tank, senjata api udara dan senjata 155 MM ditambah kapal-kapal perang yang berlabuh. Selain itu, diturunkan pula peralatan serta fasilitas lainnya yang tidak dapat diturunkan di Red Beach I dari kapal pengangkut seperti pipa-pipa saluran, tanki-tanki serta peralatan lainnya (Morison, 1960: 78).

Armada pendaratan Sekutu dipimpin oleh Pemimpin Markas Besar Jenderal Wichelberger. Hingga pukul 19.30 WIT, Jenderal Irving mengambil alih Komando Angkatan Darat, kemudian membuat perubahan secepatnya atas rencana semula di Red Beach I dan menurunkan satu Batalion Infantry yang berhasil dengan baik. Setelah semuanya berjalan lancar, Sekutu mendirikan markasnya di Red Beach I dan Red Beach II. Pada pukul 13.20 WIT Jenderal Douglas Mac Arthur tiba di tepi pantai Teluk Tanah Merah dengan menggunakan kapal penjelajah Nashville dan disambut oleh Jenderal Eichelberger dan Laksamana Barbeys. Selama satu jam melakukan inspeksi untuk melihat kemajuan dan kendala apa saja yang dihadapi oleh Jenderal Irving di Depapre, selanjutnya ia kembali ke kapal dan meninggalkan Teluk Tanah Merah (Morison, 1960: 78).

Pendaratan tentara Sekutu yang dilakukan di Teluk Humbold juga terbagi dua tempat pendaratan yang diberi nama White Beach I di Teluk Yos Sudarso dan White Beach II di Teluk Yotefa. Pendaratan Sekutu di Teluk Humbold dilakukan bersamaan dengan pendaratan di Teluk Tanah Merah yaitu pada 22 April 1944, kemudian melakukan penyerangan menuju Sentani (Siagian, 1978: 180).

Setelah tentara Sekutu berhasil mengalahkan Jepang di Jayapura, pada 6 Juni 1944 operasi telah dianggap selesai. Jenderal Mac Arthur menjadikan Papua sebagai:

- 1) Markas Besar Area Pasifik Barat Daya
- 2) Pusat Angkatan Udara
- 3) Armada ke VI
- 4) Armada ke VII
- 5) Pasukan ke VIII Amerika Serikat (Siagian, 1978: 191).

Setelah pasukan Sekutu berhasil menduduki Jayapura dan Sentani pada 17 Juli 1944, pasukan Sekutu menyerang pangkalan udara di Pulau Wakde sebuah pulau kecil di depan muara Sarmi. Menurut Mac Arthur, pangkalan Jepang di Wakde dapat dijadikan basis lompatan serangan berikutnya ke pertahanan Jepang di Maffin. Dalam penyerbuan Sekutu ke Sarmi, sisa-sisa tentara Jepang melarikan diri ke hutan guna menyelamatkan diri. Masyarakat Sarmi diperintahkan oleh tentara Sekutu untuk membunuh tentara Jepang yang melarikan diri ke hutan. Bila mereka berhasil membunuh tentara Jepang, telinganya dipotong kemudian ditusuk dan diberikan kepada tentara Sekutu. Sebagai upah bagi mereka yang berhasil memotong telinga tentara Jepang, tentara Sekutu akan memberikan senjata. Tentara Sekutu bergerilya melawan tentara Jepang mulai dari Teluk Tanah Merah, Pulau Wakde Sarmi, Biak sampai terakhir di Sausapor pada 30 Juli 1944 (Soedharto, 1998: 221).

D. Kehadiran Tentara Sekutu di Sausapor

Kehadiran tentara Sekutu di Sausapor tidak terlepas dari strategi perang MacArthur dalam Perang Dunia II yaitu strategi “loncat katak” (*Island hopping*). Sikap tegas MacArthur yang tetap mempertahankan strategi perangnya untuk melewati Papua, Filipina dan akhirnya tiba di Tokyo, dinyatakan dalam memoarnya bahwa invasi [Holandia](#) menandai sebuah perubahan besar dalam tempo serangan saya ke arah barat. Serangan-serangan berikutnya terhadap [Wakde](#), [Biak](#), [Noemfoor](#), dan [Sansapor](#) dilaksanakan dalam urutan yang cepat, dan tak seperti kampanye sebelumnya, saya tak berupaya untuk menyelesaikan seluruh fase dari sebuah operasi terlebih dulu sebelum bergerak menuju sasaran berikutnya (*Pertempuran Numfor. htm*). Berdasarkan pernyataan MacArthur dalam memoarnya itu, dapat diketahui bahwa invasi tentara Sekutu ke Sausapor merupakan tindak lanjut dari strategi perangnya untuk mengalahkan tentara Jepang.

Sausapor sebagai batu loncatan menuju Tokyo didasarkan oleh keterangan Letnan Lloyd V Young yang pada tanggal 17 Juni 1944, S-47 di bawah pimpinannya berlayar dari Kepulauan Admiralty menuju Waigeo untuk membantu proses pemulihan fasilitas minyak mentah di Hindia Belanda. Namun, karena tidak adanya tempat pendaratan yang cocok, maka Letnan Lloyd V Young mengalihkan pendaratannya 55 mil (89 km) timur laut dari Sorong. Ia mendarat di dekat Sausapor pada tanggal 23 Juni 1944 dan menghabiskan waktunya untuk melakukan survey wilayah. Hasil surveynya menyatakan bahwa Sausapor memiliki posisi yang baik dan pantai yang datar, sehingga cocok dijadikan sebagai lokasi pendaratan yang ideal (<http://en.wikipedia.org/wiki/Sansapor>). Selain itu, Sekutu memang membutuhkan sebuah lapangan terbang antara Gelvin Bay dan Halmahera untuk melemahkan kekuatan Jepang di Halmahera untuk melanjutkan misi selanjutnya ke Morotai dan Filipina.



Gambar 21. Amphibi antri di pulau salomon untuk diberangkatkan ke Sausapor
Sumber:<http://www.owensarchive.com/world-war-ii-9/pacific-theater-160/new-guinea-australia-347/>

Pencarian lokasi mulai dilakukan di Waigeo dan Vogelkop. Di Waigeo, tidak ada lokasi bekas lapangan terbang, sehingga tidak dapat digunakan untuk pendaratan pesawat-pesawat sekutu. Satu-satunya lokasi hanyalah di Vogelkop. Sebuah kapal selam pengintai dikirim awal Juli dan berhasil mengidentifikasi bahwa *Cape Sausapor* merupakan pantai yang baik, walaupun tidak ada bekas landasan pesawat terbang disana. Untuk memastikan baik tidaknya *cape Sausapor*, pesawat B-25 terbang rendah diatas Sausapor. Keterangan yang dihasilkan justru memperlihatkan keterkesanan para pilot terhadap dua lokasi di Sausapor yang potensial untuk dijadikan lapangan terbang yaitu di lepas pantai Midelburg dan Opmarai. Karena itu, pada tanggal 14 Juli 1944 malam hari, Letkol HG Woodbury mendarat dengan perahu di Sausapor dan melakukan pengintaian dengan menjelajahi medan antara Cape Sausapor dan Opmarai untuk melihat kemungkinan membangun lapangan udara di tempat ini (<http://www.ibiblio.org/hyperwar/AAF/IV/AAF-IV-19.html>).

Pada tanggal 27 Juli 1944, kembali sekutu mengirim 6 orang mata-mata ke Sausapor. Mereka mendarat di tepi pantai Werur. Keenam mata-mata tersebut lalu disebar untuk melihat kondisi riil yang ada. Salah seorang mata-mata bernama Deki Spafor seorang mata-mata sekutu asal Belanda, berhasil bertemu masyarakat Mar yang sebelumnya sudah lari mengungsi ke balik bukit di belakang kampung Werur. Masyarakat yang takut, awalnya ingin melarikan diri, namun Mr. Deki memanggil kembali penduduk yang bersiap-siap untuk melarikan diri. Beliau mengatakan “Jangan takut, tanggal 30 Juli 1944 sekutu mendarat di Werur”. (*Wawancara dengan bapak Mozes Parebabo, Werwaf 26 Mei 2013-06-13*)

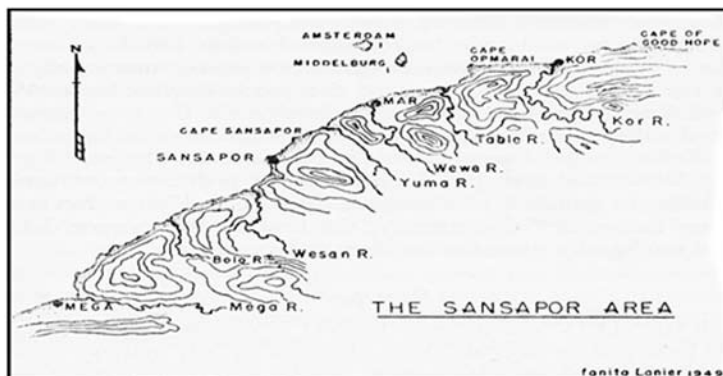
Untuk mempersiapkan pendaratan di Sausapor, Alamo menyiapkan Satuan Tugas Typhoon di bawah komando Mayor Jenderal Franklin C. Sibert dan ditugaskan Divisi Infanteri ke-6 (mines RCT-20 yang menjadi cadangan di Toem), pelengkap berat unit AA, dan satu setengah batalyon insinyur untuk membantu misi tersebut. Kekuatan satuan tugas Typhoon, diangkut oleh TF 77 dari Toem (Numfor), dan direncanakan akan mendarat di sekitar *Cape Opmarai* pada tanggal 30 Juli pukul 07.00 Wit, dan selanjutnya menguasai *Cape Sausapor*, *Middelburg*, dan *Amsterdam* (<http://www.ibiblio.org/hyperwar/AAF/IV/AAF-IV-19.html>).

Guna mendukung operasi ini, sekutu mengalihkan perhatian Jepang dari operasi pendaratan sekutu di Sausapor. Pesawat Amerika menyerang Kepulauan Palau dan Halmahera, sehingga pendaratan di Sausapor tidak diketahui oleh satu unit pleton penghubung Jepang yang ada di Sausapor. Sementara Unit Divisi ke-35 dan Amfibi Brigade 2d Jepang, di Sorong, tidak dapat bergerak melawan kekuatan sekutu karena kekurangan kapal pendarat dan jumlah kekuatan tempurnya yang hanya beberapa ratus tentara saja, padahal jarak antara Sausapor dan Sorong hanya 65 mil. (<http://www.history.army.mil/books/wwii/MacArthur%20Reports/MacArthur%20V2%20P1/ch10.htm#p303>)



Gambar 22. Pasukan sekutu menuju Sausapor
(Sumber: http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Sansapor)

Rencana semula bahwa pendaratan dilakukan pada pukul 07. 00 pagi, rupanya maju lebih awal dari yang direncanakan. Pada tanggal 30 Juli 1944 pukul 05. 00 Wit pagi, Bastian Parebabo (ayah Mozes Parebabo) keluar dari hutan menuju pantai Werur. Ia ingin membuktikan perkataan Mr. Deki. Setelah ia tiba di pantai, ia melihat sudah ada pendaratan tentara Sekutu dari unsur Divisi Infanteri ke-6 Angkatan Darat Amerika Serikat yang begitu banyak di Opmarai, Pulau Midelburg, dan Pulau Amsterdam. Mereka menggunakan *landen* dan dikawal oleh kapal induk. Kapal-kapal Sekutu mengangkut tentara dan segala perlengkapannya, termasuk alat-alat berat untuk pengerjaan landasan. Kurang lebih 20 ribu orang tentara sekutu saat itu. mereka terbagi atas \pm 14 ribu Khatolik dan \pm 15 ribu Protestan dan terdiri dari orang kulit putih dan kulit hitam (negro). (Wawancara dengan Cosmos Mambrasar . Werur, 27 Mei 2013).



Gambar 23. Peta Daerah Sausapor masa Perang Dunia II. Sumber : <http://www.triblio.org/hyperwar/AAF/IV/AAF-IV-19.htm>

Tepat pukul 06.00 Wit pagi tanggal 30 Juli 1944, tentara sekutu mulai bekerja membuat jalan, mulai dari Honai (kali Wenai/Wewe) sampai Batu Kapal. Dilanjutkan dengan pembangunan landasan pesawat terbang dan stasiun radar di Mar. Pembangunan dilakukan sepenuhnya oleh tentara sekutu tanpa melibatkan masyarakat. Di Opmarei hingga Mar, dibangun landasan pesawat terbang untuk pesawat B-25, sementara pembangunan landasan di pulau Miderburg, diperuntukkan bagi pesawat tempur. Pembangunan landasan pesawat ini hanya memakan waktu satu hari, karena kekesokan harinya tanggal 31 Juli 1944, landasan ini sudah digunakan dengan mendaratnya pesawat pembom B-25 di Mar dan pesawat tempur P-38 di Middelburg.



Gambar 24. Lapangan terbang Opmarai-Mar di Sausapor masa Perang Dunia II
http://ww2db.com/image.php?image_id=11682



Gambar 25. Alat perang milik sekutu yang ditanam didalam tanah.
http://ww2db.com/image.php?image_id=11682



Gambar 26. B-25 Mitchell bombers of 42nd Bomber Group, US 69th Bomber squadron at Cape Sansapor New Guinea, sep 1944-feb 1945, sumber :http://ww2db.com/image.php?image_id=11682



Gambar 27. Pesawat P-38 di Middelburg
Sumber: <http://www.pacificwrecks.com/>

Pertempuran Sausapor dikenal dengan nama “Operasi Globetrotter”, yaitu pendaratan amfibi dan operasi berikutnya di sekitar Sausapor, Nugini Belanda di Semenanjung Vogelkop selama Perang Dunia II. (http://en.Wikipedia.org/wiki/Battle_of_Sansapor#cite_note-Morison-1).

Tentara Sekutu mendarat di Sausapor pada 30 Juli 1944. Tentara Sekutu yang mendarat itu terdiri atas unsur-unsur Angkatan Darat Amerika Serikat Divisi Infanteri 6 di Opmarai daratan Sausapor, dan di Pulau Middelburg dan pulau Amsterdam di barat laut Sausapor. Pendaratan berjalan mulus tanpa hambatan. Pada 31 Juli, dengan selesainya landasan pesawat terbang, maka pesawat B-25 dan P-38 mendarat dan mendukung pasukan infantri sekutu dalam pertempuran Sausapor. Operasi Globetrotter berhasil memutuskan hubungan tentara Jepang di Manokwari dengan unit-unit Jepang lainnya. Mereka berusaha mundur ke Sorong. Namun, tentara Jepang di Sorong dan Makbon hingga Sausapor telah terdesak sehingga melarikan diri ke hutan. Masyarakat yang tahu bahwa tentara Jepang kelaparan, kemudian memancing tentara Jepang keluar hutan dengan kelapa muda. Kurang lebih 40 orang tentara Jepang keluar menuju pantai dan tanpa ragu-ragu memakan kelapa muda. Pada saat itulah masyarakat membantai tentara Jepang. Mayat mereka kemudian dibuang di kebun sagu yang berawa hidup di Mga. (*Wawancara dengan Bapak Frederik Sani, Mga, 22 Mei 2013*). Operasi diselesaikan pada 31 Agustus, dengan korban 34 tewas dan terluka 85, ditambah sembilan tewas karena sakit. (http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Sansapor#cite_note-Morison-1). Sementara dari pihak tentara Jepang, pasukan Typhoon membunuh 379 Jepang dan menangkap 213 tahanan dimana 10 tewas dan 31 sakit. (<http://www.ibiblio.org/hyperwar/AAF/IV/AAF-IV-19.html>).

Untuk mengamankan masyarakat dari perang antara Sekutu dan Jepang, Sekutu membuat lokasi penampungan pengungsi sementara di dekat kali Wenai. Masyarakat dijamin hidupnya oleh sekutu dengan memberikan mereka ransum minimalsekali seminggu, pakaian, dan jaminan kesehatan. Masyarakat pun dilarang memasak pada siang hari.

Memasak hanya boleh dilakukan pada malam hari agar asapnya tidak terlihat oleh pihak Jepang. Bila ada penduduk yang berhasil membunuh Jepang, barang milik Jepang yang dijadikan bukti, akan dibeli oleh Sekutu (Wawancara dengan Cosmos Mambrasar . Werur, 27 Mei 2013).

Pertempuran terus berlangsung antara pihak Jepang dan Sekutu. Karena itu, Sekutu mengungsikan penduduk Sausapor ke Numfor. Satu tahun kemudian setelah Jepang kalah perang dan Belanda kembali berkuasa atas Papua, Sekutu menyerahkan para pengungsi Sausapor kepada Belanda. Selanjutnya, Belanda membawa pulang penduduk Sausapor dari Numfor kembali ke Sausapor (Wawancara dengan Cosmos Mambrasar. Werur, 27 Mei 2013).

E. Dampak Pendaratan Tentara Sekutu

Pendaratan tentara Sekutu di Papua membawa dampak yang positif bagi masyarakat Papua. Penduduk Papua dibebaskan dari pendudukan Jepang oleh Sekutu lebih awal dari wilayah Indonesia lainnya. Bagi penduduk Papua, akhir masa pendudukan Jepang mulai tampak ketika pada 22 April 1944 kumpulan kapal-kapal Amerika Serikat mendekati pantai daerah Hollandia (Jayapura) dan melumpuhkan tentara pendudukan Jepang di Jayapura. Setelah Jayapura berhasil diduduki tentara Sekutu, pada 17 Mei 1944 serangan dilanjutkan dengan pendaratan kesatuan Divisi ke-41 ke Pulau Wakde. Serangan tersebut berhasil melumpuhkan tentara Jepang di Pulau Wakde. Sasaran berikutnya adalah Pulau Biak yang merupakan basis pertahanan terbesar yang kedua setelah Jayapura yang diduduki tentara Jepang. Serangan dilaksanakan oleh Divisi ke-41 pada 27 Mei 1944. Tentara Jepang ditaklukkan oleh tentara Sekutu sehingga Pulau Biak dapat diduduki oleh tentara Sekutu. Dari Pulau Biak diusahakan penaklukan Pulau Numfor. Pada 2 Juli 1944 Pulau Numfor berhasil diduduki oleh tentara Sekutu. Sasaran terakhir adalah menaklukkan tentara Jepang di Sausapor, ujung barat laut dari Papua. Penaklukan Sausapor serta kedua pulau-pulau kecil di perairan

sekelilingnya mengakhiri operasi militer Sekutu di Papua. Dengan demikian, berakhirlah masa pendudukan Jepang di Papua setahun lebih awal dari pada di daerah-daerah lain di Indonesia (Koentjaraningrat dan Bachtiar, 1963: 73-75).

Kemampuan tentara Sekutu melumpuhkan tentara pendudukan Jepang di Papua menumbuhkan anggapan dari masyarakat Papua bahwa tentara Sekutu merupakan penyelamat bagi mereka. Hal ini dapat diketahui dari penuturan Korneles Mambrasar di Kampung Werur yang menyatakan bahwa masyarakat Werur dan Sausapor menganggap tentara Sekutu sebagai dewa penolong bagi mereka sehingga orang tua mereka menerima kehadiran tentara Sekutu di daerahnya. Bahkan tentara Sekutu membagi-bagikan makanan dan pakaian kepada masyarakat di Werur dan Sausapor (Wawancara dengan Korneles Mambrasar di Werur). Anggapan yang demikian secara langsung telah mempercepat proses pendaratan Sekutu di Papua.

Penduduk Papua menganggap tentara Sekutu telah menghancurkan musuhnya yaitu tentara Jepang yang berperangai bengis. Selama masa pendudukan tentara Jepang di Papua, perlakuan tentara Jepang terhadap penduduk Papua sangat tidak manusiawi. Oleh karena itu, penduduk Papua mendukung dan bekerja sama dengan tentara Sekutu untuk melumpuhkan tentara Jepang, sehingga penindasan yang dilakukan Jepang terhadap masyarakat Papua dapat berakhir. Selain itu, dukungan masyarakat Papua terhadap tentara Sekutu juga tidak terlepas dari sikap yang bersahabat dan perlakuan baik dari tentara Sekutu terhadap masyarakat Papua.

Perlakuan baik dari tentara Sekutu juga dialami oleh penduduk Sausapor dan sekitarnya. Ketika tentara Sekutu mendarat di Sausapor, mereka membangun dapur umum. Tentara Sekutu membagi-bagikan makanan, obat-obatan, dan pakaian kepada penduduk setempat. Penduduk setempat memperoleh jatah makanan seminggu sekali dan pakaian serta selimut dan kelambu. Pembagian makanan dan obat-obatan kepada penduduk berdampak terhadap peningkatan kesehatan

an masyarakat. Pembagian selimut dan kelambu dapat menekan perkembangan penyakit malaria yang pada saat itu banyak diderita oleh penduduk setempat. Perlakuan tentara Sekutu itu berbanding terbalik dengan perlakuan tentara Jepang terhadap penduduk. Tentara Jepang memaksa penduduk untuk melakukan kerja paksa tanpa bayaran. Selain itu, tentara Jepang mengambil bahan makanan penduduk tanpa ganti rugi (wawancara dengan Korneles Mambrasar di Werur, 24 Mei 2013).

Tentara Sekutu membangun jalan dari sungai Wenai hingga sungai Vasway. Pembangunan jalan tersebut memudahkan penduduk untuk melakukan mobilisasi. Dengan demikian, penduduk terbantu dalam mengangkut hasil kebun dan hasil hutan ke rumah ataupun ke pasar. Selain itu, Tentara Sekutu juga membangun landasan pesawat tempur di Werur. Pembangunan landasan pesawat di Werur membawa dampak positif kepada masyarakat di Sausapor dan sekitarnya. Tentara Sekutu memperkenalkan alat transportasi udara kepada masyarakat di Sausapor dan sekitarnya. Sebelumnya masyarakat di wilayah itu hanya mengenal alat transportasi laut dengan teknologi yang sangat sederhana. Kehadiran tentara Sekutu menyebabkan masyarakat di wilayah itu mengenal peralatan perang yang modern. Sebelum kehadiran tentara Sekutu, masyarakat hanya mengenal peralatan perang tradisional seperti tombak dan panah (Wawancara dengan Cosmos Mambrasar. Werur, 27 Mei 2013).

F. Peninggalan Sejarah Tentara Jepang dan Sekutudi Sausapor

Menurut penuturan Kornelis Mambrasar, Sekretaris kampung Werur, bahwa peninggalan Perang Dunia II sangat banyak ditemukan di wilayah Werur. Pesawat-pesawat tempur, kapal, tank dan berbagai fasilitas perang lainnya ditinggalkan oleh tentara Sekutu begitu saja. Namun, sekarang benda-benda peninggalan Perang Dunia II itu telah menjadi besi tua, yang sebagian besar telah dijual oleh penduduk Werur. Penjualan besi tua peninggalan Perang Dunia II itu karena

masyarakat setempat belum menyadari pentingnya pelestarian benda-benda bersejarah. Oleh karena itu, peran pemerintah daerah dalam mensosialisasikan pentingnya pelestarian benda bersejarah sangat dibutuhkan. Peninggalan Perang Dunia II yang masih tersisa hanyalah yang berada di hutan (wawancara dengan Kornelis Mambrasar di Werur pada 24 Mei 2013).

Berdasarkan pengamatan dan penelusuran jejak Perang Dunia II yang dilakukan oleh tim peneliti dari BPNB Provinsi Papua bahwa masih ada peninggalan Perang Dunia II di Sausapor yang dapat dijadikan sebagai destinasi wisata dunia. Pelestarian peninggalan tentara Jepang dan tentara Sekutu di Sausapor dan sekitarnya memungkinkan para wisatawan dari luar Papua dan dari luar Indonesia untuk melakukan napak tilas Perang Dunia II di wilayah itu. Peninggalan-peninggalan Perang Dunia II di wilayah itu, membuktikan bahwa Sausapor merupakan saksi Perang Dunia II. Ada berbagai peninggalan Perang Dunia II yang masih ditemukan di Sausapor dan sekitarnya yang diharapkan dapat menarik minat para wisatawan untuk menjadikan Sausapor dan sekitarnya sebagai destinasi wisata. Adapun peninggalan-peninggalan Perang Dunia II di Sausapor dan sekitarnya yang masih tersisa adalah tank-tank yang digunakan tentara Sekutu untuk mengalahkan tentara Jepang. Tank-tank perang tersebut kini masih tersimpan di hutan sekitar Kampung Werur. Selain tank-tank perang, di pemukiman penduduk masih ditemukan landasan pesawat yang terbuat dari baja. Namun, landasan pesawat yang terbuat dari baja itu, kini telah beralih fungsi. Penduduk setempat memotong-motong landasan itu dan menjadikan potongan landasan itu sebagai pagar rumah dan tempat duduk. Landasan pesawat yang dibangun tentara Sekutu di desa Werur kini telah dibangun kembali oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tambrau.

Tentara Jepang sebagai pihak yang kalah perang dalam Perang Dunia II mengalami kerugian baik material maupun prajurit perangnya. Di Sausapor, tentara Jepang banyak yang meninggal dunia karena ketidakmampuannya melawan tentara Sekutu. Tulang belulang para

tentara Jepang yang meninggal dalam Perang Dunia II, dikuburkan di Sausapor. Kuburan massal dari para prajurit Jepang ditemukan di Sausapor. Untuk memperingati jasa-jasa para prajurit Jepang tersebut, pemerintah Jepang membangun sebuah tugu di Sausapor yang menjadi tempat penguburan tulang belulang prajurit perang Jepang. Tugu tempat penguburan itu perlu dilestarikan sebagai destinasi wisata para keturunan prajurit perang itu.

Peninggalan Perang Dunia II yang masih tersisa di Sausapor dan sekitarnya sebagai berikut:



Gambar 28. Bekas lapangan terbang Sekutu.
Sumber : Tim Sausapor BPNB Jayapura

Pada Perang Dunia II, lapangan terbang di Sausapor itu terbuat dari tikar baja. Oleh karena itu, pembangunan landasan pesawat tersebut hanya dilakukan dalam beberapa hari saja. Hal ini membuktikan bahwa persiapan perang tentara Sekutu dalam menghadapi tentara Jepang sangat baik, sehingga tentara Jepang dengan mudah dapat dikalahkan tentara Sekutu.

Lapangan terbang yang terbuat dari tikar baja, yang dibangun tentara Sekutu, kini tinggal kenangan. Masyarakat setempat telah memotong-motong tikar baja tersebut dan mengambilnya untuk kepentingan pribadi. Sebagian masyarakat Sausapor menjual potongan tikar baja itu kepada pedagang besi tua. Pada umumnya pedagang besi tua adalah orang Buton, sehingga ada pameo di wilayah itu yang menyatakan bahwa kehadiran orang Buton di wilayah itu telah menghabiskan semua besi tua yang selama ini dianggap tidak mempunyai nilai. Ada juga di kalangan penduduk di wilayah itu, yang menjadikan potongan tikar baja itu sebagai pagar rumahnya dan tempat duduk di halaman rumahnya.



Gambar 29. bekas kapal sekutu yang sudah dipotong-potong untuk dijual.
Sumber : Tim Sausapo BPNB Jayapura

Sementara itu, bekas kapal tentara Sekutu pada Perang Dunia II di Sausapor telah dipotong-potong masyarakat setempat untuk selanjutnya dijual kepada pedagang besi tua. Ketika tim peneliti tiba di wilayah itu, ditemukan tumpukan-tumpukan potongan kapal tentara Sekutu di sekitar pantai Kampung Werbes. Menurut Kornelis Mambrasar,

tumpukan potongan kapal tentara Sekutu itu siap untuk dijual kepada pedagang besi tua. Lebih lanjut Kornelis Mambrasar menjelaskan bahwa masyarakat setempat menjual potongan bekas kapal tentara Sekutu pada Perang Dunia II karena masyarakat setempat tidak mengetahui nilai sejarah dari kapal tentara Sekutu itu. Kebetulan pedagang besi tua datang ke kampung itu dan berkenan membayar potongan besi tua tersebut dengan harga yang menggiurkan masyarakat untuk menjualnya (wawancara dengan Kornelis Mambrasar di Werur pada 24 Mei 2013).



Gambar 30. Mesin kapal yang sudah dipotong
Sumber : Tim Sausapor BPNB Jayapura

Peninggalan tentara Sekutu yang masih utuh ditemukan di hutan sekitar Kampung Werbes. Adapun peninggalan dimaksud adalah mobil tank tentara Sekutu. Keberadaan mobil tank tentara Sekutu itu terdapat di hutan rimba sekitar Kampung Werbes, sehingga agak sulit untuk dipindahkan masyarakat setempat. Hal inilah mungkin yang menyebabkan benda peninggalan tentara Sekutu itu masih tersimpan hingga kini di hutan. Setelah tim peneliti menjelaskan kepada

masyarakat Kampung Werbes tentang pentingnya melestarikan benda-benda peninggalan sejarah Perang Dunia II di Sausapor umumnya dan khususnya di Kampung Werbes (termasuk mobil tank tentara Sekutu yang terdapat di hutan sekitar Kampung Werbes), Sekretaris Kampung Werbes berjanji untuk mensosialisasikannya kepada masyarakatnya agar masyarakat kampung itu melestarikan benda-benda bersejarah peninggalan Perang Dunia II di wilayah itu (wawancara dengan Kornelis Mambrasar di Werur pada 24 Mei 2013).



Gambar 31. Mobil tank sekutu yang berada di Kampung Werbes.
Sumber : Tim Sausapor BPNB Jayapura

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sausapor adalah satu distrik di Kabupaten Tambrauw Provinsi Papua Barat. Pada awalnya, tidak ada penduduk yang bermukim di daerah pesisir Sausapor. Penduduknya merupakan penduduk migran dari Biak Numfor yang kemudian menetap di tempat itu. Pada masa kekuasaan Tidore, penduduk daerah ini wajib memberi sesembahan (upeti) kepada Sultan Tidore. Perubahan sosial budaya dan ekonomi masyarakatnya terjadi ketika Belanda menguasai Papua dan menyebarkan guru-guru Injil. Penduduk Sausapor pun meminta guru Injil, sehingga di Sausapor kemudian dibangun gereja, sekolah dan pelayanan penginjilan yang menyebabkan masyarakat pegunungan turun ke pantai, sehingga jumlah penduduk di pesisir bertambah.

Pada masa Jepang, Sausapor tidak dianggap sebagai tempat yang strategis, sehingga Jepang hanya menempatkan satu unit pasukan tongkang di Mar dan sebuah pos di atas gunung Kwor. Jepang hanya mengambil masyarakat Sausapor yang produktif untuk kerja paksa dalam membangun landasan di Babo dan Yefman Sorong. Tindakan Jepang yang sewenang-wenang terhadap masyarakat menyebabkan masyarakat lari ke hutan.

Masyarakat baru keluar hutan, ketika tentara Sekutu tiba di Sausapor dalam operasi Globetroter yaitu pendaratan amfibi dan operasi berikutnya di sekitar Sausapor, Nugini Belanda di Semenanjung

Vogelkop selama Perang Dunia II. Operasi Globetroter berlangsung dari 30 Juli hingga 31 Agustus 1944. Sekalipun telah berakhir, namun Sekutu masih menggunakan Sausapor hingga Desember 1944, sebelum kemudian diserahkan kepada Belanda. Sausapor sebagai saksi sejarah Perang Dunia II, dapat dibuktikan dengan banyaknya peninggalan Sekutu di daerah itu, yang masih dapat dilihat dan dijadikan destinasi wisata dunia warisan Perang Dunia II.

B. Saran

1. Bekas peninggalan Perang Dunia II perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah Kabupaten Tambrau dan pusat, karena merupakan peninggalan sejarah yang sifatnya mendunia.
2. Sebagai peninggalan sejarah dunia, sisa-sisa benda hasil Perang Dunia II merupakan aset yang sangat berharga bagi pemerintah daerah Kabupaten Tambrau dan masyarakat, karena dapat meningkatkan PAD dan *income* bagi masyarakat setempat yang hidup disekitarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abineno, J. L. Ch. *Sejarah Apostolat di Indonesia*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1978.
- Bone, Robert C. *The Dynamics of The Western New Guinea (Irian Barat) Problem*. Ithaca: Cornell Universty, 1958.
- Campo, J. N. F. M. *Kononklijke Paketvaart Maatschappij: Stoomvaart en Saatsvorming in de Indonesische Archipel 1888-1914*. Hilversum: Uitgerij Verloren, 1992.
- Clercq, F. S. A. de, "De West-en Noordkust van Nederlandsch Nieuw Guinea", *Tijdschrift van Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap*, X, 1893. 156-192.
- End, Th. Van den dan Weitjens, J. , *Ragi Carita 2: Sejarah Gereja di Indonesia 1860-an – Sekarang*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1998.
- Galis, K. W. *Manoekwari 50 Jaar Bestuurpost*, (11), *Tijdschriff Nieuw Guinea*, Aflevering 5 Januari 1949. 142-149.
- Galis, K. W. dan H. J. Van Dooruik, *Een Gouden Jubelium 50 Jaar Hollandia Van 7 Maart 1910 tot 7 Maart 1960*. Hollandia: Landsrukkerij,1960.
- Kartodirdjo, Sartono. *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1992.
- Kabupaten Tambrauw Dalam angka 2012, BPS Kabupaten Tambrauw.

- Kamma, F. C. *Ajaib Di Mata kita*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1981.
- Koentjaraningrat dan Harsja W. Bachtiar. *Penduduk Irian Barat*. Jakarta: Penerbitan Universitas, 1963.
- Leirissa, R. Z. Halmahera Timur dan Raja Jailolo: Pergolakan sekitar Laut Seram awal Abad 19, 1996, Jakarta : Balai Pustaka.
- Laporan KKL Mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah Jurusan Pendidikan IPS FKIP Universitas Cenderawasih, Jayapura, 2002.
- Laporan KKL Mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah Jurusan Pendidikan IPS FKIP Universitas Cenderawasih, Jayapura, 2005.
- Mansoben, Johszua Roberrrt. *Sistem Politik Tradisional di Irian Jaya*. Jakarta: LIPI-RUL, 1995.
- Mededeelingen van het Bureau voor de Bestuurzaken der Buitengewesten Bewerkt door het Encyclopadae Bureau, Batavia: Javasche Boekhanden & Drukerij, 1920. 120-160.
- Muridan Widjojo. *The Revolt of Prince Nuku: Cross-Cultural Alliance-Making in Maluku. c. 1780-1810*, Leiden: Brill, 2009.
- Mampiooper, A. *Jayapura Ketika Perang Pasifik*. Jayapura: Labor, 1972.
- Manchester, William, *Mac Arthur Sang Penakluk*. Jakarta: Pustaka Harapan, 1898.
- Morison, Samuel Eliot, *New Guinea and the Marianas March 1944-August 1944*. Boston: Little, Brown and Company, 1960.
- Notosusanto, Nugroho, *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer (Suatu Pengalaman)*. Jakarta: Yayasan Indayu, 1978.
- Poesponegoro, Marwati Djoned dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI*. Jakarta: Balai Pustaka, 1991.
- Ojong, P. K. *Perang Pasifik*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2001.
- Onghokham, *Runtuhnya Hindia Belanda*. Jakarta: Gramedia: 1989.

- Profil Kabupaten Tambrauw, 2011, Bappeda kabupaten Tambrauw.
- Poesponegoro, Marwati Djoned dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI*. Jakarta: Balai Pustaka, 1991.
- Ricklefs, M. C. *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998.
- Randwijck, S. C. Graff van. Oegstgeest: Kebijakan “Lembaga-Lembaga Pekabaran Injil Yang Bekerja Sama” 1897-1942. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1989.
- Schoorl, PIM. Belanda di Irian Jaya: Amtenar di Masa Penuh Gejolak 1945-1962. Jakarta: Garba Budaya, 2001.
- Stibbe, D. G. *Encyclopaedie van Nederlandsch-Indie derde deel*. 's Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1919.
- Shiraishi, Saya dan Takashi Shiraishi, *Orang Jepang di Koloni Asia Tenggara*. Jakarta: Yayasan Obor, 1998.
- Siagian, A. W. 1978. *Jayapura Dulu, Sekarang dan Esok* . Jayapura: Pemerintah Daerah I Irian Jaya, 1978
- Soedharto, Bondan, dkk. , *Sejarah Perjuangan Rakyat Irian Jaya*. Laporan Penelitian, Jayapura: Badan Perencanaan Pengembangan Daerah Tingkat I Irian jaya, 1989.
- Soedharto, Bondan, “Kota Jayapura Dalam Sejarah Perjuangan Suatu Kajian Sejarah Lokal”. Makalah Seminar Sehari Memperingati HUT IV Kota Madya Jayapura, 1997.
- Vriens, A. Sejarah Gereja Katolik Indonesia Wilayah-Wilayah Keuskupan dan Majelis Agung Indonesia Abad Ke-20 Sumatera, Sulawesi, Maluku, Kalimantan, Irian Jaya. Jakarta: Bagian Dokumentasi Penerangan Kantor Waligereja Indonesia, 1974.

Internet:

<http://www.scribd.com/doc/17350976/Layout-Buku-Ekonomi-Otonomi-Daerah>

<http://kabupatentambrauw.com/daftar-nama-kecamatan-kelurahan-desa-kodepos/>

<http://www.flickr.com/photos/kabupatentambrauw/8262389831/>

<http://www.history.army.mil/books/wwii/MacArthur%20Reports/MacArthur%20V2%20P1/ch10.htm#p303>

http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Sansapor

<http://www.history.navy.mil/danfs/118/1st-459.htm>

<http://www.owensarchive.com/world-war-ii-9/pacific-theater-160/new-guinea-australia-347/>

<http://en.wikipedia.org/wiki/Sansapor>

<http://www.ibiblio.org/hyperwar/AAF/IV/AAF-IV-19.html>

http://ww2db.com/image.php?image_id=11682

<http://www.pacificwrecks.com/>

Makalah/Laporan/Catatan :

Presentasi Bupati Tambrauw Gabriel Asem, SE, pada acara Musrembang UP4B, 13 Pebruari 2012.

Catatan isi rapat KKBM, Werur, 2 Pebruari 2009.

Djekky R. Djoht, Jurnal Antropologi Uncen, 2000.

DAFTAR INFORMAN

1. Nama : Agus Mofu
Umur : 60 tahun
Pekerjaan : Mantan Kepala Desa Sausapor
Alamat : Kampung Sausapor
2. Nama : Anis Malak
Umur : 40 tahun
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Kampung Sausapor
3. Nama : Stevanus Mampiopir
Umur : 83 tahun
Pekerjaan : Mantan Bestuur
Alamat : Kampung Sausapor
4. Nama : Moses Paraibabo
Umur : 56 tahun
Pekerjaan : Mantan Kepala Kampung Werur
Alamat : Kampung Werur
5. Nama : Korneles Manbrasar
Umur : 43 tahun
Pekerjaan : Sekretaris Kampung Werur
Alamat : Kampung Werur

6. Nama : Cosmos Mambrasar
Umur : 89 tahun
Pekerjaan : Petani
Alamat : Kampung Werur
7. Nama : Musa Yekese
Umur : 43 tahun
Pekerjaan : Sekretaris Kampung Werbes
Alamat : Kampung Werbes
8. Nama : Pieter Mambrasar
Umur : 48 tahun
Pekerjaan : Kepala Distrik Sausapor
Alamat : Kampung Sausapor
9. Nama : M. Zen H
Umur : 45 tahun
Pekerjaan : PNS (Asisten I Kabupaten Tambrauw)
Alamat : Kampung Sausapor
10. Nama : M. Izak Imbiri
Umur : 45 tahun
Pekerjaan : PNS (Binamarga, PU Kabupaten Tambrauw)
Alamat : Kampung Sausapor

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Foto-foto



Proses pembuatan landasan pesawat terbang sekutu.
Sumber http://ww2db.com/image.php?image_id=11682
Bandara sekutu di werur sausapor kab. Tambrau



Para pekerja yang sedang mengerjakan lapangan terbang dengan menyusun tikar baja sebagai landasan pesawat terbang.

Sumber : http://ww2db.com/image.php?image_id=11682



Lapangan Terbang Sekutu Yang Berada di Kampung Werur yang nampak dari atas.

Sumber : http://ww2db.com/image.php?image_id=11682



Lapangan terbang Sekutu di Kampung Werur
Sumber: www.facebook.com/...abupaten-Tambrau/173769519350934



Lapangan terbang di Werur yang pada saat pesawat lagi mendarat
http://ww2db.com/image.php?image_id=11682
Bandara sekutu di werur sausapor kab. Tambrau



Kapal pengangkut tentara sekutu menuju Sausapor
http://ww2db.com/image.php?image_id=11682



Lapangan terbang Sekutu di Werur yang sekarang mau dijadikan lapangan terbang Kabupaten Tambrauw.

Sumber : Tim Sausapor BPNB Jayapura



Kantor dan rumah Bestuur yang berada di Kampung Sausapor.
Sumber : Tim Sausapor BPNB Jayapura



Rumah sakit pada masa Pemerintahan Belanda
Sumber : Tim Sausapor BPNB Jayapura



Tugu Jepang yang tepat berada di belakang Rumah bestuur atau yang sekarang rumah Kepala Distrik Sausapor.
Sumber : Tim Sausapor BPNB Jayapura



Kantor Distrik Sausapor
Sumber : Tim Sausapor BPNB Jayapura



Bekas tank peninggalan-peninggalan pada Perang Dunia ke-II yang terdapat di kampung werbes.

Sumber : Tim Sausapor BPNB Jayapura



Bekas-bekas kapal sekutu yang sudah dipotong

Sumber: Tim Sausapor BPNB Jayapura



Baling-baling kapal yang sudah dipotong
Sumber : Tim Sausapor BPNB Jayapura



Tali jangkar kapal sekutu
Sumber : Tim Sausapor BPNB Jayapura



Bekas peninggalan yang sudah dipotong-potong oleh masyarakat untuk dijual atau dijadikan bestu

Sumber : Tim Sausapor BPNB Jayapura



Bekas gorong-gorong yang dibuat oleh sekutu

Sumber : Tim Sausapor BPNB Jayapura



Salah satu bekas peninggalan tikar Baja yang digunakan oleh masyarakat untuk membuat tempat duduk.

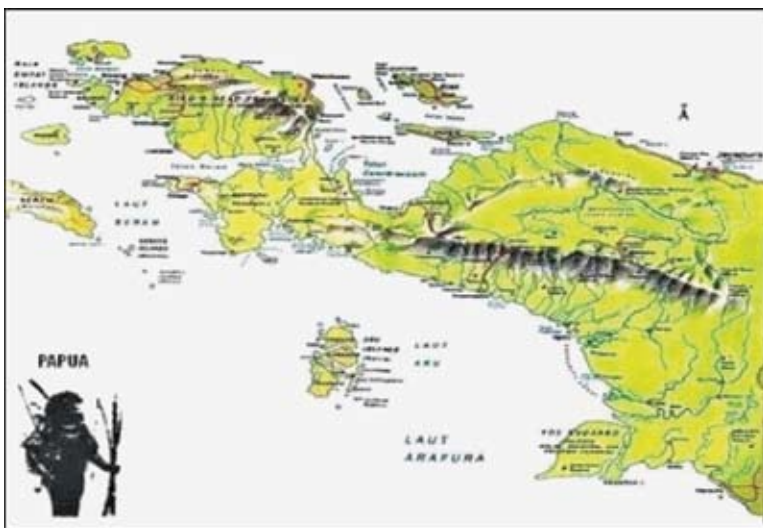
Sumber : Tim Sausapor BPNB Jayapura



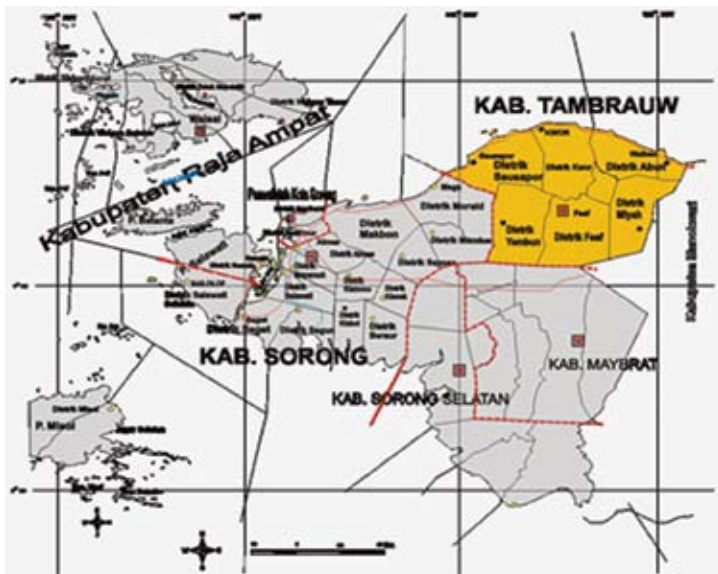
Besi bekas landasan udara Sekutu yang diambil oleh masyarakat untuk dijadikan pagar rumah.

Sumber : Tim Sausapor BPNB Jayapura

2. Peta-peta



Peta Provinsi Papua dan Papua Barat



Peta Kabupaten Tambrauw
Sumber : Tim Sausapor BPNB Jayapura

